

c

800

N



**ASPEK GEOGRAFI BUDAYA
DALAM WILAYAH PEMBANGUNAN
DAERAH ISTIMEWA ACEH**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIBLIOTHEEK KITLV



0071 9243

AS

PI

C - 800 - N

Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan.

PEK GEOGRAFI BUDAYA DALAM WILAYAH EMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1983.

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah Aspek Geografi Budaya Dalam Wilayah Pembangunan D.I. Aceh Tahun 1979/1980.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

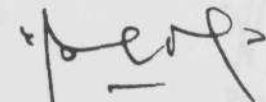
Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. Razali Umar, Dr. Syamsuddin Mahmud, Drs. Adnan Abdullah, Dra. Mariati Juned, Drs. M. Diah Ibrahim, Drs. Hasan Kasim, Drs. M. Jakfar Husein, Drs. Husaini Daud, dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Drs. Djenen MSc, Wisnu Subagyo BA.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, September 1983

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130 117 589

Banyak inventaris dan dokumentasi kebudayaan yang telah terkumpul sejak dari jaman tradisional. Inventaris kebudayaan an jaman modern dan kebudayaan telah mengalami perkembangan yang pesat. Banyak kebudayaan telah mengalami perubahan yang pesat. Banyak kebudayaan telah mengalami perubahan yang pesat. Banyak kebudayaan telah mengalami perubahan yang pesat.

Kami menyadari bahwa banyak hal belum terungkap atau telah terlupakan yang mungkin, tetapi kita perlu tetap berpegang pada prinsip yang sederhana dalam mengembangkan ilmu-ilmu budaya.

Berbagai macam hal dapat kita jumpai yang ada di sekitar kita. Kita dapat melihat banyak hal yang ada di sekitar kita. Kita dapat melihat banyak hal yang ada di sekitar kita. Kita dapat melihat banyak hal yang ada di sekitar kita.

Orang lain di luaran masyarakat sudah ada, maka kita harus bisa melihat yang tersembunyi dalam masyarakat yang ada di sekitar kita.

Demikian pula halnya yang terjadi dalam hal kebudayaan. Kita dapat melihat banyak hal yang ada di sekitar kita. Kita dapat melihat banyak hal yang ada di sekitar kita. Kita dapat melihat banyak hal yang ada di sekitar kita.

Itulah yang kita perlukan sebagai pedoman.

Jakarta, September 1983

Pengantar

Prof. Dr. H. S. S. S.

130 117 589

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1979/1980 telah berhasil menyusun naskah Aspek Geografi Budaya dalam Wilayah Pembangunan D.I. Aceh.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

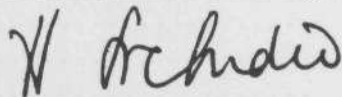
Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, September 1983

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

SAMPUTAN DOKTER JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Penelitian dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Di
Kecamatan Seberida dan Negeri Tondok Kecamatan Seberida
dan Negeri Tondok Kecamatan Seberida dan Negeri Tondok
1979/1980 telah selesai dikerjakan oleh Aspek Aspek Budaya
dalam Wilayah Kecamatan Di Atas.

Selanjutnya setelah ini diadakan adanya kerjasama yang baik
dan semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari
Pihak Pemerintah Tingkat, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Pemerintah Daerah serta Lembaga Pendidikan Swasta yang ada
di sekitarnya.

Hasil ini adalah suatu hasil penelitian dan hasil penelitian
yang dapat dipertanggungjawabkan pada waktu yang akan
datang.

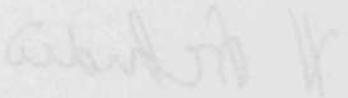
Untuk mencapai, mengupayakan, memelihara, serta menjaga
pelayanan wisata budaya yang terdapat yang ada dalam daerah
ini maka diadakan kerja sama terutama dalam penelitian.

Hal tersebut ini akan merupakan bahan dengan penelitian
yang akan merupakan suatu penelitian dan penelitian yang
tidak sedikit adanya yang diperlukan penelitian yang akan
menjadi sumbernya penelitian kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu suksesnya proyek penelitian ini.

Jakarta, September 1983

Dokter Jendral Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soedibyo

MIP. 130 119 123

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR PETA	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Metode Penelitian	2
C. Sumber Data	9
BAB II. LATAR BELAKANG LINGKUNGAN BUDAYA ..	14
A. Lingkungan Alami	14
B. Tata Guna Tanah	21
C. Lingkungan Sosial Budaya	22
BAB III. PEMBANGUNAN WILAYAH	53
A. Perwilayahan dan Tipe-tipe Pembangunan	53
B. Wilayah Pembangunan Pelita II	56
C. Wilayah Pembangunan Pelita III	57
BAB IV. ANALISIS KARAKTERISTIK WILAYAH PEM- BANGUNAN	74
A. Analisis Unsur Lingkungan Budaya	74
B. Kategorisasi ke Dalam Wilayah Pembangunan ..	85
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
LAMPIRAN	103
A. Glossary	103
B. Daftar Informan	106
Daftar Kepustakaan	108

DAFTAR ISI

Halaman	
iii	PENGANTAR
v	SAMBUTAN
vi	DAFTAR ISI
ix	DAFTAR PETA
xi	DAFTAR TABEL
1	BAB I PENDAHULUAN
1	A. Latar Belakang Penelitian
2	B. Metode Penelitian
2	C. Sumber Data
14	BAB II LATAR BELAKANG LINGKUNGAN BUDAYA
14	A. Lingkungan Alam
21	B. Tata Cara Tradisi
22	C. Lingkungan Sosial Budaya
23	BAB III PEMBANGUNAN WILAYAH
23	A. Perwajahan dan Tipe-tipe Pembangunan
26	B. Wilayah Pembangunan Peta II
27	C. Wilayah Pembangunan Peta III
24	BAB IV ANALISIS KARAKTERISTIK WILAYAH PEM- BANGUNAN
26	A. Analisis Urban Lingkungan Budaya
22	B. Kaitannya ke Dalam Wilayah Pembangunan
101	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
101	A. Kesimpulan
102	B. Saran
102	LAMPIRAN
102	A. Glossary
102	B. Daftar Informan
108	Daftar Kepustakaan

DAFTAR PETA

Peta	Halaman
II.1. Sketsa Geologi daerah Aceh	29
II.2. Peta tanah eksplorasi Propinsi D.I. Aceh	31
II.3. Peta keadaan tanah di D.I. Aceh	35
II.4. Sketsa fisigrafi D.I. Aceh	37
III.1. Wilayah Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam masa Pelita II	67
III.2. Wilayah Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam masa Pelita III	69

DAFTAR PETA

Halaman

Peta

10	II.1. Sketsa lokasi daerah Aceh
31	II.2. Foto tanah-tanah pertanian di Aceh
32	II.3. Foto tanaman padi di Aceh
37	II.4. Sketsa lokasi D.I. Aceh
61	III.1. Wilayah Persempitiran Daerah Istimewa Aceh dalam masa Peta II
62	III.2. Wilayah Persempitiran Daerah Istimewa Aceh dalam masa Peta III

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Responden digolongkan menurut umur dan daerah penelitian, 1979 (%)	11
I.2. Responden digolongkan menurut latar belakang pendidikan dan daerah penelitian, 1979 (%)	11
I.3. Responden digolongkan menurut jangka waktu pendidikan dan daerah penelitian, 1979 (%)	12
I.4. Responden digolongkan menurut mata pencaharian responden dan daerah penelitian, 1979 (%)	12
I.5. Responden digolongkan menurut mata pencaharian sambilan dan daerah penelitian, 1979 (%)	13
II.1. Curah hujan rata-rata bulanan dan tahunan menurut Kabupaten, di D.I. Aceh, 1966 - 1975	40
II.2. Curah hujan rata-rata bulanan di daerah Aceh, 1973 - 1977 (dalam mm)	40
II.3. Temperatur rata-rata bulanan di daerah Aceh, 1973 - 1977 (dalam 0°)	41
II.4. Lembab nisbi rata-rata bulanan daerah Aceh, 1973 - 1977 (dalam %)	42
II.5. Penggunaan tanah pada enam kabupaten di Aceh (%)	43
II.6. Perincian luas penggunaan tanah daerah istimewa Aceh	44
II.7. Tingkat perkembangan desa di daerah Istimewa Aceh 1976/1977	44
II.8. Produksi tanaman bahan makanan menurut kabupaten di daerah Aceh, 1977 (dalam ton)	45
II.9. Produksi tanaman perkebunan menurut kabupaten di daerah Aceh, 1977 (dalam ton)	46
II.10. Proyeksi dan penyebaran penduduk pada masing - masing kabupaten/kodya di Aceh 1978-1983	47
II.11. Kepadatan penduduk geografis dan agraris pada masing - masing kabupaten/kodya di Aceh, berdasarkan proyeksi tahun 1978 dan 1983	48
II.12. Perkembangan kesempatan kerja sektoral di daerah Aceh, 1971 - 1978	49
II.13. Elastisitas kesempatan kerja sektoral di daerah Aceh, 1971 - 1978	50

II.14.	Laju perkembangan angkatan kerja dan kesempatan kerja per wilayah pembangunan di daerah Aceh 1971 - 1978 ..	51
II.15.	Penyebaran sekolah di daerah Istimewa Aceh, 1977	52
III.1.	Jumlah dan kepadatan penduduk daerah Aceh, 1968	71
III.2.	Ekspor daerah Aceh menurut pelabuhan asal, 1969-1970	72
III.3.	Nilai impor daerah Aceh menurut pelabuhan impor 1969 - 1970	73
IV.1.	Aspek teknologi dalam bidang pertanian (dalam persentase)	93
IV.2.	Aspek kepercayaan/agama dalam bidang pertanian (dalam persentase)	93
IV.3.	Aspek ekonomi dalam bidang pertanian (dalam persentase)	94
IV.4.	Aspek organisasi sosial dalam bidang pertanian (dalam persentase)	94
IV.5.	Aspek teknologi dalam bidang peternakan (dalam persentase)	95
IV.6.	Aspek kepercayaan/agama dalam bidang peternakan (dalam persentase)	95
IV.7.	Aspek ekonomi dalam bidang peternakan (dalam persentase)	96
IV.8.	Aspek teknologi dalam bidang perikanan (dalam persentase)	96
IV.9.	Aspek kepercayaan/agama dalam bidang perikanan (dalam persentase)	97
IV.10.	Aspek ekonomi dalam bidang perikanan (dalam persentase)	97
IV.11.	Aspek teknologi dalam bidang perdagangan (dalam persentase)	98
IV.12.	Aspek kepercayaan/agama dalam bidang perdagangan (dalam persentase)	98
IV.13.	Tipologi lingkungan budaya daerah penelitian Pidie (dalam persentase)	99
IV.14.	Tipologi lingkungan budaya daerah penelitian Aceh Tengah (dalam persentase)	99
IV.15.	Tipologi lingkungan budaya daerah penelitian Aceh Timur (dalam persentase)	100
IV.16.	Tipologi lingkungan budaya daerah penelitian Aceh Barat (dalam persentase)	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.

Kepulauan Indonesia meliputi 27 propinsi, terbagi atas empat Wilayah Pembangunan Utama yang mencakup sepuluh Wilayah Pembangunan Ekonomi. Selanjutnya pada jenjang administrasi pemerintahan kebawah dibentuk unit - unit wilayah pembangunan yang lebih kecil. Hal ini ditegaskan di dalam buku IV Repelita II, yang menyatakan bahwa prinsip pembentukan wilayah dapat diterapkan dalam lingkungan daerah masing - masing propinsi dengan memperhatikan kaitan antara kabupaten - kabupaten dan kecamatan - kecamatan (Redmana, 1978 hal.65).

Pembentukan wilayah pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dapat dilihat dari segi administrasi pemerintahan. Daerah Aceh terbagi atas sepuluh daerah tingkat II kodya, 129 kecamatan, dan 5.642 gampong (kampung). Dalam kebijaksanaan pembangunan selama Pelita III seluruh wilayah propinsi tersebut dibagi atas empat wilayah pembangunan. Wilayah pembangunan Pertama meliputi Aceh Timur dan Aceh Tenggara; Wilayah Pembangunan II meliputi Aceh Barat, dan Aceh Selatan; Wilayah Pembangunan ke III meliputi Aceh Utara dan Aceh Tengah; Wilayah Pembangunan Keempat meliputi Aceh Besar, Pidie, Kodya Banda Aceh, dan Kodya Sabang (T. Risyad, 2t.al 1979, hal. 17-18). Dasar pembagiannya ditekankan kepada kesamaan potensi dan sumber - sumber yang tersedia, batas - batas administratif pemerintahan, dan kemungkinan - kemungkinan pengembangannya.

Prinsip perwilayahan yang perlu dipelajari adalah ciri-ciri lingkungan budaya di setiap wilayah pembangunan. Melalui studi ini diharapkan dapat dicapai dua tujuan penting. Pertama menginventarisasikan unsur-unsur geografi budaya dan lingkungan fisik masing - masing wilayah supaya dapat ditentukan ciri-ciri khususnya. Kedua, memberikan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan pada masing - masing wilayah sesuai dengan ciri-ciri khususnya. Informasi (embaran) seperti ini dari masing-masing wilayah pembangunan itu masih sangat langka. Oleh sebab itu para perencana regional mendasarkan rumusan sasaran analisisnya berdasarkan ketentuan-ketentuan admi-

nistratif dan politis saja (Fisher, 1975. hal. 9).

Maka jelaslah bahwa para perencana regional menghadapi beberapa hambatan. Hambatan terpenting bagi berbagai kegiatan pembangunan di Aceh terletak pada faktor-faktor lingkungan, penyebaran penduduk, dan kegiatan ekspor. Dilihat dari sudut lingkungan budaya daerah Aceh merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang terletak paling ujung di sebelah barat, dan relatif jauh terpencil dari tempat pemerintahan pusat. Keadaan demikian seringkali dipandang kurang menguntungkan bagi berbagai kegiatan pembangunan. Jumlah penduduk relatif kecil, tetapi pemukimannya tersebar. Di samping itu, nilai ekspor Aceh tergolong rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera (Hariri Hadi, 1971. hal 24).

Meskipun banyak hambatan yang ditemui dalam pengembangan wilayah Aceh, namun ada pula faktor-faktor potensial penunjang pembangunan; seperti pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Sebagian sumber potensial tersebut terdapat pada wilayah-wilayah tertentu saja, sementara sumber potensial lainnya boleh dikatakan dijumpai hampir pada semua wilayah. Sebagian kecil diantaranya sudah didayagunakan, tetapi sebagian besar masih dalam keadaan belum terolah. Keterbelakangan pendayagunaan sumber tersebut umumnya berkaitan erat dengan unsur-unsur budaya, seperti: sistem teknologi, ekonomi, kepercayaan dan organisasi sosial. Karena itu, studi mengenai aspek lingkungan budaya dalam masing-masing wilayah pembangunan di Aceh masih cukup relevan dan penting artinya.

Studi wilayah pembangunan ini akan lebih berhasil bila didasarkan atas pendekatan terpadu di dalam satu kesatuan wilayah. Kesatuan wilayah tersebut ditentukan oleh kesamaan ciri-ciri lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. Asumsi ini didasarkan kepada pendapat bahwa situasi geografi, topografi cuaca dan iklim, persediaan air, dan tingkat kesuburan tanah yang sangat berpengaruh terhadap fauna-flora sesuatu wilayah tidak mengenal batas-batas administratif (Majid Ibrahim, 1976, hal. 69). Oleh sebab itu keterpaduan pendekatan di dalam pembangunan diperlukan untuk memudahkan pengidentifikasian permasalahan dan sumber-sumber potensial, serta penetapan sasaran yang ingin dicapai. ai.

B. METODE PENELITIAN.

Studi mengenai wilayah pembangunan ini dibatasi kepada berbagai unsur-sosial budaya yang berpengaruh terhadap pembentukan

dan pengembangan wilayah-wilayah tertentu. Di antaranya adalah teknologi, kepercayaan/agama, ekonomi, dan organisasi sosial, tanpa mengabaikan pentingnya pengaruh unsur-unsur sosial budaya lainnya.

Dilihat dari sudut pandangan lingkungan budaya, wilayah (regional) mengandung makna tata ruang (spatial) di permukaan bumi yang mempunyai kesamaan karakteristik tertentu, baik yang berwujud fisik maupun spesies. Kecuali itu, ciri-ciri suatu wilayah dapat pula dibedakan berdasarkan apa-apa yang berhubungan dengan lingkungan alam dan manusia. Yang berhubungan dengan manusia dapat dibedakan lagi antara ciri kependudukan dan kebudayaan. Ada pun kebudayaan dalam kaitan ini adalah semua buatan manusia akibat hubungannya dengan permukaan bumi (Djenen, 1979. hal. 4). Untuk mempelajari berbagai ciri tersebut ada dua konsep umum analisis regional yang dapat dipergunakan yaitu konsep homogenitas regional dan konsep sentralitas regional (Fisher, 1975. hal. 7). Konsep homogenitas regional memandang bahwa suatu wilayah tata ruang memperlihatkan ciri-ciri tertentu yang relatif sama sehingga memudahkan pembedaannya dengan wilayah tata ruang lainnya, terutama untuk tujuan-tujuan perencanaan dan kebijaksanaan. Konsep sentralitas regional memandang bahwa organisasi tata ruang sesuatu wilayah untuk berbagai kegiatan dan sumber dayanya adalah saling berbeda. Namun pusat-pusat kegiatan dan sumber-sumber daya tersebut akan dapat menghubungkan berbagai tata ruang yang saling berbeda dan menyebar.

Namun studi ini cenderung untuk membatasi diri kepada tipologi-tipologi yang dimiliki oleh sub-sub wilayah pembangunan tertentu. Untuk itu tipologi tersebut dibedakan menjadi enam jenis. Pertama wilayah pembangunan pertanian, yang dibedakan lagi antara wilayah pembangunan pertanian bahan makanan dan bukan bahan makanan. Kedua, wilayah pembangunan perikanan. Ketiga, wilayah pembangunan perternakan. Keempat, wilayah pembangunan perindustrian, baik wilayah pembangunan perindustrian kecil maupun besar. Kelima, wilayah pembangunan perdagangan dan Keenam wilayah pembangunan pertambangan.

Keenam jenis tipologi tersebut bagi studi ini merupakan variabel-variabel penelitian yang utama. Untuk keperluan analisis, masing-masing tipologi itu dihubungkan lagi dengan unsur-unsur sosial budaya yaitu teknologi, kepercayaan dan agama, ekonomi dan organisasi sosial. Tabulasi silang antara variabel utama penelitian dan unsur so-

sial budaya tersebut menghasilkan suatu bentuk kerangka matriks indikator tentang ciri-ciri khusus suatu sub wilayah pembangunan. Indikator yang dipergunakan untuk masing-masing aspek berlaku/berkembang dalam masing-masing bidang/variabel penelitian menjadi berbentuk konsep-konsep inti sebanyak tiga buah. Berdasarkan konsep-konsep inti tersebut pertanyaan-pertanyaan dirumuskan, kemudian dipergunakan sebagai alat pengumpul data dalam studi lapangan. Dengan cara demikian data yang dikumpulkan meliputi 72 segi permasalahan karena matriks indikator yang dipergunakan berdemensi tiga, maka rumusannya menjadi $6 \times 4 \times 3$. Angka enam menunjukkan jumlah variabel penelitian, angka empat jumlah unsur sosial budaya, dan angka tiga jumlah indikator.

Konsep teknologi untuk bidang pertanian meliputi alat pengolahan tanah, bahan penyubur tanah dan sistim pengairan, sedangkan untuk bidang perternakan meliputi kandang, cara pengobatan, dan alat pemerah susu/penetas telur. Dalam bidang mata pencaharian hidup sebagai penangkap ikan, konsep teknologi dibatasi kepada alat penangkap ikan, perahu/boat, dan tambak. Teknologi dibidang industri meliputi mekanisasi, standardisasi, dan sistem kemas barang yang dihasilkan Teknologi bidang perdagangan meliputi tempat berjualan, sistem kredit dalam memperjual - belikan barang dagangan, dan kredit bank.

Akhirnya tambang terbuka, tambang dalam, serta alat eksplorasi dipergunakan sebagai indikator teknologi dalam bidang pertambangan.

Konsep agama dan kepercayaan yang berkenaan dengan pertanian meliputi kenduri turun ke sawah, upacara minta hujan, dan upacara menghindari hama, sedangkan yang berkenaan dengan peternakan meliputi tanda - tanda hewani, upacara penolak wabah, dan pemberian - pemberian tertentu dengan maksud supaya hewan piaraar itu dapat mendatangkan berkat, dan yang berkenaan dengan bidang perikanan terbatas kepada upacara sebelum/sesudah menangkap ikan, upacara pembuatan perahu dan pelepasannya, serta pengetahuan tentang saat - saat yang baik untuk turun ke laut. Selanjutnya konsep agama dan kepercayaan yang berkenaan dengan perindustrian meliputi upacara ketika akan memakai mesin/pabrik baru, upacara ketika pabrik menghasilkan untuk pertama kalinya, dan nasehat - nasehat yang dimintakan dari ulama atau dukun ketika hendak menentukan lokasi pabrik yang akan dibangun, sedangkan yang berkenaan dengan bidang perdagangan meliputi upacara ketika akan menempati kedai/

toko baru, hari-hari pantangan untuk memperjual belikan barang dagangan, dan upacara ketika mengadakan perhitungan rugi laba perusahaan.

Akhirnya konsep kepercayaan dan agama yang digunakan untuk bidang pertambangan, meliputi upacara ketika akan memulai penggalian bahan tambang, memintakan nasehat ulama atau dukun, dan ketika mendapatkan hasil galian yang pertama.

Unsur sosial budaya yang ketiga menyangkut segi - segi ekonomi. Indikator ekonomi untuk bidang pertanian yang dipergunakan dalam studi ini terbatas kepada jenis usaha tani dan sistim bagi hasil. Indikator yang hampir bersamaan dengan itu juga dipergunakan untuk bidang perternakan. Adapun indikator ekonomi di bidang perikanan meliputi pasar lelang ikan, tengkulak, dan buruh nelayan. Sementara itu indikator ekonomi untuk bidang perindustrian meliputi kerajinan tangan, industri kecil dan industri sedang. Selanjutnya untuk bidang perdagangan indikator ekonomi yang dipergunakan meliputi perdagangan ekspor, perdagangan impor, dan perdagangan perantara. Akhirnya untuk menunjukkan ciri-ciri khas aspek ekonomi dalam bidang pertambangan dipergunakan indikator bahan galian logam, bahan galian industri, dan sumber tenaga. BUUD/KUD, Bimas/Inmas adalah indikator organisasi sosial untuk bidang - bidang pertanian, perternakan dan perikanan.

Kecuali itu untuk bidang pertanian dipergunakan pula konsep-konsep gotong royong, bagi bidang pertanian ditambah dengan konsep kelompok gembala ternak, dan bidang perikanan menggunakan konsep HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia). Untuk bidang industri digunakan konsep organisasi sosial yang berwujud organisasi buruh, KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, dan koperasi hasil industri. Selanjutnya indikator organisasi sosial bidang perdagangan meliputi KADIN Indonesia, gabungan perusahaan nasional/daerah, dan organisasi perusahaan sejenis. Akhirnya indikator organisasi sosial di bidang pertambangan meliputi organisasi buruh pertambangan, organisasi pertambangan rakyat, dan koperasi pertambangan.

Berbagai indikator inti diatas, dari teknologi sampai dengan organisasi sosial diterjemahkan ke dalam konsep setempat dan menjadi butir/pertanyaan dalam pedoman wawancara. Dengan demikian walaupun rumusan pertanyaan untuk masing-masing daerah penelitian adalah sama, namun istilah kunci yang dipergunakan besar kemungkinan saling berbeda.

Dalam memilih konsep-konsep tertentu tersebut diusahakan dan lebih diutamakan adalah konsep yang umum dipergunakan dalam masing-masing bidang mata pencaharian hidup. Namun pemilihan konsep-konsep yang selaras itu mendapat kesulitan terutama untuk sektor-sektor yang modern, seperti konsep-konsep organisasi sosial. Karena disamping terbatasnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut, bentuk-bentuk organisasi sosial itu lebih beragam dan umumnya hanya terbatas perkembangannya di daerah-daerah perkotaan saja.

Ciri-ciri lingkungan budaya dalam masing-masing bidang mata pencaharian hidup sebagaimana diuraikan diatas akan dipakai pada delapan kecamatan yang tergabung dalam empat kabupaten di daerah Aceh. Data tersebut diatas dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara terpimpin dan pengamatan, serta dianalisis secara statistik, walaupun untuk taraf yang sangat elementer. Wawancara terpimpin dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan mengunjungi para responden ditempat mereka masing-masing, yaitu yang terdiri atas sejumlah kepala keluarga, pemuka masyarakat, dan pejabat setempat. Jawaban mereka ditulis pada daftar pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Pengamatan dilakukan dengan jalan mengamati keadaan lingkungan alami dan sosial budaya yang tampak. Dengan demikian apa yang diperoleh dari wawancara akan dapat lebih meyakinkan.

Penggunaan statistik untuk menganalisis data hasil penelitian lapangan umumnya terbatas pada perhitungan persentase dan nilai rata-rata (mean). Dengan menggubakan persentase, kecenderungan responden terhadap kategori-kategori jawaban tertentu (berupa indikator) akan lebih mudah dibedakan, berdasarkan jenis bidang mata pencaharian hidup mereka masing-masing. Perhitungan **mean** dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kecenderungan pemusatan hasil penelitian dalam setiap variabel yang diteliti. Hasilnya dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menentukan ciri-ciri khusus masing-masing daerah penelitian.

Pelaksanaan pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh suatu team yang terdiri atas enam orang pelaksana penelitian dari staf pengajar Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala, dan berlangsung selama bulan Ramadhan 1399 (Agustus 1979). Pemilihan waktu penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memudahkan mendapatkan responden karena diduga bahwa selama bulan Ramadhan terse-

but kebanyakan mereka berada di rumah, lebih-lebih menjelang lebaran Idul Fitri. Mengingat terbatasnya jumlah tenaga peneliti, maka penelitian lapangan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung dari tanggal 2 sampai 16 Agustus 1979, team peneliti melakukan pengumpulan data di daerah-daerah Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Timur. Tahap kedua berlangsung dari tanggal 31 Agustus sampai 10 September 1979, di dua kecamatan di Aceh Barat.

Secara garis besar keseluruhan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian melalui suatu lokakarya yang berlangsung di Cisarua Bogor sejak tanggal 10-18 Juni 1979.

Tahap kedua, penyusunan pedoman wawancara berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari lokakarya di Cisarua.

Selama bulan Juli 1979 disiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk pedoman wawancara yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok persoalan/indikator yang telah ditentukan untuk keperluan penelitian. Tahap ketiga adalah penelitian pendahuluan. Pada tahap ini mulai diusahakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan latar belakang permasalahan dan gambaran umum tentang aspek lingkungan budaya di masing-masing wilayah penelitian. Dalam hubungan ini telah didatangi Kantor Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Aceh dan Kantor Sensus Daerah Istimewa Aceh. Tahap keempat adalah uji coba penelitian. Pada tahap ini pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan itu dicobakan untuk mengetahui apakah segi verbalitasnya telah dimengerti sepenuhnya oleh responden, dan berapa lama tiap wawancara itu dapat berlangsung. Tahap kelima penyempurnaan pedoman wawancara berdasarkan bahan yang diperoleh pada uji coba penelitian. Pada tahap ini bahasa yang dipergunakan untuk setiap pertanyaan dalam pedoman wawancara disempurnakan. Jumlah pertanyaan ditambah/dikurangi sesuai dengan keperluan berdasarkan JUKLAK Geografi Budaya Daerah, setelah didiskusikan diantara sesama anggota pelaksana peneliti.

Tahap keenam adalah diskusi tentang prosedur penelitian yang sebaiknya ditempuh dan tahap ketujuh adalah pengumpulan data. Tahapan ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu penelitian yang berlangsung di Kabupaten - Kabupaten Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Timur, serta Kabupaten Aceh Barat.

Ada sebanyak 78 pertanyaan yang diajukan kepada responden, ketika penelitian lapangan berlangsung. Pada dasarnya pertanyaan itu dibedakan menjadi lima golongan, masing-masing mengenai

Peureulak (pesisir) dan Keujuran Muda (pedalaman), dan untuk Kabupaten Aceh Barat diambil Kecamatan Kuala (pesisir) serta Seunangan (pedalaman).

Kemudian dari masing-masing kecamatan yang dipilih itu ditetapkan satu atau dua **gampong**, dan dari sinilah dipilih empat puluh orang kepala keluarga dengan **sistimatik random sampling** (urutan nama kepala keluarga yang terdapat dalam register penduduk desa) sebagai responden. Jumlah seluruh responden adalah 320 orang yang terbagi jumlah sama untuk setiap lokasi penelitian, baik pesisir maupun pedalaman.

Dalam rangka analisis indentitas, keseluruhan responden dibedakan berdasarkan tingkat umur, jenis pendidikan, mata pencaharian hidup utama dan sambilan. Responden di daerah pesisir Pidie rata-rata berumur 43,5 tahun dan pedalaman rata 38,6 tahun, di Kabupaten Aceh Tengah rata-rata 43,2 tahun, di pesisir dan 35,8 tahun di pedalaman, di Aceh Timur rata-rata 48,8 tahun di pesisir dan 49,3 tahun di pedalaman; dan terakhir di Kabupaten Aceh Barat rata-rata 49,4 tahun di daerah pesisir dan 42,3 tahun di pedalaman (Tabel I.1).

Latar belakang pendidikan kebanyakan responden, berdasarkan jenis lembaga pendidikan yang pernah mereka tempuh adalah sekolah umum, dan ini tampak menonjol pada setiap daerah penelitian. Kecuali itu, responden yang berlatar belakang pendidikan madrasah tampak agak jelas, walaupun dalam presentase relatif rendah. Mereka ini terlihat terutama di daerah pesisir.

Responden yang tergolong buta huruf umumnya dijumpai di daerah Kabupaten Pidie, baik pesisir maupun pedalaman. Di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Timur tak seorang pun responden yang berasal dari pendidikan pesantren (Tabel I.2).

Walaupun Tabel I.2 menunjukkan angka yang cukup tinggi bagi mereka yang berlatar belakang pendidikan, namun jangka waktu pendidikan yang sempat mereka tempuh kebanyakan hanya 1 - 6 tahun, kira-kira setaraf pendidikan dasar. Yang agak menarik ialah bahwa di Kabupaten Pidie dijumpai responden yang pernah bersekolah 10 -12 tahun, setaraf pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Bahkan mereka yang pernah menempuh pendidikan pada tingkat perguruan tinggi juga dijumpai di daerah Kabupaten Pidie (Tabel I.3). Pada tabel tersebut terlihat juga jangka waktu rata-rata pendidikan, baik untuk responden pesisir maupun pedalaman.

identitas responden (6 pertanyaan), teknologi (18 pertanyaan), kepercayaan/agama (18 pertanyaan), ekonomi (18 pertanyaan), dan organisasi sosial (18 pertanyaan).

Tahap kedelapan adalah pentabulasian data. Pekerjaan ini dibedakan menjadi dua bagian : (1) jawaban masing-masing responden ditabulasikan ke dalam tabel tersendiri menurut daerah administrasi (Pidie, Aceh Tengah, Aceh Timur, dan Aceh Barat) dan lokasi geografis (pesisir atau pedalaman); dan (2), hasil tabulasi dari tahap pertama dimasukkan ke dalam matriks yang disusun atas dasar tipologi dan lokasi penelitian. Hasil tabulasi tersebut merupakan dasar untuk pekerjaan pada dua tahap terakhir yaitu tahap kesembilan dan kesepuluh. Tahap kesembilan adalah analisis hasil penelitian berdasarkan perhitungan statistik, dan tahap kesepuluh merupakan penyusunan laporan penelitian.

Keseluruhan laporan ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu pendahuluan, latar belakang lingkungan budaya, pembangunan wilayah, analisis karakteristik sub-sub wilayah pembangunan, serta kesimpulan dan saran. Masing-masing bagian tersebut terbagi lagi menjadi beberapa sub-bagian.

C. SUMBER DATA.

Penelitian ini tidak meliputi keseluruhan gampong (kampung) yang ada pada masing-masing wilayah kabupaten di daerah Aceh, tetapi hanya beberapa kampung saja yang dalam batas-batas tertentu dipandang dapat memenuhi maksud penelitian. Kampung-kampung yang terpilih merupakan sampel penelitian. Prosedure pengambilan sampel sebagai berikut. Pertama, berdasar kepada pertimbangan pembagian wilayah pembangunan di daerah Aceh, maka ditetapkan empat kabupaten sebagai pusat kegiatan penelitian, yaitu Kabupaten Pidie mewakili wilayah pembangunan IV, Kabupaten Aceh Tengah mewakili wilayah pembangunan III, Kabupaten Aceh Timur mewakili wilayah pembangunan I, dan Kabupaten Aceh Barat mewakili wilayah pembangunan II.

Dari tiap kabupaten yang telah dipilih itu, ditentukan dua kecamatan masing-masing memperlihatkan ciri-ciri wilayah pesisir dan pedalaman. Dalam hal ini untuk Kabupaten Pidie diambil kecamatan Simpang Tiga (pesisir) dan Mila (pedalaman) untuk kabupaten Aceh Tengah diambil Kecamatan Kota Takengon (pesisir), dan Silih Nara (pedalaman) untuk Kabupaten Aceh Timur diambil Kecamatan

Berdasarkan mata pencaharian hidup, prosentase tertinggi responden bekerja sebagai petani dan nelayan. Variasi dalam bidang mata pencaharian hidup tersebut terlihat jelas dikalangan responden Kabupaten Pidie, baik pesisir maupun pedalaman. Mungkin hal ini erat hubungannya dengan masa pendidikan yang mereka tempuh. Ini tampak pada bidang pekerjaan sebagai pegawai. Hal lain adalah bahwa hampir tidak ada dari mereka yang dijumpai di pedalaman sebagai pedagang (Tabel I.4). Padahal dari kalangan orang Pidie relatif banyak muncul pedagang-pedagang menengah dan eceran. Keganjilan ini mungkin karena adanya kecenderungan mereka pada masa-masa terakhir ini untuk menetap di daerah perantauan, tempat mereka menjalankan usaha dagangnya (Adnan Abdullah, 1978. hal. 43).

Data yang diperoleh dari keempat Kabupaten menunjukkan bahwa tidak banyak responden yang bermata pencaharian rangkap. Walaupun ada terbatas pada bidang pekerjaan pertanian saja, seperti berkebun, menangkap ikan, berternak, dan yang sejenis dengan itu. Hal ini dimungkinkan karena kebanyakan penduduk desa di daerah Aceh acapkali terlihat sangat santai dengan kegiatan-kegiatan pengisian waktu luang yang bersifat tidak produktif, seperti kebiasaan duduk-duduk bersama teman di *meunasah* (langgar) atau warung-warung kopi untuk mengobrol (Adnan Abdullah, 1978. hal. 41).

Sumber embaran (informasi) mengenai latar belakang geografi budaya dan istilah-istilah kunci untuk masing-masing bidang mata pencaharian hidup adalah 320 responden, dan 40 orang informan kunci yang telah ditentukan. Informan kunci itu pun berasal dari delapan kecamatan yang telah disebutkan diatas. Keseluruhan mereka itu terdiri atas tiga orang pejabat dan 2 orang tokoh masyarakat setempat.

Pokok-pokok wawancara dengan informan kunci meliputi identitas, nama kampung dan jumlah kepala keluarga dalam kampung, peta wilayah kecamatan, kenyataan tentang lingkungan alami, kenyataan tentang lingkungan sosial budaya, data statistik, teknologi yang dipergunakan, kepercayaan dan agama, cara-cara berekonomi, dan organisasi sosial yang berkembang di lokasi penelitian.

Tabel I.1

**RESPONDEN DIGOLONGKAN MENURUT UMUR DAN DAERAH
PENELITIAN TAHUN 1979 (%)**

Tingkat Umur	Pidie		Aceh Tengah		Aceh Timur		Aceh Barat		Total	
	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.
20-24	7,5	12,5	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	8,1
25-29	7,5	5,0	15,0	7,5	0,0	0,0	0,0	5,0	5,6	4,4
30-34	7,5	15,0	12,5	7,5	0,0	0,0	0,0	20,0	5,0	10,6
35-39	17,5	25,0	12,5	30,0	5,0	5,0	7,5	15,0	10,6	18,8
40-44	12,5	15,0	7,5	20,0	15,0	12,5	15,0	20,0	12,5	16,9
45-49	7,5	15,0	7,5	7,5	32,5	32,5	25,0	15,0	18,2	18,1
50-54	7,5	0,0	12,5	7,5	35,0	35,0	27,5	15,0	20,6	12,5
55 keatas	32,5	12,5	27,5	0,0	12,5	12,5	25,0	10,0	24,4	10,6
Total N	40	40	40	40	40	40	40	40	160	160
Mean	43,5	38,6	43,2	35,8	48,8	49,3	49,4	42,3	46,1	41,8

Pes. : Pesisir

Ped. : Pedalaman

Tabel I.2

**RESPONDEN DIGOLONGKAN MENURUT LATAR BELAKANG
PENDIDIKAN DAN DAERAH PENELITIAN,TAHUN 1979 (%)**

Jenis Pen- didikan	Pidie		Aceh Tengah		Aceh Timur		Aceh Barat		Total	
	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.
Buta huruf	20,0	17,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	12,0	5,0	9,1
Sekolah	67,5	70,0	65,0	85,0	87,5	92,5	65,0	65,0	71,3	78,1
Madrasah	12,5	5,0	35,0	7,5	12,5	7,5	15,0	15,0	18,7	8,8
Pesantren	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	7,5	5,0	3,8
Total N	40	40	40	40	40	40	40	40	1404	160

Tabel I.3

RESPONDEN DIGOLONGKAN MENURUT JANGKA WAKTU PENDIDIKAN
DAN DAERAH PENELITIAN, TAHUN 1979 (%).

Masa Pen- didikan	Pidie		Aceh Tengah		Aceh Timur		Aceh Barat		Total	
	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.
Buta huruf	20,0	17,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	12,5	5,0	9,3
1 - 6 th	32,5	50,0	55,0	75,0	92,5	95,0	92,5	55,0	68,1	68,8
7 - 9 th	12,5	7,5	25,0	17,5	7,5	5,0	7,5	25,0	13,1	6,9
10 - 12 th	20,0	20,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	8,1	1,2
13 - 17 th	15,0	5,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
Total N	40	40	40	40	40	40	40	40	160	160
Mean	6,2	5,3	6,4	4,0	4,7	3,7	3,8	4,8	5,2	4,5

Tabel I.4

RESPONDEN DIGOLONGKAN MENURUT MATA PENCAHARIAN
RESPONDEN DAN DAERAH PENELITIAN, TAHUN 1979 (%).

Mata Pen- caharian	Pidie		Aceh Tengah		Aceh Timur		Aceh Barat		Total	
	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.
Tani/Ternak	32,5	60,0	70,0	100,0	72,5	72,5	87,5	87,5	65,7	80,0
Nelayan										
Pedagang	17,5	0,0	5,0	0,0	20,0	2,5	0,0	0,0	10,6	0,6
Pegawai	40,0	40,0	20,0	0,0	7,5	12,5	7,5	7,5	18,8	15,0
Buruh dll	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	12,5	5,0	5,0	5,0	4,4
Total N	40	40	40	40	40	40	40	40	160	160

Tabel I.5

**RESPONDEN DIGOLONGKAN MENURUT MATA PENCAHARIAN
SAMBILAN DAN DAERAH PENELITIAN, TAHUN 1979 (%).**

Mata Pen- caharian	Pidie		Aceh Tengah		Aceh Timur		Aceh Barat		Total	
	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.	Pes.	Ped.
Tani/Ternak	57,5	37,5	20,0	0,0	15,0	25,0	50,0	7,5	35,6	17,5
Nelayan										
Pedagang	7,5	0,0	5,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,3
Pegawai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buruh dll	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	5,0	6,9	1,3
Tak ada	30,0	62,5	75,0	95,0	65,0	75,0	27,5	87,5	49,4	80,0
Total N	40	40	40	40	40	40	40	40	160	160

BAB II

LATAR BELAKANG LINGKUNGAN BUDAYA

A. LINGKUNGAN ALAMI.

Uraian lingkungan alami meliputi beberapa aspek saja. Kriteria menurut Idenburg (Kampto Utomo, 1975; hal. 4) bentang alam Aceh dapat dikelompokkan menjadi daerah dataran, daerah berbukit, dan daerah pegunungan. Masing-masing wilayah fisiografi tersebut dapat dibedakan menjadi tanah kering, tanah becek dan tanah payau. Kesemuanya bergantung kepada volume udara dan air yang terkandung didalamnya. Dilihat dari sudut geologi, tanah dapat dibedakan ada tanah residuer, tanah sedimenter, dan tanah campuran. Tapi, terminologi jenis dan tipe tanah umumnya disusun berdasarkan warna, bahan induk tekstur derajat penghancuran iklim, dan tebalnya profil. Kesemuanya ini erat berkaitan dengan aneka ragam formasi geologi sesuatu daerah. Oleh sebab itu penyebaran formasi - formasi geologi dipeta geologi merupakan petunjuk penyebaran jenis dan tipe tanah.

Menurut Klompe, keseluruhan daratan Aceh dapat dibagi menjadi tujuh formasi yaitu aluvial, plio-pleistosen, neogen, paleogen, permokarbon, **acid plutonic** dan **young andesitic vulcanic cane** (Peta II.1). Formasi aluvial terdapat di hampir semua pesisir barat, timur, dan utara daerah Aceh. Formasi plio-pleistosen terdapat di Pulau Banyak dan Simeulu. Formasi neogen kebanyakan terdapat di bagian timur, barat dan selatan daerah Aceh (daerah - daerah transisi antara daratan dan pegunungan di pedalaman). Formasi paleogen umumnya terbentuk bersebelahan dengan formasi neogen yakni di bagian utara dan timur laut Lembah Aceh, serta Barisan Gayo. Formasi permokarbon terdapat merata di sepanjang Bukit Barisan, kecuali pada bagian-bagian tertentu diisi oleh formasi **acid plutonic** dan **young andesitic vulcanic cone** yang ada kaitannya dengan vulkanisme (Peta II.2).

Dengan kriteria tersebut, jenis tanah di daerah Aceh dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Tanah dataran terdiri dari organosol/glei humus, aluvial, hidromorf kelabu, regosol, podsolik merah kuning, dan rensina. Tanah organosol dan glei humus yang bahan induknya aluvial terdapat disekitar Meulaboh (Aceh Barat), Singkil (Aceh Selatan), Lhoksukon (Aceh Utara) dan Kualasimpang (Aceh Timur). Sedangkan tanah aluvial terdapat di sepanjang aliran sungai Simpang

Kiri (antara Kutacane dan Blangkejeran). Tanah organosol dan aluvial tersebut banyak mengandung air sehingga terjadi rawa - rawa.

Hidromorf kelabu, yang bahan induknya aluvial terdapat di daerah Kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Hulu Krueng Aceh. Letaknya berdampingan dengan tanah aluvial. Sedang jenis tanah lain yang bahan induknya aluvial adalah regosol, litosol, dan podsolik merah kuning. Tanah regosol terdapat di sepanjang tepi pantai barat dan timur. Tanah litosol dan podsolik merah kuning terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Tanah regosol dan podsolik merah - kuning itu tergolong jenis tanah yang terbesar bentangannya. Jenis tanah yang bahan induknya batu endapan dibedakan antara podsolik merah kuning dan rensina. Tanah podsolik merah - kuning terdapat di Seulimeum (Aceh Besar), Bireuen (Aceh Utara), dan Kuala Simpang (Aceh Timur). Kecuali itu terdapat pula di Aceh Besar dan perbatasan Aceh Barat (dari Uleelheue sampai ke kaki Gunung Geurutee). Tanah resina banyak terdapat di daerah Kabupaten Pidie.

Pada daerah perbukitan dan pegunungan terdapat jenis - jenis tanah, seperti regosol, andosol, latosol, podsolik merah kuning, podsolik merah - kuning/litosol, dan rensina/litosol. Tanah regosol dan andosol yang bahan induknya batuan beku banyak terdapat disekitar gunung berapi seperti di lereng - lereng Gunung Lauser, Peuet Sagoe, dan Geureudong. Sedangkan latosol yang juga bahan induknya batuan beku banyak terdapat di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Utara, Pidie, Aceh Besar dan Pulau We.

Podsolik merah - kuning yang bahan induknya batuan beku dan batuan endapan banyak terdapat di pegunungan lipatan Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Pada tempat-tempat tertentu di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Selatan (yaitu bagian - bagian yang mengalami intrusi magma), juga terdapat jenis tanah podsolik merah - kuning dan litosol dengan bahan induknya batuan beku.

Kompleks podsolik merah - kuning/latosol/litosol tersebar pada daerah pegunungan patahan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Pulau Breueh, dan Pulau Peunasoe (Aceh Besar). Bahan induknya kompleks jenis tanah tersebut adalah batuan beku, batuan endapan, dan batuan metamorf. Dari bahan induk yang sama pula, kompleks podsolik coklat/podsol/litosol terdapat menyebar hampir diseluruh daerah Aceh, lebih - lebih di sepanjang Bukit Barisan. Sedangkan penyebaran kompleks rensina/litosol yang bahan induknya batu endapan hanya terbatas pada dataran

tinggi Takengon dan Pegunungan Aceh Raya di Kabupaten Aceh Besar (Peta II.3 dan Peta II.4).

Untuk mengetahui batuan induk dan fisiografinya perlu dipergunakan sketsa fisiografi daerah Aceh (Peta II.4). Melalui sketsa ini dapat diketahui letak dataran rendah, bukit dan pegunungan. Pegunungan bongkahan (rift - block mountain) terdiri atas Pegunungan Aceh Raya, Pasai, Sentral Gayo, Gayo, Alas, Gayo Lues, dan Louser. Zone depresi (graben) mencakup lembah Renuin, Lembah Alas, Basin Blangkejeran, Basin Gayo Deret, Lembah Aceh, dan Lembah Takengon. Kompleks gunung api muda meliputi Sinabun, Sibayak, Barisan Gayo, Ucep Mulu, Geureudong, Burni Telong, Deuet Sagoe, dan Seulawah. Adapun ambang dataran rendah terdapat di Meulaboh dan Singkel.

Jajaran wilayah pegunungan di Aceh dibedakan menjadi empat bagian, yaitu pegunungan bagian utara, bagian tengah, dekat pantai sebelah barat dan yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Sumatera Utara (Universitas Syiah Kuala, 1972 hal.38 - 39). Puncak tertinggi di bagian utara adalah Gunung Seulawah Agam (1.806m). Di bagian tengah terdapat tiga gunung yang cukup tinggi yaitu Gunung Peuet Sagoe (2780m), Gunung Geureudang/Burni Telong (2.590m) dan Gunung Abong - Abong (2.985m). Di daerah pantai sebelah barat menjulang gunung tertinggi di Aceh yaitu Gunung Louser (4.446m). Dekat perbatasan wilayah Sumatera Utara terdapat Gunung Ucep Mulu (3.079 m). dan Gunung Bendahara (3.079 m).

Kecuali itu masih terdapat beberapa gunung yang lain seperti: Talang, Rajawali, Burni, Bruang Malem, Bruni Klieten dan Kulem Nawa (Aceh Tengah); Panyang, Ujeung, Karang dan Batee Teumbon (Aceh Utara); Tuan, Kerambi, Batu Girah, Batu Itam, dan Tangga Besi (Aceh Selatan); Inong, Singgah Mata dan Lokor (Pidie); Geuratee Tanpeue, Kuala, Keuramat, dan Mata Ie (Aceh Barat); serta Parkison, Kemiri, Panjipanji, Lianggara dan Tinjo Laot (Aceh Tengah). Hanya Gunung Seulawah Agam Burni Telong termasuk gunung berapi yang masih aktif (Universitas Syiah Kuala, 1972. hal. 38-40).

Dalam wilayah Aceh terdapat 119 pulau. Di sebelah timur dan utara berbatasan dengan Selat Sumatera, di sebelah barat dengan Samudera Indonesia, dan di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Propinsi Sumatera Utara. Tiga Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, empat Kabupaten berbatasan langsung dengan Selat Sumatera, tiga Kabupaten berbatasan dengan wilayah Propinsi Sumatera Utara, yang bagian tengah wilayah Aceh adalah

Kabupaten Aceh Tengah.

Tanah pada bagian terlebar daratan Aceh 200 km, panjang pantai timur kira-kira 350 km, dan panjang pantai barat lebih kurang 500 km. Keseluruhan wilayah Aceh terletak antara $2^0 - 6^0$ LU dan $95^0 - 98^0$ BT.

Ketinggian rata-rata daratan Aceh diperkirakan 125 m di atas permukaan laut. Ketinggian beberapa kota di Aceh adalah sebagai berikut: Takengon (1.205 m), Isak (950 m), Balangkejeran (840 m), Tangse dan Geumpang (masing-masing 450 m), Kutacane (370 m), Seulimeum (60 m), Lhoksukon (25 m), Indrapuri (20 m), Padangtiji (15 m), Peureulak (7 m), Lamno (6 m), Sinabang (4 m) dan Blangpidie (3 m). Sedangkan ketinggian beberapa tempat yang lain seperti Sigli, Tapaktuan, Bireuen, Calang, Panton labu, Idi, dan Singkel diperkirakan sama dengan permukaan laut (Kantor Sensus & Statistik, 1977 hal. 1).

Berdasarkan letak geografi dan lingkungan alami, wilayah Aceh dapat digolongkan ke dalam daerah iklim tropis, dengan banyak hujan dan tingkat kelembaban tinggi. Curah hujan rata-rata bulanan 179 mm, rata-rata hari hujan bulanan 9 hari. Curah hujan cukup tinggi (2500 sampai 3000 mm) disepanjang pantai barat dan selatan dan agak kurang (1000 - 1500 mm) di pantai utara (Hasan Basri, *et.al*, 1978 hal. 1). Temperatur udara berkisar antara $26^0 - 30^0$. Di tempat yang tinggi seperti Takengon suhu udara sekitar $15^0 - 23^0$. (DPRD. Kabat, 1974. hal. 7). Kelembaban nisbi rata-rata 77,6 %. Bulan yang paling lembab 93 % adalah Desember dan paling kering 62,7 % adalah Pebruari (Tabel II. 4).

Beberapa diantara sungai itu ialah Krueng Jambo, Aye dan Arakundo, Krueng Peureulak, Krueng Tamiang, dan Krueng Bayeuen. (Aceh Timur); Peusangan, Karip, Gerpa, dan Lumut (Aceh Tengah); Krueng Samalanga, Krueng Jeunib, Krueng Peudada, Krueng Beureuen dan Krueng Keureuto (Aceh Utara); Susoh, Sawang, Samadua, Kandang, dan Singkel (Aceh Selatan); Krueng Meureude, Krueng Triteng Gadeng, Krueng Pante Raja, Krueng Teupin Raya, Krueng Geulumpang Minyok, Krueng Baro, dan Krueng Batee (Pidie); Krueng Teunon, Krueng Woyla, Krueng Suak Seumaseh, Krueng Meureubo, Krueng Teuripa, dan Krueng Seunagan (Aceh Barat) serta Lawe Alas, Lawe Bulan, Lawe Mas, dan Lawe Sempilang (Aceh Tenggara); Krueng Aceh, Krueng Seulimeum, Krueng Raya di Aceh Besar (Universitas Syiah Kuala, 1972. hal. 36-38). Setidak

tidaknya muara-muara sungai tersebut dapat dilayari. Penduduk setempat juga menangkap ikan disungai-sungai itu.

Disamping sungai, badan air yang penting juga adalah danau dan rawa. Danau terpenting di Aceh ialah Danau Luot Tawar (Aceh Tengah). Rawa luas terbentang di pesisir Aceh Timur dan Aceh Selatan. Dalam lingkungan alami tersebut diatas terkandung sejumlah sumber daya alam, seperti bahan mineral, kayu, ikan dan binatang hutan. Namun sebagian besar sumber daya alam itu masih dalam keadaan potensial. Berbagai penelitian tentang sumber daya alam ini pernah dilakukan. Dalam hal mineral tercatat beberapa nama ataupun lembaga peneliti seperti : Dr. Zwierzicky, Hoviq Jansen, Lindberg dan Wolvenkamp, RW van der Marel, de Groot Marsman's Algemeine Exploitation Maatschappij, Wallen & Guilormune Pma & Richard, Grotier de Longh, Hoogenraad, Diend v/d Mij Bornw BPM, NKPM, PT Serba Tambang san Lumanau, Direktorat Geologi, dan Dyekenhoff Zemenwerke AG Weis Baden (Universitas Syiah Kuala, 1972, hal 212-216).

Bahan mineral yang ditemukan pada dasarnya dapat digolongkan atas mineral sumber tenaga, logam, dan bahan galian industri. Bahan mineral sumber tenaga meliputi batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan mineral logam antara lain ialah besi, timah, seng, mangan, emas, aluminium dan tembaga. Bahan galian industri adalah kapur, belerang, posfat, tras, batu gunung, mika, marmer, grafit, kuarsa, batutalk dan gips.

Bahan marmer terdapat di Pulau Banyak dan didekat Danau Laut Tawar (Aceh Tengah). Bahan mineral grafit, batu kuarsa, batu talk, dan firit terdapat di Aceh Tengah. Sedangkan aliminum dan gibs masing-masing terdapat di Aceh Selatan dan Pante Raja (Pidie).

Lokasi batu bara di daerah Aceh terdapat di Ayer Jambu Batang, Sungai Pendeng Wihni Oreng, Ayer Baturang, Krueng Kluet, bagian Selatan Tapaktuan, bagian barat laut Krueng Teunom, Krueng Raya, Krueng Ancong bagian Timur Peureulak Meue, dekat Simpangpeuet, sebelah tenggara Krueng Beukah, Krueng Lawit, dan Krueng Peunagahan. Endapan batubara muda (brown coal) yang terdapat di bagian tenggara Krueng Beukah, sedangkan di Krueng Peunagahan berbentuk bitumenous. Keadaan endapan batu-bara yang terdapat di sebelah timur laut Peureulak Meue adalah merupakan lapisan Shale berselang-seling dengan coal, dan yang terdapat di Krueng Lawit merupakan lapisan-lapisan yang berselang seling dengan shale yang sangat kotor. Endapan batubara ditempat-tempat lain yang disebutkan diatas,

umumnya bervariasi dari lapisan yang sangat tipis sampai kepada dua atau lima lapisan. Umumnya berbagai lokasi dan endapan batu bara yang terdapat di daerah Aceh itu diketahui dari hasil penelitian Dr. Zwierzicky (Universitas Syiah Kuala, 1972. hal. 212-213).

Minyak bumi terutama terdapat di Alue Meneuk, daerah aliran sungai Peureulak, Krueng Simpang dan Alue Maoeng, Alue Meurante, bagian atas aliran Alue Minyeuk Tanah, Meurante Sunsang, antiklinal, Krueng Simpang Langsa, dan antiklinal Pengidangan. Lokasi-lokasi sumber minyak bumi tersebut merupakan hasil penelitian dari Dient V/D Mij Bouw BPM-NKPM (Universitas Syiah Kuala, 1972. hal. 216). Sedangkan sumber gas alam terdapat di Aron (Aceh Utara) dan kini sudah mulai diusahakan oleh Mobil Oil Indonesia dan Pertanian.

Biji besi yang terdapat di Krueng Linggan adalah pirolusit dan pirit dalam ukuran panjang 700 m dan tebal 8-17m. Biji besi di Kuala Batee dan Cot Plui berupa fragmen berpasir kung kemerah-merahan, dan sebanding magnetiferous.

Biji besi Cot Seumeureung, Cot Meuseugit, Cot Regan, Cot Darat, dan Cot Mane merupakan swarp orfs yang terdapat pada keluasan 2 km sampai 4 km dan jumlah persediaannya sampai 400.000 ton. Hasil analisis geologi mengenai penemuan Bijih besi di kelima lokasi ini mengandung 54,6% Fe, 0,16 % P. Bijih besi yang terdapat ditempat-tempat lain ada yang berupa gumpalan magnetik dengan pirit (Krueng Geunteut), fragmen magnetik (Gke Mon Peuet), fragmen bijih besi (Krueng Rigaih di Tapaktuan), gumpalan magnetik diatas kapur (Pantonlawas). Penelitian sumber bijih besi di Aceh adalah Jansen Lindberg dan Wolvekamp (Universitas Syiah Kuala 1972. hal. 213). Jansen Lindberg dan Wolvekamp juga menyelidiki tanah hitam dan seng.

Timah hitam dan seng yang terdapat di Krueng Beureung berupa bolders dengan galena, di Krueng Isep berupa empat galena veins (urat) galena setebal 10 sampai 20 cm.

Bijih besi di Lhok Kruet sedikit sekali, dan mengandung bijih besi. Sedangkan mangan yang terdapat dipantai timur Aceh mengandung iron concretions (Universitas Syiah Kuala 1972. hal. 214).

Mineral emas yang berada di Krueng Teumon, Ladang Geupoh, Krueng Woyla, dan Krueng Seunagan. Penelitiannya ialah Jansen Lindberg dan Wolvekamp, de Groot Marman'Alg-Expl. Mij Wallon, Gulo-mune Peura, dan Richard (Universitas Syiah 1972. hal. 215).

Berdasarkan penelitian Grotier de Longh, tembaga yang terdapat di Pulau Beras berupa malachite and natie. Sementara itu tembaga di

Krueng Kala mengandung quartervein 0,3 % Cu. Penelitian tembaga di kedua tempat itu ialah Hoogenraad. Tembaga yang terdapat di Ayer Talu dan Beutong berupa native copper. Penelitiannya ialah Delongh Jansen Lindberg dan Wolvekamp.

Berdasarkan penelitian Dr. Zwierzicky, endapan kapur di Aceh berasal dari permokarbon, paleosen dan meosen. Molibdens di Burni Agusen Gayo Luer yang diteliti oleh Jansen Lindberg dan Wolvekamp terdapat dalam kristal-kristal batuan kapur, sedangkan di Wihni Tripa berbentuk urat kuarts. Bahan semen berdasarkan penelitian PT Serba Tambang Tunggal dan Lumanow di Jakarta, terdapat dalam bentuk batu gamping serpih/sabak dan batu pasir kuarsa di Lhonga, Glee Geunteng, dan Kedebieng. Selanjutnya, lembaga ini pula menemukan belerang di Gunung Seulaoah (Aceh Besar) dan Burni Telong (Aceh Tengah), posfat di Gunung Seulawah Agam dan Glee Geunteng, batu gunung di lamne, serta mika di Uring dan Pinding (Aceh Tenggara).

Kayu merupakan hasil hutan terpenting di daerah Aceh. Kawasan hutan meliputi 74,6 % wilayah Aceh. Dari kawasan seluas itu direncanakan untuk cagar alam suaka margasatwa 10,58 %, hutan lindung 20,58 % dan konversi untuk pertanian/perkebunan 27,18%. Sisanya masih merupakan hutan termasuk hutan tanaman, yaitu vegetasi hutan pinus tanaman 554,90 ha, hutan pinus alam 149.250,00 ha, hutan payau alam 54.345,00 ha, dan hutan rimba campuran 1.517.105 ha (Kantor sensus dan statistik DI Aceh 1977. hal. 6). Jenis kayu penting di daerah Aceh antara lain adalah kayu meurante, seumantok, cengal, bayur, medang, damar dan pinus (Universitas Syiah Kuala 1972. hal. 48).

Luas wilayah perairan Aceh, lebih kurang 56.563 km² terdiri atas perairan umum 47.400 km², laut teritorial 23.563 km² dan perairan laut pedalaman 32.818 km². Dari luas areal perairan itu terdapat areal budidaya perikanan sebanyak 17.677 ha, terdiri atas sawah 687 ha, kolam 368 ha, dan tambak 16.622 ha (Hasan Basry, et al, 1978. hal. 141). Hasil perikanan laut selama tahun 1977 dari masing-masing kabupaten, adalah Pidie 6.102,48 ton, Aceh Utara 7.181 ton, Aceh Timur 8.330,50 ha, Aceh Besar 11.997,80 ton, Sabang 1.008,50 ton, Aceh Barat 4.121,45 ton, dan Aceh Selatan 3.713,84 ton. Jenis ikan laut yang terdapat di daerah Aceh antara lain ialah ikan lidah, nomei, petek/peperek, manyung bambangan, kerapu, kakap, ekor kuning, tiga gajah/gulamah, cucut, pari, bawal, alu-alu, layang, selar, kuweh, ikan terbang, belanak, kuro/semangin,

, alu-alu, layang, selar, kuweh, ikan terbang, belanak, kuro/semangin, julung-julung, teri tembang, lamuru, kembung, tenggiri, layur, caka-lang, tongkol dan udang (Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, 1977. hal. 394-385). Perikanan darat (tambak) umumnya diusahakan di daerah Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Besar.

B. TATA GUNA TANAH.

Salah satu pola penggunaan tanah adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Hans Roesch (1964 hal. 38-39), walaupun pendapatnya itu hanya berlaku bagi negara-negara yang beriklim sedang, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dalam hal ini Roesch membedakan tata guna tanah kedalam sembilan kategori yaitu (1) tanah untuk bangunan (2) tanah untuk hortikultura, (3) tanah yang ditumbuhi pepohonan dan tanaman keras lainnya, (4) tanah garapan (kontinyu dan rotasi) (5) padang rumput asli (dimanfaatkan maupun yang tidak) (6) padang rumput yang dibiakkan (7) tanah hutan (hutan lebat, hutan terbuka, semak belukar, dan hutan rawa, bekas hutan yang sudah ditebang atau dibakar, dan hutan dengan tanaman terbatas) (8) tanah rawa, dan (9) tanah yang tidak menghasilkan.

Pola tata guna tanah yang digunakan di Aceh terdiri atas tanah untuk perkampungan, sawah, perkebunan besar, perkebunan rakyat, pertanian tanah kering, hutan, tanah rusak/tandus, tambak ikan, rawa-rawa, padang rumput/alang-alang, padang penggembalaan dan hutan muda, tempat penggaraman, serta danau.

Sub. Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Aceh pernah melakukan pemetaan penggunaan tanah berdasarkan pengukuran planimetris. Unsur ketinggian sesesuai konsepsi wilayah tanah usaha dari Direktorat Tata Guna Tanah dimasukkan pula dalam peta itu. Kelas ketinggian medan adalah 0 – 10 m, 10 – 25 m, 25 – 500 m, 500 – 1000 m, dan lebih dari 1.000 m diatas permukaan laut. Namun pemetaan yang sudah selesai dikerjakan baru meliputi enam wilayah kabupaten, yaitu Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Barat (Tabel II.5)

Berdasarkan sumber lain, wilayah Aceh yang luasnya seluas 5.539.000 ha itu 1 % sudah didiami penduduk kota dan kampung (Tabel II.6).

Desa itu pun sebetulnya masih beraneka ragam tingkat perkembangannya (Tabel II.7). Bagian terbesar desa-desa itu masih berada pada tingkatan swadaya. Desa swasembada baru 167 buah dari 5.462

desa yang telah diakui di Aceh. Lebih dari separuh desa swasembada itu berada di wilayah pembangunan II. Tingkat perkembangan desa di wilayah pembangunan III. relatif rendah, walaupun sumber daya potensialnya boleh dikatakan tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah pembangunan lainnya.

Tanah yang sudah diusahakan sebagai tanah pertanian (perkebunan besar, perkebunan rakyat, dan perikanan darat) kira-kira 10 %. Hasilnya adalah padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele dan kacang hijau. Daerah penghasil jagung antara lain adalah Aceh Timur dan Aceh Utara. Penghasil ketela pohon adalah daerah-daerah Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Selatan. Ketela rambat banyak ditanam di daerah Aceh Tenggara dan Aceh Timur. Kacang tanah umumnya ditanam di daerah Aceh Selatan dan Pidie. Penghasil kacang kedele terpenting adalah Pidie, Aceh Timur dan Aceh Utara. Sedangkan kacang hijau umumnya ditanam di daerah Aceh Timur, Aceh Tenggara, dan Aceh Utara (Tabel II.8). Luas tanah yang dapat ditanami padi dan jenis-jenis tanaman lainnya itu rata-rata 0,3 ha per kapita (Ibrahim Hasan, 1979 hal.5).

Hasil perkebunan terpenting daerah Aceh, baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat adalah karet, kelapa sawit, kelapa kopi, cengkeh, pala, pinang, pinus, randu, lada, tebu, tembakau, dan nilam. Daerah penghasil karet terpenting adalah Aceh Timur, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat. Kelapa sawit umumnya ditanam di daerah Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Utara. Daerah penghasil kelapa terpenting adalah Aceh Utara, Aceh Selatan dan Aceh Barat. Daerah penghasil kopi adalah Aceh Tengah, Pidie, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat. Adapun Kabupaten Aceh Barat tergolong sebagai penghasil cengkeh terpenting di Aceh. Tanaman tebu umumnya di Aceh Utara dan Aceh Tengah. Tembakau umumnya di tanam di Aceh Tengah, dan nilam ditanam di daerah Aceh Selatan dan Aceh Barat (Tabel II.9).

C. LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA.

Ruang lingkup unsur-unsur sosial budaya yang hendak dikemukakan ini umumnya dibatasi kepada latar belakang kependudukan, pendidikan dan teknologi. Latar belakang kependudukan meliputi uraian tentang jumlah dan perkembangan penduduk serta penyebaran komposisinya berdasarkan bidang kegiatan hidup. Deskripsi

mengenai berbagai unsur sosial budaya ini akan diperlihatkan berdasarkan masing-masing wilayah kabupaten.

Dengan demikian gambaran tentang lingkungan sosial budaya masing-masing wilayah pembangunan akan menjadi lebih jelas.

Berdasarkan sensus tahun 1961, penduduk daerah Aceh berjumlah 1.628.892 orang. Sepuluh tahun kemudian (1971) jumlah penduduk menjadi 2.008.747 orang. Jadi angka pertumbuhan rata-rata penduduk 2,3 % per tahun, kepadatan pada tahun 1971 adalah 36/km persegi. Untuk itu dapat diperkirakan bahwa pada tahun 1978 daerah Aceh yang meliputi wilayah seluas 55.390 km², dihuni oleh 2.355.346 orang penduduk (Tabel II.10). Ini berarti bahwa rata-rata untuk setiap kilometer persegi didiami 42,5 jiwa.

Dengan demikian hasil sensus tahun 1971 menggolongkan Aceh sebagai daerah yang jarang penduduknya. Bandingkan dengan kepadatan penduduk rata-rata per km persegi di Sumatera Utara (93 orang), Pulau Jawa (362 orang), dan Indonesia (66 orang). Proporsi penduduk Aceh hanya 1,5 % sedangkan proporsi wilayahnya 3 % dari keseluruhan Indonesia (Ibrahim Hasan, 1979, hal. 4-5).

Bagian terbesar (84,65 %) daratan Aceh masih merupakan kawasan hutan, tanah rawa-rawa, padang rumput/alang-alang, danau dan sungai. Jadi kalau dilihat kepada kesempatan dibidang agraris saja, tingkat kepadatan penduduk rata-rata per km² mencapai 266,2 orang dan lima tahun mendatang diperkirakan akan meningkat menjadi 298,2 orang.

Kecuali Banda Aceh, kabupaten yang tergolong relatif besar kepadatan agrarisnya adalah Aceh Selatan (498/km²), Aceh besar (429/km²), Pidie (373/km²) dan Aceh Utara (365/km²). Sebaliknya, Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Barat, tergolong jarang penduduknya yaitu masing-masing 64 dan 129 orang rata-rata per kilometer persegi. Adapun keadaan kepadatan penduduk di kotamadya Sabang dan Kabupaten Aceh Tenggara masih sulit untuk bisa diketahui secara pasti, karena data yang ada untuk kedua daerah tersebut hanya menunjukkan keadaan kepadatan rata - rata berdasarkan luas geografisnya, yaitu masing-masing 98 dan 13 orang per kilometer persegi (Tabel II.11).

Penyebaran penduduk di Daerah Istimewa Aceh tidak merata. Pada umumnya penduduk itu lebih terpusatkan pada wilayah-wilayah yang sudah terbuka walaupun potensi sumber dayanya relatif rendah.

Lebih kurang dua pertiga penduduk bermukim pada dataran sepan-

jang pantai utara dan timur. Kepadatan penduduknya mencapai 200 - 300 orang / km².

Sedangkan lainnya mendiami wilayah pantai barat dan selatan, serta pedalaman Aceh bagian tengah dan tenggara (Ibrahim Hasan , 1979, hal. 5; (Hariri Hadi, 1972. hal. 24). Padahal keempat wilayah yang terakhir disebutkan itu lebih luas, dan potensial sumber daya alamnya relatif tinggi.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pantai barat dan selatan merupakan bagian-bagian dari wilayah Aceh yang tergolong sepi. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa wilayah pantai barat dan selatan relatif kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah-wilayah dipantai utara dan timur antara jumlah penduduk dan luas daerah yang didiami terlalu rendah sehingga dapat menyebabkan keterbelakangan sesuatu wilayah (Vinar, 1970 hal. 9).

Sensus tahun 1971 memperlihatkan 91,56 % penduduk wilayah Aceh bermukim di pedesaan, dan yang selebihnya (8,44 %) bertempat tinggal dikota. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, 33,26 % merupakan golongan penduduk berusia dibawah 10 tahun, dan 66,74 % terdiri atas mereka yang berusia 10 tahun ke atas. Apabila dilihat dari status pekerjaannya, 48,1 % penduduk yang berusia 10 tahun keatas tergolong sebagai angkatan kerja, yang terbagi atas 42,95 % merupakan mereka yang bekerja, dan 5,12 % termasuk mereka yang mencari kerja. Diantara mereka yang tergolong sebagai angkatan kerja, 74,66 % merupakan angkatan kerja dalam bidang pertanian (Castles and Alfian, 1975. hal. 5). Yang bekerja pada bidang perdagangan, hotel dan restaurant 6,31 %. Pada sektor jasa-jasa kemasyarakatan dan pekerja pribadi, terdapat 7,49 %. Di sektor industri pengolahan terdapat 3,35 % penduduk. Selebihnya, 1,21 %, bermata pencaharian hidup dibidang angkutan, pengairan, dan komunikasi, 0,82 % bersumber penghasilan pada sektor bangunan, 0,31 % pada pertambangan dan galian, 0,11 % pada sektor keuangan dan asuransi serta 0,06 % pada sektor listrik, gas dan air. Yang bermata pencaharian hidup pada berbagai jenis pekerjaan lainnya lagi diperkirakan tidak kurang dari 5,68 % (Hasan Basry, 1978. hal. 2-3).

Dengan begitu dapatlah dikatakan bahwa bidang pertanian merupakan sumber mata pencaharian hidup berpokok dari sebagian besar penduduk di daerah Aceh. Di samping itu sektor jasa-jasa kemasyarakatan dan perdagangan masih tergolong penting pula artinya. Namun demikian mereka yang betul-betul bekerja sebagai

petani, berdasarkan hasil sensus 1971 terdaftar sebanyak 22,5 % dari jumlah penduduk seluruhnya. Tiga abad yang lalu keadaan petani di Aceh dilukiskan oleh seorang pengembara dari tanah Inggris sebagai berikut: "They plowe the ground with buffaloes of which there are great plenties but with small skill and deligence" (Castles and Alfian, 1975. hal. 1).

Tentunya pada masa kini gambaran petani yang disebutkan itu telah banyak mengalami perubahan, antara lain dapat diketahui melalui makin meluasnya pelaksanaan program - program panca usaha tani di daerah Aceh (Hasan Basry, 1978.hal.389 - 390).

Walaupun sumber mata pencaharian hidup bagian terbesar penduduk adalah sektor pertanian, namun perkembangan kesempatan kerja sektor tersebut relatif rendah. Selama tujuh tahun terakhir, 1971-1978, laju pertumbuhan kesempatan kerja pada sektor pertanian rata-rata 1,91 % per tahun. Kesempatan kerja yang menonjol selama periode tersebut adalah pada sektor perdagangan yaitu 14,07 % per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan kesempatan kerja pada sektor-sektor jasa, industri, dan lain - lain, masing - masing adalah 8,88 %, 2,94 %, dan 8,71 % (Tabel. II.12).

Ini berarti pula bahwa elastisitas kesempatan kerja di sektor pertanian hanya 0,330 (tidak elastis). Keadaan tidak elastis tersebut tampak juga pada sektor industri (0,679), jasa - jasa (0,730) dan sektor - sektor lainnya (0,754). Keadaan elastis hanya terlihat pada sektor perdagangan, yaitu 1,517 (Tabel II.13).

Salah satu hal yang cukup menonjol dalam pola perkembangan angkatan kerja adalah menurunnya jumlah angkatan kerja di wilayah II, yaitu dari 144.300 menjadi 119.500. Sedangkan di wilayah - wilayah lain, jumlah angkatan kerja umumnya mengalami kenaikan. Disamping itu kontribusi jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja di wilayah III menurun selama tujuh tahun terakhir itu, tetapi meningkat di wilayah - wilayah pembangunan I dan IV (Tabel II.14). Adanya kenyataan demikian T.Risyad (1979.hal.10) berkesimpulan bahwa dengan meningkatnya PDBR (Product Domestik Bruto Regional) belum memberi jaminan bagi peningkatan kesempatan kerja.

Hasil sensus 1971 juga menunjukkan bahwa lebih kurang 33,74 % dari mereka yang berusia 10 tahun ke atas tergolong buta huruf. Meskipun begitu jumlah mereka yang terdaftar pada lembaga pendidikan tampak makin meningkat. Data tahun 1976 memperlihatkan bahwa jumlah mereka yang terdaftar pada lembaga pendidikan se-

jang pantai utara dan timur. Kepadatan penduduknya mencapai 200 - 300 orang / km².

Sedangkan lainnya mendiami wilayah pantai barat dan selatan, serta pedalaman Aceh bagian tengah dan tenggara (Ibrahim Hasan, 1979, hal. 5; (Hariri Hadi, 1972. hal. 24). Padahal keempat wilayah yang terakhir disebutkan itu lebih luas, dan potensial sumber daya alamnya relatif tinggi.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pantai barat dan selatan merupakan bagian-bagian dari wilayah Aceh yang tergolong sepi. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa wilayah pantai barat dan selatan relatif kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah-wilayah dipantai utara dan timur antara jumlah penduduk dan luas daerah yang didiami terlalu rendah sehingga dapat menyebabkan keterbelakangan sesuatu wilayah (Vinar, 1970 hal. 9).

Sensus tahun 1971 memperlihatkan 91,56 % penduduk wilayah Aceh bermukim di pedesaan, dan yang selebihnya (8,44 %) bertempat tinggal di kota. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, 33,26 % merupakan golongan penduduk berusia dibawah 10 tahun, dan 66,74 % terdiri atas mereka yang berusia 10 tahun ke atas. Apabila dilihat dari status pekerjaannya, 48,1 % penduduk yang berusia 10 tahun keatas tergolong sebagai angkatan kerja, yang terbagi atas 42,95 % merupakan mereka yang bekerja, dan 5,12 % termasuk mereka yang mencari kerja. Diantara mereka yang tergolong sebagai angkatan kerja, 74,66 % merupakan angkatan kerja dalam bidang pertanian (Castles and Alfian, 1975. hal. 5). Yang bekerja pada bidang perdagangan, hotel dan restaurant 6,31 %. Pada sektor jasa-jasa kemasyarakatan dan pekerja pribadi, terdapat 7,49 %. Di sektor industri pengolahan terdapat 3,35 % penduduk. Selebihnya, 1,21 %, bermata pencaharian hidup dibidang angkutan, pengairan, dan komunikasi, 0,82 % bersumber penghasilan pada sektor bangunan, 0,31 % pada pertambangan dan galian, 0,11 % pada sektor keuangan dan asuran i serta 0,06 % pada sektor listrik, gas dan air. Yang bermata pencaharian hidup pada berbagai jenis pekerjaan lainnya lagi diperkirakan tidak kurang dari 5,68 % (Hasan Basry, 1978. hal. 2-3).

Dengan begitu dapatlah dikatakan bahwa bidang pertanian merupakan sumber mata pencaharian hidup berpokok dari sebagian besar penduduk di daerah Aceh. Di samping itu sektor jasa-jasa kemasyarakatan dan perdagangan masih tergolong penting pula artinya. Namun demikian mereka yang betul-betul bekerja sebagai

petani, berdasarkan hasil sensus 1971 terdaftar sebanyak 22,5 % dari jumlah penduduk seluruhnya. Tiga abad yang lalu keadaan petani di Aceh dilukiskan oleh seorang pengembara dari tanah Inggris sebagai berikut: "They plowe the ground with buffaloes of which there are great plenties but with small skill and deligence" (Castles and Alfian, 1975. hal. 1).

Tentunya pada masa kini gambaran petani yang disebutkan itu telah banyak mengalami perubahan, antara lain dapat diketahui melalui makin meluasnya pelaksanaan program - program panca usaha tani di daerah Aceh (Hasan Basry, 1978.hal.389 - 390).

Walaupun sumber mata pencaharian hidup bagian terbesar penduduk adalah sektor pertanian, namun perkembangan kesempatan kerja sektor tersebut relatif rendah. Selama tujuh tahun terakhir, 1971-1978, laju pertumbuhan kesempatan kerja pada sektor pertanian rata-rata 1,91 % per tahun. Kesempatan kerja yang menonjol selama periode tersebut adalah pada sektor perdagangan yaitu 14,07 % per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan kesempatan kerja pada sektor-sektor jasa, industri, dan lain - lain, masing - masing adalah 8,88 %, 2,94 %, dan 8,71 % (Tabel II.12).

Ini berarti pula bahwa elastisitas kesempatan kerja di sektor pertanian hanya 0,330 (tidak elastis). Keadaan tidak elastis tersebut tampak juga pada sektor industri (0,679), jasa - jasa (0,730) dan sektor - sektor lainnya (0,754). Keadaan elastis hanya terlihat pada sektor perdagangan, yaitu 1,517 (Tabel II.13).

Salah satu hal yang cukup menonjol dalam pola perkembangan angkatan kerja adalah menurunnya jumlah angkatan kerja di wilayah II, yaitu dari 144.300 menjadi 119.500. Sedangkan di wilayah - wilayah lain, jumlah angkatan kerja umumnya mengalami kenaikan. Disamping itu kontribusi jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja di wilayah III menurun selama tujuh tahun terakhir itu, tetapi meningkat di wilayah - wilayah pembangunan I dan IV (Tabel II.14). Adanya kenyataan demikian T.Risyad (1979.hal.10) berkesimpulan bahwa dengan meningkatnya PDBR (Product Domestik Bruto Regional) belum memberi jaminan bagi peningkatan kesempatan kerja.

Hasil sensus 1971 juga menunjukkan bahwa lebih kurang 33,74 % dari mereka yang berusia 10 tahun ke atas tergolong buta huruf. Meskipun begitu jumlah mereka yang terdaftar pada lembaga pendidikan tampak makin meningkat. Data tahun 1976 memperlihatkan bahwa jumlah mereka yang terdaftar pada lembaga pendidikan se-

banyak 451.184 orang. Dibandingkan dengan angka - angka sejenis dari tahun sebelumnya, terlihat persentase kenaikan jumlah murid, yakni Sekolah Dasar sebesar 8,55 %, Madrasah Ibtidaiyah 26,45 %, Sekolah Lanjutan Pertama 10,67 %, Madrasah Tsanawiyah 1,29 %, Perguruan Tinggi Umum 65,89 %, Perguruan Tinggi Agama 17,57 %, dan Pesantren 20,10 %. Kalau dibandingkan dengan jumlah murid pada tahun 1972, dalam masa empat tahun tersebut terlihat kenaikan rata - rata sebesar 5 % per tahun (Hasan Basry, 1977.hal 46 - 48).

Sampai dengan tahun 1973/1974, perkembangan pendidikan di daerah Aceh agak lamban, namun sejak tahun terakhir Pelita I perkembangannya makin berarti, antara lain karena adanya pembangunan gedung - gedung sekolah yang baru, serta penambahan jumlah dan jenis sekolah (Hasan Basry 1978, hal.251).

Jenis dan jenjang pendidikan yang terdapat di daerah Aceh adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama, Sekolah Pendidikan Guru, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Pendidikan Guru Agama, dan Perguruan Tinggi, baik umum maupun agama.

Dari lembaga - lembaga pendidikan tersebut ada yang berstatus negeri, swasta, ataupun bersubsidi.

Pada tahun 1977 terdapat 2.686 buah sekolah meliputi 1.696 Sekolah Dasar, 530 Madrasah Ibtidaiyah, 195 Sekolah Menengah Pertama, 34 Sekolah Kejuruan Pertama, 72 Madrasah Tsanawiyah, 20 Sekolah Keguruan, 68 Sekolah Menengah Atas, 15 Sekolah Kejuruan Tingkat Atas, 9 Madrasah Aliyah dan 47 Pendidikan Guru Agama. Diantara jumlah itu, 32 buah terdapat di Kotamadya Sabang, 108 di Kodya Banda Aceh, 211 di Aceh Besar, 367 di Pidie, 568 di Aceh Utara, 354 di Aceh Timur, 181 di Aceh Tengah, 220 di Aceh Tenggara, 352 di Aceh Barat, dan 303 di Aceh Selatan. Keadaan ketidakmerata umumnya kelihatan pada sekolah menengah dan sekolah kejuruan, terutama untuk daerah Aceh Besar. Ini disebabkan ibukota Aceh Besar adalah Banda Aceh juga. Jumlah sekolah yang terlihat cukup menonjol adalah di Aceh Utara, sedangkan yang relatif rendah adalah Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Aceh Tenggara. Sedangkan Sabang dan Banda Aceh berdasarkan luas wilayah dan jumlah sekolah yang dimilikinya (Tabel II.15). Jumlah saja kurang memberi gambaran yang tepat, sebab bergantung pada jumlah penduduk umumnya dan jumlah penduduk usia sekolah khususnya.

Salah satu masalah yang cukup menonjol dalam hubungan anta-

ra pendidikan dan pembangunan di daerah Aceh adalah kekurangan tenaga kerja yang trampil di dalam sektor - sektor yang modern. dan kelebihan tenaga kerja yang tidak trampil, baik di sektor modern maupun di sektor tradisional (Adnan Abdullah), 1975. hal. 39). Kekurang trampilan umumnya berpengaruh langsung terhadap kemampuan untuk menerapkan berbagai kemajuan di bidang teknologi. Ini tampak jelas pada produktivitas di bidang pertanian yang ternyata tetap saja berada pada tingkatan yang relatif rendah (Ibrahim Hasan, 1979. hal. 2-3). Sehubungan dengan itu tepat kiranya apa yang diungkapkan oleh Catles dan Alfian (1975. hal.1), bahwa dewasa ini rejeki yang dapat diharapkan dari sektor-sektor lain amat mempesona kebanyakan pejabat, namun mayoritas penduduk Aceh tetap menguntungkan sumber mata pencaharian hidupnya pada lahan pertanian.

Karena itu akan tetap menarik kiranya kalau pembicaraan tentang masalah teknologi di daerah Aceh lebih diarahkan kepada bidang pertanian. Namun begitu, uraiannya akan tetap dibedakan berdasarkan letak dan jenis kegiatan matapencaharian hidup penduduk sehari-hari, yaitu berdasarkan batasan ruang lingkup dari studi ini yang meliputi bidang pertanian, perternakan, perikanan, perdagangan, perindustrian, dan pertambangan.

Sistem teknologi tradisional di bidang pertanian telah mengenal beberapa jenis peralatan produksi, seperti *catok* (cangkul), *Lham* (tembilang), *Langai* (luku), *creah* (garu), *sadeuep* (alat pemotong padi), dan *jeungki* (alat penumbuk padi). Ada pun penggunaan teknologi baru antara lain telah mencakup traktor, teknis irigasi, bibit unggul, pupuk, racun pencegah hama, dan huller.

Kemajuan teknologi juga terlihat pada sistem penangkapan ikan. Para nelayan sudah tidak asing lagi dengan bahan-bahan sintesis sebagai pengganti serat tanaman dan benang untuk membuat jaring dan tali pancing. Sampan dan perahu mereka sebagian sudah dilengkapi dengan motor. Usaha penggantian peralatan tradisional terutama didorong dengan fasilitas kredit KIK dan KMKP. Pada tahun 1976 terdaftar 1.177 buah perahu bermotor yang dipergunakan untuk menangkap ikan di perairan Aceh. Alat penangkap ikan lainnya yang dipergunakan adalah pancing (24.152 buah), pukot banting (1.071 buah), pukot purse, pukot harimau (136), jaring (1.554), bubu (314), jala (2.180), trawl (75 buah), tanggok (1.007), jermal (759), sero (230 buah), dan lain-lain (1.068). Selama Pelita I dibangun tempat-tempat pendaratan ikan,

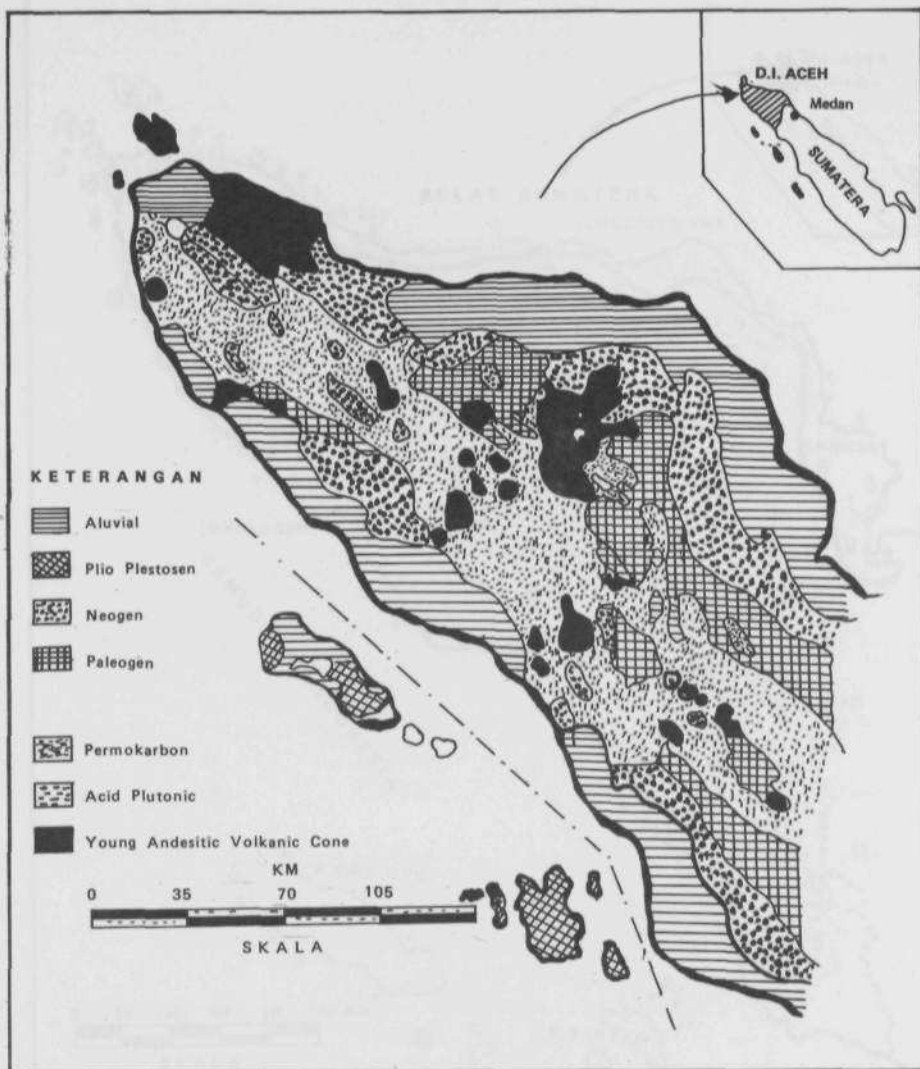
seperti di Sabang oleh P.T. Sam Samudera Besar, di Banda Aceh oleh Dinas Perikanan, dan di Aceh Timur oleh pihak swasta. Dua fasilitas pendinginan, masing-masing berkapasitas 900 ton dibangun di Sabang oleh P.T. Samudera Besar, dan yang berkapasitas 400 ton dibangun di Lhok Seumawe oleh P.T. Surya Aceh. Selama Pelita II telah dibangun pula tambak-tambak percontohan dan tempat pelelangan ikan (Hasan Basry 1978, hal. 144-145).

Sistem teknologi yang lebih modern di sektor perternakan pada dasarnya berkembang melalui penyebaran bibit unggul inseminasi buatan, kasterasi, peningkatan mutu makan ternak pembinaan perternak kecil, PUTP (Pembinaan Unggas dan Ternak Potong), dan pengendalian penyakit ternak. Kecuali itu dikembangkan pula berbagai penelitian di bidang perternakan, antara lain mengenai mutu makanan ternak yang dikembangkan di Saree (Aceh Besar) survai penggembalaan ternak potong yang dilakukan oleh team anazdeg di Blangbintang (Aceh Besar) dan survai lokasi kemungkinan pengembangan ternak di Blangrakal (Aceh Tengah). Bahkan pada tahun 1974 di Indrapuri (Aceh Besar) didirikan suatu pusat pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak (Hasan Basry, 1978, hal. 146-147).

Lokasi daerah Aceh yang berhadapan langsung dengan dua pusat perdagangan terpenting di Selat Sumatera, namun kegiatan mata pencaharian hidup penduduk di bidang perdagangan tidak bergerak secara menonjol. Dari 43 perusahaan importir yang memiliki TAPPI/TAPPIS pada tahun 1974 yang tetap melanjutkan kegiatannya hingga tahun 1976 hanya 13 perusahaan. Kelesuan berdagang tampak juga pada sektor perdagangan dalam negeri /antar pulau. Jumlah perusahaan sebanyak 547 pada tahun 1973 hanya tinggal 229 buah (Hasan Basry, 1978, hal. 163-166).

Kecenderungan yang baru saja disebutkan tampaknya saling bertolak belakang dengan apa yang terdapat pada Tabel II. 14 yang memperlihatkan laju pertumbuhan kesempatan kerja di sektor - sektor perdagangan. Sebetulnya apa yang tampak tidak terbatas pada perdagangan impor/ekspor dan antar pulau saja, tetapi juga meliputi perdagangan lokal. Bantuan pemerintah untuk penyediaan sarana perdagangan lokal selama Pelita I dan II cukup berarti terutama pada pembangunan pasar inpres.

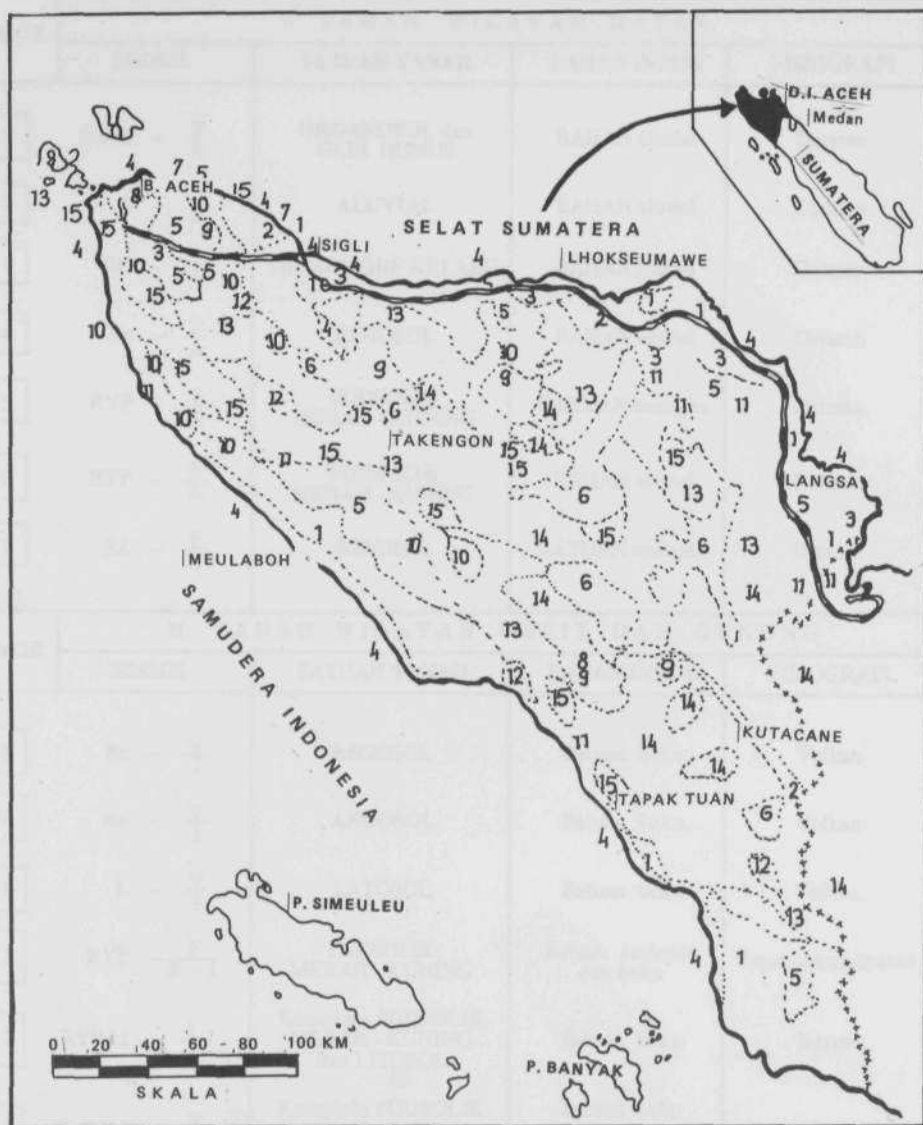
Laporan Resmi Pemerintah Daerah Aceh (Hasan Basry, 1978 hal. 168), menyebutkan bahwa selama dua masa Pelita perkembangan industri di daerah Aceh cukup menonjol. Sebelum Pelita I



Sumber : Geological Map of Indonesia

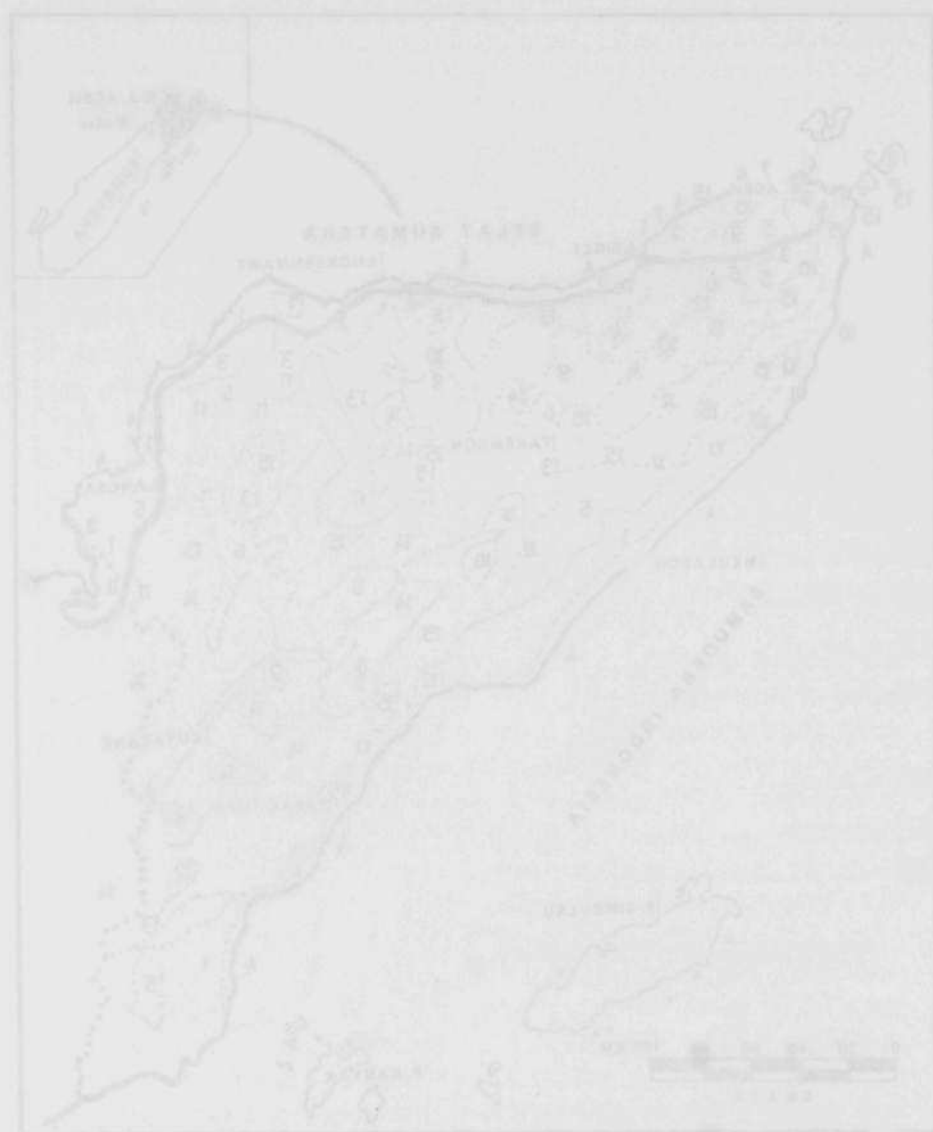
Complled by T.H.H.F. Klompe

Peta II.1. SKETSA GEOLOGI DAERAH ACEH



Sumber : Peta Tanah Eksplorasi Sumatera
Bagian Utara, 1964

Peta II.2. PETA TANAH EKSPLORASI PROPINSI D. I. ACEH



Map of Java, Indonesia, showing administrative boundaries and major cities.

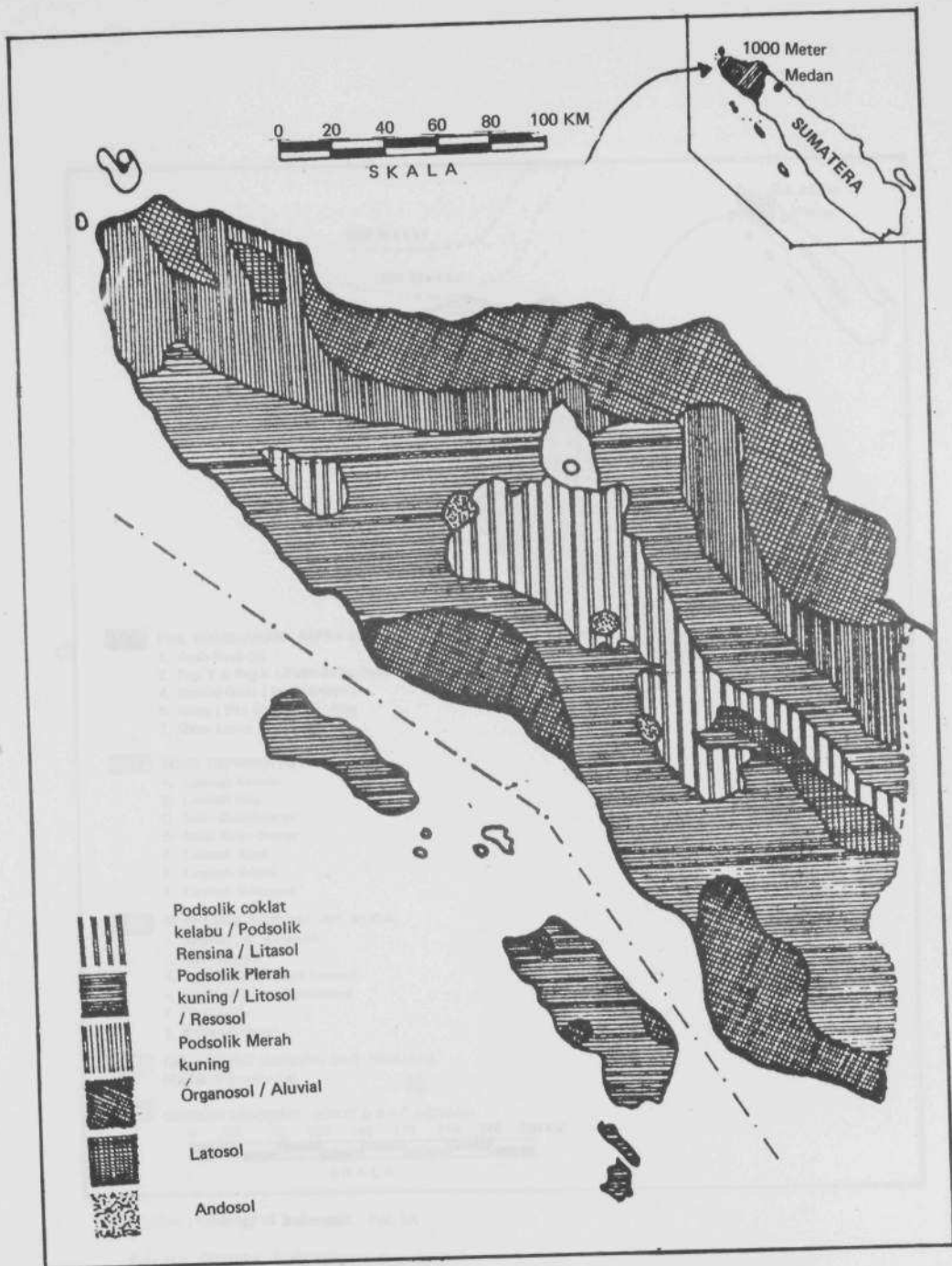
Source: U.S. State Department, Bureau of Ocean Affairs, 1964.

LEGENDA

NOMOR	I. TANAH WILAYAH DATAR			
	SIMBOL	SATUAN TANAH	BAHAN INDUK	FISIOGRAFI
1	$O.HG - \frac{P}{A}$	ORGANOSOL dan GLEI HUMUS	BAHAN aluvial	Dataran
2	$A - \frac{P}{A}$	ALUVIAL	BAHAN aluvial	Dataran
3	$GH - \frac{P}{A}$	HIDROMORF KELABU	BAHAN aluvial	Dataran
4	$Re - \frac{P}{A}$	REGOSOL	BAHAN aluvial	Dataran
5	$RYP - \frac{P}{A}$	PODSOLIK MERAH - KUNING	BATUAN endapan	Dataran
6	$RYP - \frac{P}{A}$	PODSOLIK MERAH - KUNING	BAHAN aluvial	Dataran
7	$RZ - \frac{P}{A}$	RENSINA	BATUAN endapan	Dataran
NOMOR	II. TANAH WILAYAH BUKIT DAN GUNUNG			
	SIMBOL	SATUAN TANAH	BAHAN INDUK	FISIOGRAFI
8	$Rc - \frac{V}{I}$	REGOSOL	Batuan beku	Volkan
9	$An - \frac{V}{I}$	ANDOSOL	Batuan beku	Volkan
10	$L - \frac{V}{I}$	LATOSOL	Batuan beku	Volkan
11	$RYP - \frac{F}{S-1}$	PODSOLIK MERAH - KUNING	Batuan endapan dan beku	Pegunungan lipatan
12	$RYP.Li - \frac{I}{I}$	Kompleks PODSOLIK MERAH - KUNING dan LITOSOL	Batuan beku	Intrusi
13	$RYP/L/Li - \frac{B}{I/S/M}$	Kompleks PODSOLIK MERAH - KUNING LATOSOL dgn LITOSOL	Batuan beku endapan dan	Pegunungan patahan
14	$BP/P/Li - \frac{B}{I/S/M}$	Kompleks PODSOLIK COKLAT PODSOL dan LITOSOL	Batuan beku endapan dan metamorf	Pegunungan patahan
15	$Rz/Li - \frac{B}{S}$	Kompleks RESINA dan LITOSOL	Batuan endapan	Pegunungan patahan

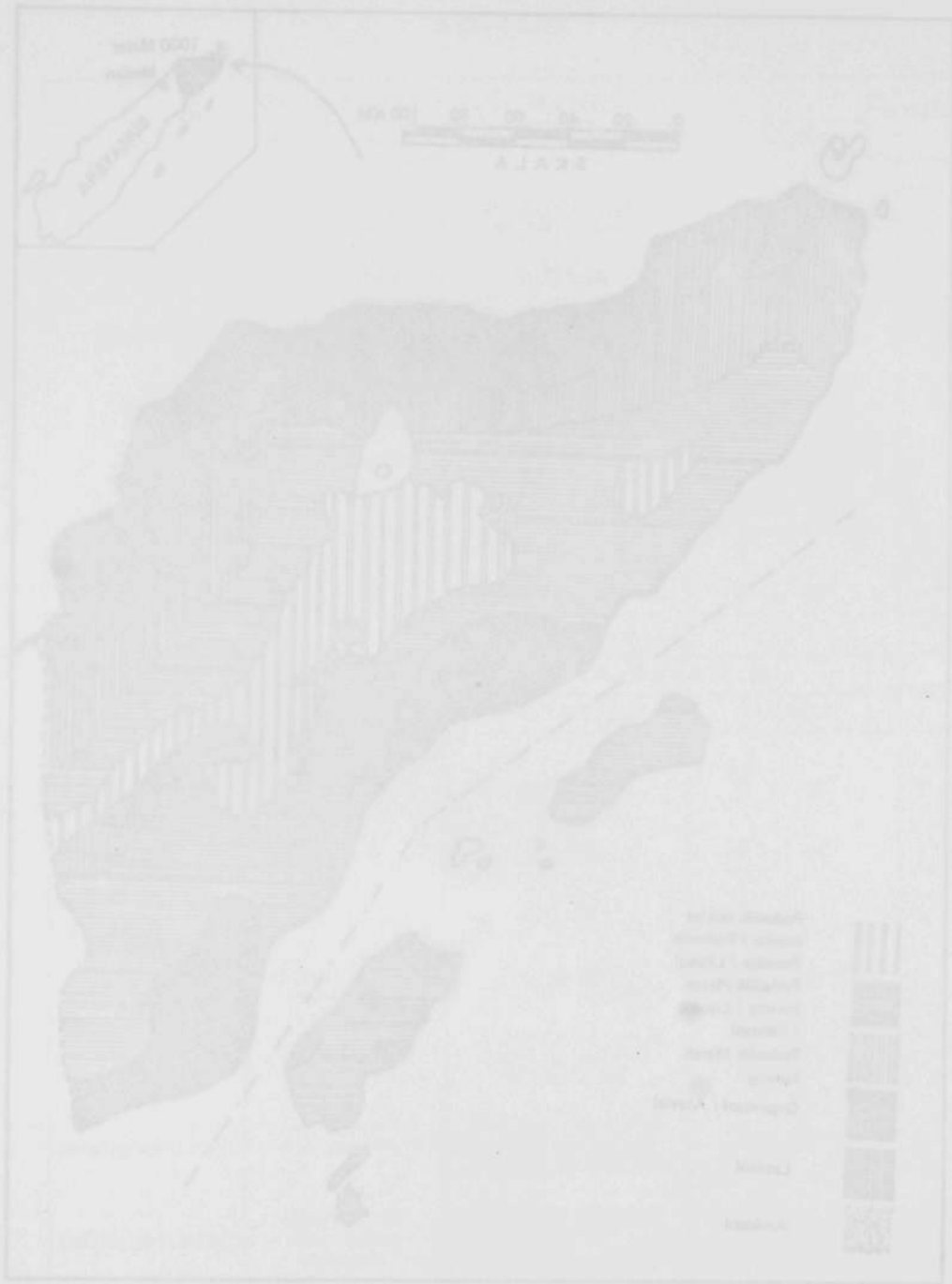
LEGENDA

NOMOR	I. TANAH WILAYAH DATAR			
	Simbol	BATIMETRI	STRUKTUR	PERIKATAN
1	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME GIL. 1/4	BATIMETRI	Datar
2	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME	BATIMETRI	Datar
3	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME KILAU	BATIMETRI	Datar
4	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME	BATIMETRI	Datar
5	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME MERAH - KUNING	BATIMETRI	Datar
6	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME MERAH - KUNING	BATIMETRI	Datar
7	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME	BATIMETRI	Datar
NOMOR	II. TANAH WILAYAH BUKIT DAN DUNDO			
	Simbol	BATIMETRI	STRUKTUR	PERIKATAN
8	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME	BATIMETRI	Datar
9	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME	BATIMETRI	Datar
10	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME	BATIMETRI	Datar
11	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME MERAH - KUNING	BATIMETRI	Datar
12	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME MERAH - KUNING	BATIMETRI	Datar
13	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME MERAH - KUNING	BATIMETRI	Datar
14	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME MERAH - KUNING	BATIMETRI	Datar
15	$\frac{1}{4}$ - 1	ORGANISME MERAH - KUNING	BATIMETRI	Datar



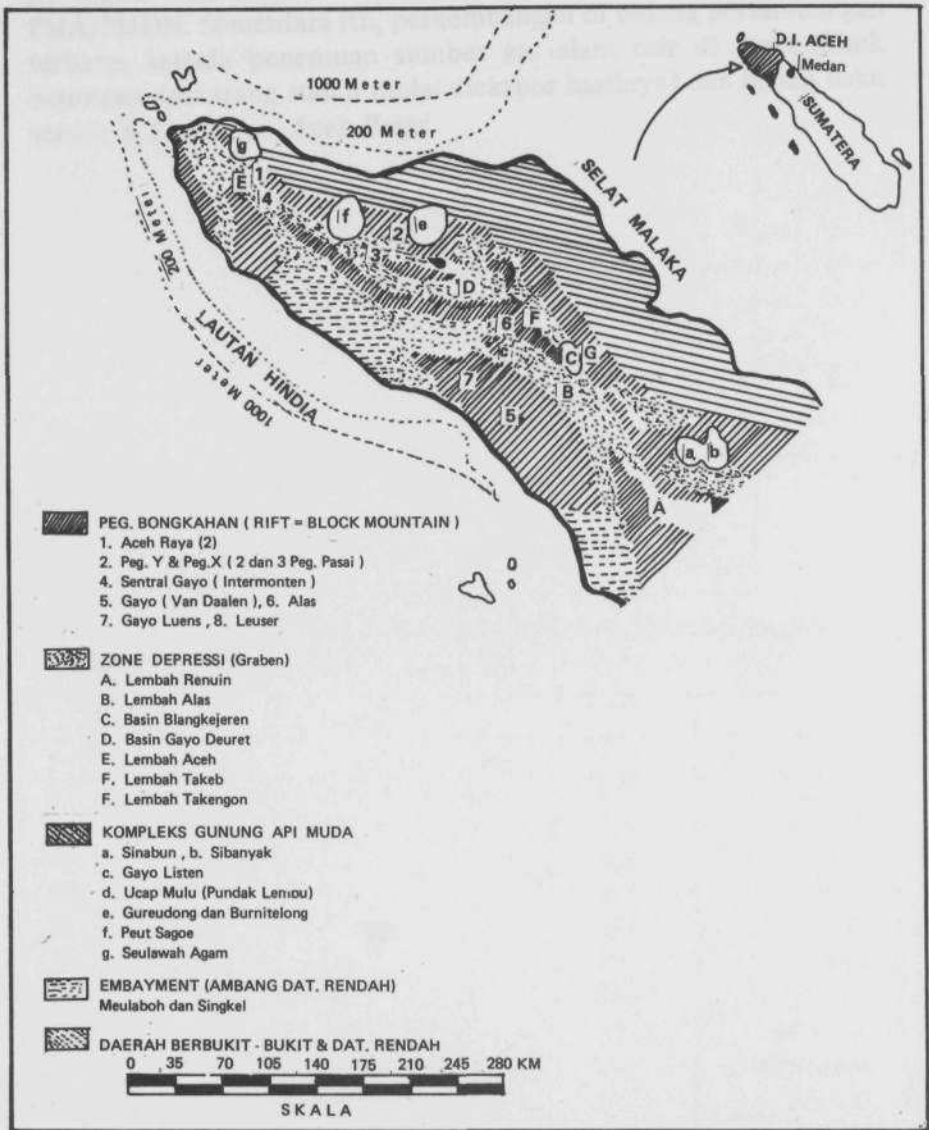
Sumber : Aceh Dalam Angka, 1973

Peta II.3. PETA KEADAAN TANAH DI D.I. ACEH



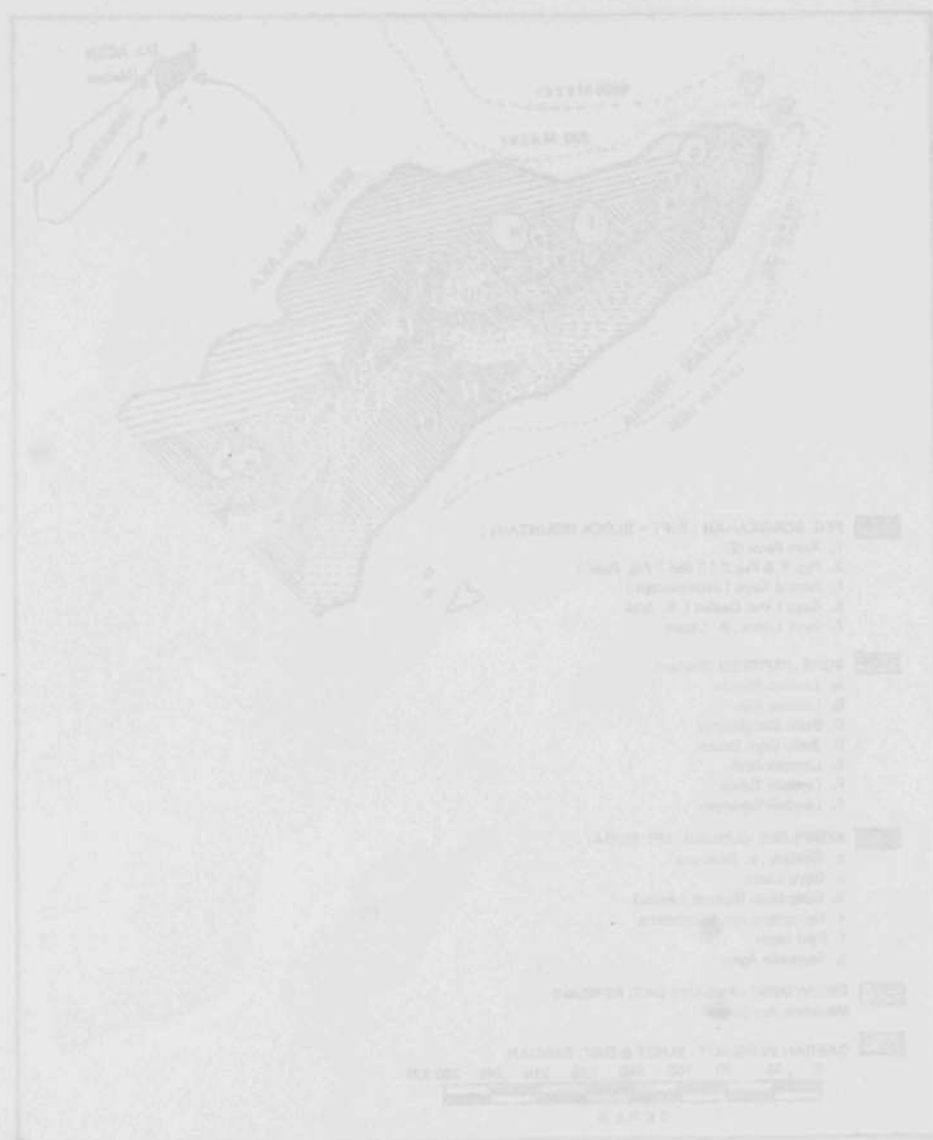
Sumber: Hasil Riset Angket, 1973

Peta Geologi KADAHAN TAMAHI DI IL ACEH



Sumber : Geology of Indonesia, Vol. IA

Peta II.4. SKETSA FISIOGRAFI D.I. ACEH



Source: *Geography of the Pacific, 1964*
 Pacific Islands Information at 1964

dimulai, jumlah perusahaan industri hanya 1.042 buah, tetapi setelah akhir Pelita II meningkat menjadi 3.938 buah. Industri tersebut dibedakan atas industri ringan, industri kerajinan, industri logam dan mesin, serta industri yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN. Sementara itu, perkembangan di bidang pertambangan terbatas kepada penemuan sumber gas alam cair di Arun, Lhok Seumawe (sekarang sudah mulai diekspor hasilnya) dan bahan baku semen di Lhok Nga, Aceh Besar.

Bulan	Tahun				
	1973	1974	1975	1976	1977
1. Januari	226	176	147	101	77
2. Februari	165	98	82	48	127
3. Maret	171	123	110	126	93
4. April	171	140	84	190	164
5. Mei	126	112	12	96	152
6. Juni	96	52	68	24	91
7. Juli	79	40	38	80	27
8. Agustus	91	81	26	102	47
9. September	132	122	120	84	124
10. Oktober	112	144	86	173	193
11. November	166	182	182	198	196
12. Desember	236	216	422	124	204

Sumber: Kantor Statistik dan Statistik Industri Aceh, Aceh
 Dalam Angka, Tahun 1973 - 1977, serambi dan lain-lain.

Tabel II. 1

**CURAH HUJAN RATA - RATA BULANAN DAN TAHUNAN MENURUT
KABUPATEN, DI DAERAH ISTIMEWA ACEH, TAHUN 1966 - 1975.**

KABUPATEN/ KOTAMADYA	Rata - rata	Bulanan	Rata - rata	Tahunan
	bh	mm	bh	mm
1. Aceh Besar	7	121	84	1450
2. Sabang	11	198	130	2874
3. Pidie	8	165	101	1982
4. Aceh Utara	8	139	92	1676
5. Aceh Tengah	9	159	104	1914
6. Aceh Tenggara	9	178	107	2138
7. Aceh Timur	7	155	78	1861
8. Aceh Barat	12	251	138	3012
9. Aceh Selatan	11	246	132	2951
Rata - rata	9	179	107	2156,9

Sumber : Muhammad Hasan Basry, et al, **Memorandum Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakir Walad 1968 - 1978**
Banda Aceh, 1978, hal. 392

Tabel II. 2

**CURAH HUJAN RATA-RATA BULANAN DI DAERAH ACEH, 1973 - 1977
(dalam mm)**

Bulan	Tahun				
	1973	1974	1975	1976	1977
1. Januari	328	138	142	31	77
2. Pebruari	168	99	93	49	127
3. Maret	132	123	110	156	93
4. April	121	140	84	199	164
5. Mei	126	133	42	98	132
6. Juni	96	53	68	26	93
7. Juli	79	47	38	83	57
8. Augustus	91	52	28	105	47
9. September	133	125	126	84	154
10. Oktober	223	144	88	173	193
11. Nopember	265	185	185	138	156
12. Desember	336	218	455	154	264

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, **Aceh Dalam Angka**, Tahun 1973 - 1977, setelah disusun kembali.

Tabel II. 3

TEMPERATUR RATA-RATA BULANAN DI DAERAH ACEH, 1973 - 1977
(dalam 0°)

Bulan	Tahun				
	1973	1974	1975	1976	1977
1. Januari	29,4	26,6	26,5	27,0	27,0
2. Pebruari	29,1	27,5	27,5	27,7	26,7
3. Maret	29,5	27,9	27,9	27,7	26,4
4. April	30,1	28,1	28,0	28,5	26,6
5. Mei	30,2	27,5	27,4	28,5	26,5
6. Juni	30,1	28,0	28,0	28,7	26,9
7. Juli	30,1	27,7	27,8	28,0	27,6
8. Agustus	30,0	27,7	27,6	27,2	27,3
9. September	29,4	27,4	27,4	26,6	27,3
10. Oktober	29,4	27,2	27,2	27,2	25,3
11. Nopember	28,8	26,7	27,0	27,2	25,4
12. Desember	29,0	26,4	26,4	27,2	25,3

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, Aceh
Dalam Angka, Tahun 1973 - 1977, setelah disusun kembali.

Tabel II. 4

LEMBAB NISBI RATA-RATA BULANAN DI DAERAH ACEH, 1973 - 1977
(dalam %)

Bulan	Tahun				
	1973	1974	1975	1976	1977
1. Januari	85	86	86	68,0	72,0
2. Pebruari	86	85	86	72,0	62,7
3. Maret	88	84	84	75,0	79,0
4. April	85	86	86	70,0	82,0
5. Mei	85	86	86	72,5	79,0
6. Juni	85	85	85	66,6	76,0
7. Juli	83	87	87	68,5	70,0
8. Augustus	82	85	86	70,0	70,0
9. September	84	89	89	77,0	71,0
10. Oktober	86	88	88	74,5	88,0
11. Nopember	86	88	88	73,5	88,0
12. Desember	86	89	89	68,5	93,0

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, Aceh
Dalam Angka, Tahun 1973 - 1977, setelah disusun kembali.

Tabel II. 5

PENGUNAAN TANAH PADA ENAM KABUPATEN DI ACEH
(%)

Jenis Penggunaan	Aceh Besar	Pidie	Aceh Utara	Aceh Tengah	Aceh Timur	Aceh Barat
1. Perkampungan	1,47	3,64	5,82	0,21	1,40	1,24
2. S a w a h	8,65	11,90	10,17	1,88	2,51	4,44
3. Perkebunan Besar	—	—	0,92	16,00	5,53	0,48
4. Perkebunan Rakyat	4,49	3,12	5,92	4,14	3,95	9,13
5. Pertanian tanah kering.	2,90	0,63	4,29	2,30	1,68	1,24
6. H u t a n	47,31	74,69	68,32	72,30	83,80	83,25
7. Tanah Rusak/ Tandus.	0,23	—	0,33	—	0,27	—
8. Tambak Ikan	0,05	0,92	1,12	—	0,16	—
9. Rawa - rawa	0,15	1,15	1,41	—	0,53	0,18
10. Padang Rumput /Alang-2.	22,39	3,94	—	2,16	—	0,03
11. Padang Penggem- balaan/ dan Hu- tan Muda.	12,35	—	1,70	—	0,17	—
12. Tempat Pengga- raman.	—	0,1	—	—	—	—
13. D a n a u	—	—	—	1,01	—	0,01
Luas Tanah (ha)	173.708	416.342	537.840	577.263	824.273	1.2023

Sumber : Sub- Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1977/1978.

Tabel II. 6

PERINCIAN LUAS PENGGUNAAN TANAH DAERAH ISTIMEWA ACEH

Penggunaan tanah	Luas (ha)	Persentase
1. H u t a n	4.130.000,00	74,56
2. Tanah Pertanian	233.698,00	4,22
3. Tanah Perkebunan Besar	124.033,80	2,25
4. Tanah Perkebunan Rakyat	182.959,00	3,30
5. Perikanan Darat	16.644,00	0,30
6. Padang Rumput/Alang-Alang	432.000,00	7,80
7. Danau, Sungai, dan lain-lain.	364.665,20	6,58
8. Kota dan Kampung	55.000,00	0,99
Jumlah	5.539.000,00	100,00

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, Aceh Dalam Rangka, 1976 hal. 6

Tabel II. 7

TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DI DAERAH ISTIMEWA ACEH 1976/1977

Kabupaten/Kodya	Tingkat Perkembangan Desa			J u m l a h
	Desa Swadaya	Desa Swadaya	Desa Swadaya	
1. Sabang	10	7	1	18
2. Banda Aceh	—	5	15	20
3. Aceh Besar	459	196	8	663
4. Pidie	642	288	18	948
5. Aceh Utara	1.311	110	1	1.422
6. Aceh Timur	539	145	33	437
7. Aceh Tengah	56	105	5	166
8. Aceh Tenggara	214	15	—	229
9. Aceh Barat	326	350	86	762
10. Aceh Selatan	456	39	—	497

Sumber : Laporan Pelaksanaan Bantuan Desa Daerah Istimewa Aceh, Tahun 1977/1978.

Tabel II. 8

PRODUKSI TANAMAN BAHAN MAKANAN MENURUT KABUPATEN DI DAERAH ACEH, 1977.

(dalam ton)

Jenis Hasil Pertanian	Kabupaten/Kotamadya								
	Sabang	Aceh Besar	Pidie	Aceh Utara	Aceh Tengah	Aceh Timur	Aceh Tenggara	Aceh Barat	Aceh Selatan
1. Padi Sawah	—	52.375	178.618	146.376	30.741	96.000	67.008	90.685	65.085
2. Padi Ladang	506	180	2.070	18.766	1.577	13.600	1.577	5.576	8.841
3. Jagung	3	238	221	979	73	1.041	271	158	387
4. Ketela Pohon	195	3.891	4.400	10.956	1.786	8.970	2.760	22.331	8.800
5. Ketela Rambat	57	803	479	1.748	700	2.079	3.360	1.310	1.668
6. Kacang Tanah	4	38	852	297	72	378	168	275	3.261
7. Kacang Kedele	6	3	1.632	1.192	259	1.504	771	77	80
8. Kacang Hijau	1	19	59	235	25	326	318	131	130

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh,
Aceh Dalam Angka, 1977 hal. 308 — 309.

Tabel II. 9

PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN MENURUT KABUPATEN DI ACEH, 1977.
(dalam ton)

Jenis Hasil Perkebunan	Kabupaten/Kotamadya								
	Sabang	Aceh Besar	Pidie	Aceh Utara	Aceh Tengah	Aceh Timur	Aceh Tenggara	Aceh Barat	Aceh Selatan
1. Karet	—	—	—	674,7	—	8.485,9	135,7	1.346,8	475,0
2. Kelapa Sawit	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Kelapa	1.327	5.559	5.533,6	28.328,73	—	4.105	1.148	6.974,6	111.418,52
4. Kopi	—	62	1.546	520	9.800,8	9.894,8	1.506	1.862,5	113,5
5. Cengkeh	200,5	567,8	15,9	19	—	12,1	4,7	1.834,5	533,4
6. Pala	—	36	3,1	—	—	—	3,7	239	1.424
7. Pinamg	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Pinus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Randu	70	10,7	15,5	47	—	6,15	26	7,2	97,2
10. Lada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tebu	—	825	250	8.503	6.555	390	575	—	420
12. Tembakau	—	1,45	30	—	750	—	2.129	—	—
13. Nilam	—	—	—	—	—	—	1,8	10,67	29

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, **Aceh Dalam Angka**, 1977 hal. 317.

Tidak termasuk hasil perkebunan besar.

Tabel II. 10

PROYEKSI DAN PENYEBARAN PENDUDUK PADA MASING - MASING
KABUPATEN/KOTAMADYA DI DAERAH ACEH 1978 - 1983

Kotamadya/ Kabupaten	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1. Banda Aceh	64.772	66.262	67.876	69.345	70.940	72.571
2. Sabang	19.549	19.999	20.459	20.930	21.411	21.903
3. Aceh Besar	210.803	215.652	220.612	225.686	230.877	236.187
4. Pidie	320.092	327.454	334.985	342.690	350.572	358.635
5. Aceh Tengah	137.788	140.957	144.199	147.515	150.908	154.379
6. Aceh Utara	553.742	566.478	579.507	592.835	606.471	620.419
7. Aceh Timur	369.789	378.294	386.995	395.896	405.001	414.317
8. Aceh Tenggara	152.156	155.655	159.234	162.897	166.644	170.477
9. Aceh Barat	264.034	270.107	276.239	282.675	289.176	295.828
10. Aceh Selatan	262.621	268.661	274.841	281.162	287.629	294.244
Total	2.355346	2.409519	2.464938	2.521631	2.579629	2.638960

Sumber : Direktorat Agraria Daerah Istimewa Aceh

Tabel II. 11

**KEPADATAN PENDUDUK GEOGRAFIS DAN AGRARIS PADA MASING -
MASING KABUPATEN/KOTAMADYA DI ACEH, BERDASARKAN PROYEKSI
TAHUN 1978 DAN 1983**

Kotamadya/ Kabupaten	Kepadatan Penduduk			
		1978	1983	
	Geografis	Agraris	Geografis	Agraris
1. Banda Aceh	5846	5846	6550	6550
2. Sabang	98	—	106	—
3. Aceh Besar	70	429	78	481
4. Pidie	94	373	105	418
5. Aceh Tengah	18	64	20	722
6. Aceh Utara	116	365	130	409
7. Aceh Timur	66	295	74	330
8. Aceh Tenggara	13	—	14	—
9. Aceh Selatan	27	498	31	558
Total	42,5	266,2	47,7	298,2

Sumber : Direktorat Agraria Daerah Istimewa Aceh.

Tabel II. 12.

PERKEMBANGAN KESEMPATAN KERJA SEKTORAL DI DAERAH ACEH.

1971 - 1978

(dalam persentase)

Sektor	1971 (000)	1978 (000)	Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja Per Tahun (%) ^a
1. Pertanian	441,3 (76,6 %)	503,6 (66,1 %)	1,91
2. Industri	19,5 (3,4 %)	23,8 (3,1 %)	2,94
3. Perdagangan	38,0 (6,6 %)	95,6 (12,5 %)	14,07
4. Jasa-jasa	44,3 (7,7 %)	80,3 (10,5 %)	8,88
5. Lain	32,7 (5,7 %)	58,6 (7,7 %)	8,71
Total	575,8	762,1	4,09

Tabel II. 13.

**ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA SEKTORAL DI DAERAH ACEH,
1971 – 1978**

Sektor :	Laju Pendapatan Regional (1 % pertahun)	Laju Kesempatan Kerja (1 % pertahun)	Elastisitas Kesempatan Kerja
1. Pertanian	5,782	1,909	0,330
2. Industri	4,333	2,941	0,679
3. Perdagangan	9,2765	14,069	1,517
4. Jasa-jasa	12,1659	8,880	0,730
5. Lain	11,552	8,708	0,754
Total	6,659	4,087	0,587

Sumber : T. Risyad, et al **Ringkasan Rencana Pembangunan Lima Tahun
Ketiga Propinsi Daerah Istimewa Aceh (1979/80 – 1983/84)**
Stensilan, hal. 23

Tabel II. 14

**LAJU PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DAN KESEMPATAN KERJA PERWILAYAH PEMBANGUNAN
DI DAERAH ACEH 1971 – 1978**

Wilayah	Tingkat Partisipasi		Angkatan Kerja			Kesempatan			Tingkat Pengangguran	
	1971 (000)	1978 (000)	1971 (000)	1978 (000)	Laju (%)	1971 (000)	1978 (000)	Laju (%)	1971 (000)	1978 (000)
I	0,485	0,525	133,3 (20,7)	206,2 (25,7)	6,43	120,8 (21)	188,8 (24,8)	6,59	9,4	8,4
II	0,480	0,567	144,3 (22,4)	119,5 (14,9)	-2,66	130,2 (22,6)	115,2 (15,1)	-1,73	9,8	3,6
III	0,516	0,493	198,2 (30,8)	225,8 (28,1)	1,88	179,1 (31,1)	219,3 (28,8)	2,94	9,6	2,9
	0,443	0,457	168,4 (26,1)	251,9 (31,3)	5,92	145,6 (25,3)	238,8 (31,3)	7,32	13,5	5,2
Aceh	0,481	0,498	644,3 (100)	803,4 (100)	3,20	575,7 (100)	762,1 (100)	4,09	10,6	5,1

Sumber : T. Risyad, et al, Ringkasan Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (1979/1980 – 1983/1984).

Tabel II. 15
PENYEBARAN SEKOLAH DI DAERAH ISTIMEWA ACEH. 1977

Jenis Sekolah	Kabupaten/Kotamadya										
	Sabang	Banda Aceh	Aceh Besar	Pidie	Aceh Utara	Aceh Tengah	Aceh Timur	Aceh Tenggara	Aceh Barat	Aceh Selatan	Total
1. Sekolah Dasar	22	56	129	220	362	232	105	147	212	211	1.696
2. Madrasah Ibtidaiyah	4	8	54	81	106	71	44	34	82	46	530
3. Sekolah Menengah Pertama	5	14	15	26	43	17	13	24	22	18	195
4. Sekolah Kejuruan Pertama	1	4	—	5	9	4	2	2	3	4	34
5. Madrasah Tsanawiyah	1	1	7	10	10	12	5	2	13	9	72
6. Sekolah Keguruan	—	6	—	1	3	2	2	2	2	2	20
7. Sekolah Menengah Atas	1	13	5	9	10	5	5	5	8	7	68
8. Sekolah Kejuruan Atas	—	4	—	1	1	4	1	1	2	1	15
9. Madrasah Aliyah	—	1	—	1	1	3	1	—	2	—	9
10. Pendidikan Guru Agama	—	1	1	3	21	4	3	3	6	5	47
Total	32	108	211	357	568	354	181	220	352	303	2.686

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh : *Aceh Dalam Angka 1977*, hal. 102 — 116.

Bab III

PEMBANGUNAN WILAYAH

A. PERWILAYAHAN DAN TIPE-TIPE PEMBANGUNAN WILAYAH.

Kebijaksanaan pembangunan di daerah Aceh pada dasarnya di-landasi oleh pokok - pokok pemikiran yang dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Jangka Panjang, yaitu meliputi jangka waktu 25-30 tahun. Pola Umum disusun berdasarkan Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945, dan Garis - Garis Besar Ha-luan Negara. Itu memperlihatkan beberapa ciri, seperti bersifat umum, normatif, langgeng, serta merata dan menyeluruh (Bappeda 1978.hal 3).

Walaupun yang termuat dalam pola umum itu hanya garis - garis besarnya saja, tetapi punya arti strategis bagi pencapaian tujuan - tujuan yang telah dirumuskan untuk masing - masing jangka waktu tertentu.

Norma - norma yang telah ditetapkan diharapkan akan dapat terwu-jud dimasa mendatang bagi terlaksananya pertumbuhan dan kemaju-an yang bersifat dinamis dalam suasana masyarakat yang stabil.

Dengan demikian semua yang dirumuskan dalam pola umum itu akan dapat berlaku untuk jangka waktu lama dan sesuai dengan per-kembangan lingkungan. Sedangkan pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara merata dan menyeluruh, meliputi semua bidang di-setiap wilayah sehingga tercapai kemajuan yang relatif seimbang.

Prinsip pemerataan pembangunan yang menyeluruh untuk setiap wilayah dalam jangka panjang dimaksudkan agar sistem alokasi po-teni sumber daya alam yang dimiliki masing - masing wilayah dapat di daya gunakan secara optimal. Pendekatan pembangunan dengan prinsip demikian merupakan konsepsi dasar dari apa yang di nama-kan perencanaan pembangunan wilayah. Perwilayahan pembangun-an berarti pengelompokan secara terpadu beberapa daerah adminis-tratif ke dalam suatu wilayah pembangunan. Kebijakan penge-lompokan umumnya didasarkan kepada prinsip homogenitas, kesera-sian geografis, saling mengisi dan saling memperkuat diantara berba-gai wilayah. Kriteria ini dipergunakan bagi penentuan wilayah pem-bangunan di daerah Aceh.

Pola dasar Repelita III Daerah Istimewa Aceh (Bappeda, 1978,

hal.28) menyebutkan empat kriteria utama yang diperlukan dalam menentukan karakteristik yang seragam dalam pola produksi, konsumsi, lingkungan geografis, iklim, serta penyebaran dan kepadatan penduduk.

Kedua prasarana ini baik laut, darat maupun udara, serta fasilitas jasa distribusi masing - masing wilayah. Ketiga sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung sesuatu wilayah. Keempat berdasarkan kriteria batas - batas administratif sesuatu wilayah.

Kecuali kriteria yang telah disebutkan itu, perwilayahan pembangunan di daerah Aceh juga dihubungkan dengan empat hal lainnya, seperti arus migrasi penduduk, arah dan penggunaan prasarana perhubungan (darat dan laut), serta jangkauan yang dapat dicakup oleh sesuatu wilayah.

Pola perwilayahan yang di ajukan oleh Hariri Hady (1972.hal.23) terutama berdasarkan kepada topografi, penyebaran penduduk, dan penyebaran kegiatan ekspor. Berdasarkan ketiga faktor itu, daerah Aceh dapat dibagi menjadi tiga wilayah pembangunan. Wilayah pertama terdiri atas Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kodya Banda Aceh, dan Kodya Sabang. Keempat daerah tersebut terletak pada bagian ujung Pulau Sumatera, dan didiami oleh 576.800 jiwa (Tabel III.1).

Pintu gerbang dan sentra kegiatan ekonominya adalah Uleelheue, terletak di daerah Aceh Besar dan berhadapan langsung dengan pelabuhan bebas Sabang. Ekspor melalui pelabuhan Uleelheue dalam tahun 1969 dan 1970, masing - masing bernilai 389.000 dan 607.800 US Dolar (Tabel III.2).

Sedangkan impornya untuk masing - masing tahun tersebut bernilai 603.245,37 dan 658.414,65 US Dolar (Tabel III.3).

Wilayah pembangunan kedua meliputi kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah dan Aceh Timur. Ketiga wilayah kabupaten itu terletak pada bagian pantai timur, dan penduduknya berjumlah 857.400 orang. Pintu gerbang dan sentra kegiatan ekonominya adalah Lhokseumawe, terletak di kabupaten Aceh Utara. Kecuali itu pelabuhan Kualalangsa di kabupaten Aceh Timur tergolong pula sebagai pelabuhan ekspor kedua di Aceh (Tabel III.2).

Dilihat dari segi kepentingan ekonomi, Kabupaten Aceh Timur sebetulnya sudah merupakan bagian ekonomi daerah Sumatera Utara.

Kegiatanekspor melalui pelabuhan Lhokseumawe selama tahun 1969 dan 1970 masing - masing bernilai 3.717,300 dan 4.959,100

US Dolar. Sedangkan dari pelabuhan Kualalangsa selama kedua tahun tersebut di ekspor barang-barang seharga 2.535,500 dan 1.911,900 US Dolar (tabel III.2).

Nilai impor melalui pelabuhan Lhokseumawe selama tahun 1969 adalah 140.734,70 US Dolar, dan selama tahun 1970 bernilai 253.257,57 US Dolar.

Selain dari itu pelabuhan Kualalangsa untuk tahun 1969 nilai impornya berjumlah 52.606,56 US Dolar, sedangkan untuk tahun 1970 meningkat menjadi 125.778,31 US Dolar (Tabel III.3).

Wilayah pembangunan ketiga meliputi kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara. Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Selatan, terletak pada daerah pantai barat Aceh. Pelabuhan terpenting dan sentra kegiatan ekonominya adalah Meulaboh, terletak di kabupaten Aceh Barat.

Sedangkan kabupaten Aceh Tenggara berorientasi ke Sumatera Utara.

Namun begitu di wilayah ketiga tersebut masih dijumpai pula beberapa pelabuhan lainnya, yaitu Tapaktuan, Sinabang, Susoh, dan Kecuali Sinabang, pelabuhan - pelabuhan yang lainnya itu kesemuanya terletak di kabupaten Aceh Selatan. Jumlah penduduk di wilayah ketiga ini 597.800 orang. Nilai ekspor melalui pelabuhan Meulaboh dan yang lainnya selama tahun 1969 adalah 2.122.600 US Dolar (Tabel III.2). Sedangkan nilai impor melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut selama tahun 1969 berjumlah 426.704,02 US Dolar dan selama tahun 1970 berjumlah 201.270,11 US Dolar (Tabel III.3).

Berdasarkan berbagai keadaan diatas, wilayah pembangunan pertama dan kedua merupakan daerah - daerah yang relatif maju dibandingkan dengan wilayah pembangunan ke III. Ini dapat dipahami karena lokasi wilayah pembangunan ketiga terletak pada pantai barat yang relatif sepi dari berbagai kegiatan perdagangan. Sebaliknya pantai timur terletak menghadap ke jalur perdagangan yang ramai di kawasan selat Sumatera mempunyai banyak peluang untuk dapat lebih berkembang. Kecuali itu, penduduk pantai barat amat jarang, meliputi daerah yang relatif lebih luas (Hariri Hady, 1972.hal.42). Penduduk yang terbatas jumlahnya dan lokasi penyebarannya yang luas merupakan hambatan terpenting bagi daerah-daerah di pantai barat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Walaupun begitu menurut Hariri Hady (1972. hal.23), topografi

Aceh relatif tidak banyak menimbulkan kesulitan dalam usaha mengatur pembangunan di daerah tersebut, terutama bila dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Indonesia.

B. WILAYAH PEMBANGUNAN PELITA II

Pola perwilayahan pembangunan daerah Aceh yang dikembangkan selama Pelita kedua (Peta III.1) menggunakan kriteria yang berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Hariri Hady. Pembagian wilayah pembangunan di Aceh selama Pelita kedua didasarkan kepada tujuan agar pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah dan dapat mencapai sasarnya. Penentuan batas-batas wilayah pada dasarnya ditentukan menurut kesamaan dalam potensi dan sumber - sumber yang tersedia, kemungkinan - kemungkinan pengembangannya, serta pola perdagangan (Hasan Basry, 1978.hal.3-4). Dengan menggunakan keempat kriteria itu, daerah Aceh dibagi kedalam empat wilayah pembangunan.

Wilayah pembangunan pertama terdiri atas kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tenggara. Produksi utama adalah karet, kelapa sawit dan padi.

Pemasaran produksinya berorientasi ke Sumatera Utara. Masalah yang dihadapinya adalah kurang adanya peremajaan tanaman perdagangan, seperti karet dan kelapa sawit, di samping prasarana perhubungan darat relatif masih jelek terutama di kabupaten Aceh Tenggara.

Wilayah pembangunan kedua meliputi kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat. Hasil utama adalah padi, cengkeh, pala, kayu, kelapa sawit dan minyak nilam. Pusat kegiatan ekonomi terletak di Meulaboh. Diperkirakan Blangpidie mempunyai potensi yang relatif besar untuk berkembang sebagai pelabuhan bagi wilayah pembangunan tersebut di masa mendatang. Masalah yang dihadapinya adalah jumlah penduduk relatif kecil dan prasarana perhubungan darat dan laut masih sangat terbatas dan jelek.

Wilayah pembangunan ketiga meliputi kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tengah, serta sebagian Aceh Timur. Hasil utama adalah kopi, dan kelapa.

Pusat kegiatan ekonomi terletak di kota pelabuhan Lhokseumawe. Disamping itu tanaman produksinya sudah tua. Ada beberapa tempat misalnya Lhokseumawe dan Bireuen terdapat potensi yang cukup besar untuk dapat berkembang sebagai daerah industri.

Wilayah pembangunan keempat meliputi kabupaten Aceh Besar, Pidie, kotamadya Banda Aceh, dan Sabang serta sebagian dari kabupaten Aceh Barat. Hasil utama berupa padi, cengkeh, dan ternak. Pintu gerbang pemasaran melalui Banda Aceh, Kruengraya, dan Sabang. Potensi pengembangan wilayah ini umumnya terletak pada produksi bahan makanan, peternakan, dan industri semen di Lhoknga. Pelabuhan Sabang yang sudah mempunyai fasilitas sebagai pelabuhan bebas, tampaknya sangat tepat untuk dapat diarahkan menjadi kawasan industri.

C. WILAYAH PEMBANGUNAN PELITA III

Dalam Pelita ketiga, daerah Aceh dibagi menjadi empat wilayah pembangunan. Jika dibandingkan dengan Pelita Kedua kebijaksanaan perwilayahan daerah Aceh untuk Pelita ketiga menampakkan beberapa perbedaan (Bandingkan Peta III.2 dengan Peta III.1). Batas - batas administrasi lebih diperhatikan pada pola perwilayahan pembangunan daerah Aceh untuk Pelita Ketiga.

Berikut ini dikemukakan tipe - tipe wilayah pembangunan di daerah Aceh, serta ciri - ciri utamanya.

1. Wilayah pembangunan pertama

Wilayah pembangunan pertama ini meliputi kabupaten Aceh Timur, dan Aceh Tenggara. Luasnya 17.395 Km², terbagi menjadi 25 kecamatan, 99 kemukiman, dan 966 kampung. Berdasarkan angka proyeksi, pada tahun 1979, wilayah pembangunan pertama ini diperkirakan didiami oleh 533.949 orang dengan tingkat kepadatan penduduk rata - rata per km² 67,86 orang (aceh Timur), dan 12,86 orang (Aceh Tenggara). Kedua Kabupaten tersebut dibatasi oleh pegunungan Alas, tanpa ada jalan raya langsung yang menghubungkannya, kecuali melalui wilayah Sumatera Utara.

Jarak di antara kedua ibukota kabupaten lebih kurang 389 km.

Dalam Pelita ketiga pembangunan wilayah pertama ini lebih dititik beratkan kepada usaha peningkatan produksi bahan pangan, perkebunan rakyat, perkebunan besar, perikanan, pertambangan dan industri (T.Risyad, et al.1979.hal.17). Produksi bahan pangan utama di wilayah pembangunan ini meliputi padi, palawija, dan hortikultura. Dalam produksi padi kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tenggara masing - masing menempati kedudukan keenam dan ketiga pada komposisi daerah - daerah penghasil padi di Aceh (Kantor

Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, 1977,hal.301), dan itu merupakan produksi dari areal persawahan seluas 18.860 hektar (Aceh Timur), dan 17.660 hektar (Aceh Tenggara). Tidak kurang dari 54,31 % areal persawahan di Aceh Timur merupakan sawah tadah hujan, dan selebihnya 4.329 hektar menggunakan sistem pengairan semi teknis, dan 4.320 hektar dengan pengairan sederhana.

Sedangkan tanah sawah di Aceh Tenggara umumnya diairi dengan sistem pengairan sederhana. Kecamatan Peurelak dan Simpang Ulin tergolong sebagai daerah penghasil padi terpenting di Aceh Timur. Untuk kabupaten Aceh Tenggara usaha penanaman padi dilakukan di tiap kecamatan. Hanya Kecamatan Badar dan Babel tercatat sebagai daerah penghasil padi yang utama.

Usaha perkebunan rakyat di wilayah pembangunan pertama dalam masa - masa Pelita mendatang lebih diarahkan kepada peningkatan produksi karet, kopi, pala, dan kemiri. Sedangkan usaha perkebunan besar lebih diarahkan kepada karet dan kelapa sawit. Karet dan kelapa sawit umumnya dihasilkan di kecamatan - kecamatan Langsa, Kuala Simpang, Peureulak, Julok Seruway, Kejuruan Muda, Karang Baru, dan Bendahara. Semua kecamatan yang disebutkan itu terletak di daerah kabupaten Aceh Timur. Produksi karet dan kelapa sawit dari kabupaten Aceh Timur masing - masing mencapai 96 % dan 42 % hasil produksi karet dan kelapa sawit daerah Aceh (Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, 1977 hal.321 dan 333). Di Kabupaten Aceh Tenggara, tanaman karet dan kelapa sawit umumnya diusahakan di kecamatan - kecamatan Babel, Lawe Sigala-gala, dan Bandar. Kecuali kedua jenis tanaman itu, ketiga kecamatan tersebut juga merupakan daerah penghasil kopi dan buah - buahan di Aceh Tenggara.

Potensi ekonomi lainnya yang penting bagi wilayah pembangunan pertama ini adalah usaha perikanan baik laut maupun darat. Perikanan laut terutama diusahakan orang di kecamatan Nurusalam (Aceh Timur), Rakit Gaib dan Lawe Alas (Aceh Tenggara).

Usaha perikanan, baik di Aceh Timur maupun Aceh Tenggara, boleh dikatakan hanya terbatas kepada memenuhi kebutuhan setempat. Untuk lebih meningkatkan produksinya di masa mendatang diperlukan bermacam - macam program seperti peningkatan sarana produksi, pengembangan pemasaran, Peningkatan prasarana penyuluhan dan pendidikan.

Sumber potensi lain yang dimiliki wilayah pembangunan pertama ini umumnya berbentuk bahan mineral seperti minyak bumi, timah

hitam, mika, tembaga, emas, dan batubara. Potensi minyak bumi yang sudah diusahakan sejak lama terdapat di Julok, Peurelak, dan Rantau Kualasimpang (Aceh Timur). Sumber timah hitam, emas, dan batubara terdapat di Kecamatan Blang Kejeran dan Kuta Panjang. Di Blang Kejeran juga terdapat sumber mika dan tembaga. Berbagai sumber bahan mineral yang terdapat di Aceh Tenggara boleh dikatakan masih dalam keadaan potensial.

Usaha perindustrian yang sudah muncul sejak lama antara lain adalah arang kayu, penggergajian kayu, kilang kelapa sawit, dan remiling karet. Di Aceh Tenggara, anyaman tikar yang merupakan hasil kerajinan tangan tradisional cukup menarik. Bahan baku untuk anyaman tersebut adalah daun pandan yang banyak tumbuh di sana. Di masa mendatang pengembangan industri hart, terpenting, kertas, dan korek api, cukup memungkinkan bagi daerah Kabupaten Aceh Tenggara karena hutan di Gayo Luas banyak ditumbuhi pohon pinus yang merupakan bahan baku terpenting untuk berbagai industri tersebut.

Pusat pengembangan utama wilayah pembangunan pertama adalah Langsa, dengan pintu gerbangnya Kualalangsa (Aceh Timur) dan Belawan (Sumatera Utara). Karena keadaan prasarana perhubungan di daerah Kabupaten Aceh Tenggara belum memberikan kemudahan serta fasilitas pelabuhan Kualalangsa yang relatif jelek, maka orientasi ekonomi wilayah pembangunan pertama lebih tertuju ke wilayah Sumatera Utara.

2. Wilayah pembangunan kedua

Wilayah pembangunan kedua meliputi Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Selatan yang terdiri dari 37 kecamatan, 178 kemukiman dan 1.259 kampung. Berdasarkan perkiraan dewasa ini kedua kabupaten itu didiami kira - kira 538.768 orang, menyebar pada wilayah seluas 21.010 km². Ini berarti kepadatan rata - rata penduduk 25,64 orang/km². Karena letaknya memanjang pada pantai Samudera Indonesia, maka wilayah pembangunan kedua ini lazim pula disebut sebagai wilayah pantai barat Aceh. Kedua wilayah kabupaten pantai barat tersebut dihubungkan oleh jalan propinsi kelas IIIA, dan pada tempat - tempat yang melintasi sungai masih dipergunakan rakit karena jembatan belum ada. Sarana lainnya adalah angkutan laut yang terselenggara tidak teratur karena tidak ada pelayaran reguler.

Pelabuhan laut di wilayah pembangunan kedua ini adalah Meulaboh, Tapaktuan, Sinabang, Singkil, dan Susoh. Fasilitas belum memadai. Dalam Pelita kedua di Meulaboh juga sudah dibangun sebuah lapangan udara perintis. Pusat pengembangan wilayah pembangunan kedua ini adalah Meulaboh dengan pintu gerbangnya Susoh.

Kegiatan pembangunannya diarahkan untuk peningkatan produksi bahan pangan (beras), perkebunan rakyat, perkebunan besar, industri, dan penampungan transmigrasi (T. Risyad, *et al*, 1979 hal.17).

Dalam komposisi daerah - daerah penghasil beras di Aceh tahun 1977, kabupaten Aceh Barat dan Selatan menempati kedudukan keempat dan kelima (Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, 1977. hal.301).

Areal persawahan yang sudah diusahakan kira - kira 80.294 ha, masing - masing 56.302 ha, di Aceh Barat dan 23.942 ha di Aceh Selatan. Bagian terbesar areal itu masih merupakan sawah tadah hujan. Penggunaan sistem pengairan semi teknis diperkirakan mencakup 915 ha (Aceh Barat), dan 3.431 ha (Aceh Selatan), sedangkan sistem pengairan sederhana dapat menjangkau 12.507 ha (Aceh Barat) dan 8.945 ha (Aceh Selatan). Daerah penghasil padi utama di kabupaten Aceh Barat antara lain adalah kecamatan Beutong, Seunagan, Kaway XVI, Samatiga, Kuala, dan Jaya.

Pertanian padi di Aceh Selatan terutama diusahakan di kecamatan Kuala Batee, Susoh, Blang Pidie, Tangan - tangan, Manggeng, Labuhan Haji, Kluet Utara, Kluet Selatan. Hasil padinya boleh dikatakan melebihi kebutuhan konsumsi setempat, karena itu sebagian produksinya dipasarkan ke daerah - daerah lain seperti Banda Aceh, Sibolga, Padang, dan Medan.

Hasil perkebunan rakyat wilayah pembangunan kedua ini antara lain adalah karet, kelapa sawit, kelapa, cengkeh, nilam, pala, kayu dan hasil hutan lainnya, serta ternak. Tanaman karet umumnya terdapat di daerah - daerah kecamatan Samatiga, Johan Pahlawan, dan Kuala. Tanaman karet di kecamatan Kuala inilah diusahakan oleh perusahaan besar PT Socfindo. Namun sejak beberapa tahun yang lalu sudah mulai terlihat usaha untuk menggantikan tanaman karet dengan kelapa sawit. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sejak lama diusahakan PT Socfindo terdapat di Aceh Selatan. Kelapa itu umumnya ditanam seperti di daerah Kecamatan Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet, dan Pulau Simeulu.

Kecamatan yang disebutkan itu tergolong pula sebagai penghasil nilam yang penting di Aceh Barat, kecuali Pulau Simeulu. Sedang-

kan Pulau Simeulu lebih dikenal sebagai penghasil cengkeh terbesar di daerah Aceh.

Pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya umumnya terdapat di-kecamatan Woyla, Darulmakmur, Sungai Mas, Krueng Sabee, Setia Bakti, dan Jaya. Kegiatan pengolahannya dikerjakan penduduk setempat dengan menggunakan peralatan gergaji tangan. Penggunaan peralatan pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya yang lebih mekanis terdapat di kecamatan Singkil, Simpang Kanan, dan Simpang Kiri, oleh perusahaan - perusahaan besar.

Kayu untuk bahan bangunan yang dihasilkan penduduk Aceh Barat kebanyakan dipasarkan di Banda Aceh.

Penyebaran Penduduk relatif masih jarang dan lingkupan wilayah yang cukup luas ini merupakan dua alasan terpenting bagi para perencana di daerah Aceh untuk mempersiapkan wilayah pembangunan kedua ini sebagai tempat penampungan transmigrasi. Paling kurang ada dua lokasi yang sudah diteliti untuk calon proyek transmigrasi.

Pertama di Patek (Aceh Barat) yang ditargetkan seluas 10.000 ha.

Kedua di Trumen (Aceh Selatan) dengan target survainya seluas 30.000 ha (Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, 1977 hal.22).

Potensi yang juga dapat dikembangkan secara meluas di wilayah pembangunan kedua adalah usaha peternakan dan perikanan. Usaha peternakan terdapat hampir di semua kecamatan, namun yang lebih menonjol terdapat di kecamatan Kuala Batee, Blang Pidie, dan Manggeng (Aceh Selatan). Usaha peternakan yang dijalankan di Aceh Barat kebanyakan bersifat sambilan. Penangkapan ikan laut umumnya merupakan kegiatan penduduk di pesisir pantai, terutama sekali di kecamatan Singkil dan Manggeng. Akhirnya perikanan darat terdapat di kecamatan Simpang Kanan dan Simpang Kiri.

3. Wilayah pembangunan ketiga

Wilayah pembangunan ketiga meliputi kabupaten Aceh Utara, dan Aceh Tengah, dengan pusat pengembangan dan pintu gerbangnya Lhokseumawe. Wilayah ini terletak pada pantai selat Sumatera dan membujur jauh kepedalaman hingga berbatasan dengan wilayah pembangunan kedua. Daratannya seluas lebih kurang 10.030 km². (4.755 km² daerah Kabupaten Aceh Utara dan 5.275 km² daerah Kabupaten Aceh Tengah).

Adapun struktur administrasi pemerintahan keseluruhan wilayah ter-

bagi atas 29 kecamatan, 115 kemukiman, dan 1598 kampung. Di antara unit - unit administrasi pemerintahan tersebut, 23 kecamatan, 90 kemukiman dan 1432 kampung terletak didaerah kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 1979 diperkirakan jumlah penduduknya sekitar 707.435 orang terdiri dari 566.478 orang di daerah Aceh Utara dan 140.957 orang di Aceh Tengah. Ini berarti bahwa secara geografis tingkat kepadatan penduduk rata - rata per km². 119,13 orang di Aceh Utara, dan 26.73 orang di Aceh Tengah.

Arah pembangunan wilayah ketiga ini pada tahun - tahun mendatang, dititik beratkan kepada bidang produksi bahan pangan, perkebunan rakyat, pariwisata, perkebunan besar, peternakan, dan penampungan transmigrasi (T. Risyad, et al, 1979. hal 18). Areal persawahan yang tersedia di Aceh Utara diperkirakan 61.440 ha, meliputi 14.908 ha sawah berpengairan semi teknis, 10.822 ha sawah berpengairan sederhana, dan 35.700 ha sawah tadah hujan. Areal persawahan yang terdapat di Aceh Tengah diperkirakan 8.925 ha, terdiri 7.590 ha berpengairan sederhana, dan 1.335 ha sawah tadah hujan.

Kabupaten Aceh Utara dapat menjadi daerah penghasil padi kedua di Aceh, sedangkan Aceh Tengah pada kedudukan ke delapan, yaitu sebelum Sabang (Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh 1977. hal 301). Bahan pangan lainnya yang dihasilkan adalah ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, jagung, dan sayur mayur.

Dalam masa - masa pelita mendatang usaha perkebunan rakyat dititik beratkan kepada peningkatan produksi kopi, kopra, dan tebu. Kecuali itu wilayah pembangunan ketiga juga menghasilkan tembakau dan hasil perkebunan rakyat lainnya, seperti karet dan pinang. Kopi dan tembakau dihasilkan di Aceh Tengah yang merupakan kegiatan ekonomi penduduk di semua kecamatan. Areal tanaman kopi di Aceh Tengah diperkirakan seluas 14.919 ha. Usaha perkebunan besar yang sudah sejak lama menghasilkan yaitu pinus dan tebu. Areal tanaman pinus markusii di Aceh Tengah kira - kira 150.000 ha. dan bagian terbesar dari areal tersebut diusahakan oleh PNP I. Perkebunan tebu yang besar terdapat di Aceh Utara dan hasilnya diolah oleh Pabrik Gula Cot Girek.

Pada umumnya pengolahan tebu di Aceh Tengah dilakukan secara tradisional. Setelah dibangun Pabrik Gula Mini (PGM) di kecamatan Silih Nara (Peresmian tanggal 17 Oktober 1979), intensifikasi tanaman tebu rakyat makin terangsang.

Potensi industri yang akan dikembangkan adalah gas alam cair

(liquidified natural gas, petro kimia, pupuk urea, kertas, serta pengolahan kayu dan bahan bangunan. Proyek gas alam yang terletak di Aron Aceh Utara mulai menghasilkan sejak Maret 1977. Tingkat produksi **condensate** sejak pertengahan tahun 1978 diperkirakan mencapai 80.000 barrel sehari (Hasan Basry, 1978, hal.175).

Kemungkinan untuk membangun pabrik pupuk urea, pertengahan tahun lalu selesai disurvei. Kalau hasil penelitian tersebut menunjukkan kelayakan pembangunannya, maka proyek pupuk urea amonia di Aceh direncanakan akan mempunyai daya produksi 570.000 metrik ton urea dan 360.000 metrik ton amonia per tahun,

Industri yang telah berkembang di wilayah ketiga ini meliputi pabrik minyak kelapa, pabrik gula, kilang padi, pandai besi, pembuatan garam rakyat, pabrik kopi, dan cold storage. Pabrik paku, kawat duri, dan pabrik korek api pernah dikembangkan di daerah kecamatan Bireuen, tetap karena keterbatasan modal dan management usaha industri itu terhenti.

Usaha pengembangan peternakan sudah dimulai dengan pengadaan fasilitas-fasilitas **Holding Ground** di Cunda, Aceh Utara. Areal peternakan akan di daerah kecamatan Timang Gajah di Aceh Tengah. Usahanya sudah mulai tampak seperti pembangunan pilot proyek dan pembibitan rumput di Blang rakal. Pada tempat-tempat lain juga terdapat usaha peternakan secara kecil-kecilan. Dewasa ini hewan ternak besar termasuk salah satu komoditi ekspor terpenting melalui pelabuhan Lhok Seumawe.

Pengembangan potensi pariwisata akan dipusatkan di Danau Laut Tawar Aceh Tengah. Keindahan alamnya dapat merupakan objek pariwisata yang cukup menarik. Pembangunan untuk mendedayakan potensi pariwisata meliputi penataan tempat rekreasi di Danau Laut Tawar, tempat peristirahatan di Singgah nata, dan tempat permandian air panas di Simpang baliq.

4. Wilayah Pembangunan keempat.

Wilayah pembangunan keempat meliputi kotamadya Banda Aceh, kotamadya Sabang, Kabupaten Aceh Besar, dan Pidie. Pusat pengembangan utama untuk wilayah ini adalah Banda Aceh, dan pintu gerbangnya pelabuhan Malahayati (Krueng Raya). Keempat daerah yang tergabung menjadi wilayah pembangunan keempat ini terletak paling ujung di bagian utara pulau Sumatera. Luasnya lebih kurang 6.655 km², terdiri atas 11,08 km² Kotamadya Banda Aceh, 200 km² daerah Kotamadya Sabang, 3.028,92 km² daerah Aceh

Besar, dan 3.415 km² daerah Pidie. Pada tahun 1979, wilayah pembangunan ini didiami kira-kira 629.397 orang, menyebar di Kotamadya Banda Aceh sebanyak 66.262 orang, di Sabang 19.999 orang, di Aceh Besar 215.652 orang, dan di Pidie 327.454 orang. Kepadatan penduduk rata-rata adalah 94,58 orang per km². Dalam struktur administrasi pemerintahan, Kotamadya Banda Aceh terbagi menjadi 2 kecamatan dan 23 kampung; kotamadya Sabang terbagi atas 4 kemukiman dan 18 kampung; Kabupaten Pidie meliputi 23 kecamatan, 127 kemukiman, dan 948 kampung.

Potensi pengembangan wilayah keempat ini ditekankan kepada peningkatan produksi bahan pangan, perkebunan rakyat, peternakan, pertambakan, perindustrian, pariwisata, dan perikanan laut (T. Risyad et al, 1979. hal. 18). Peningkatan produksi bahan pangan dalam masa Pelita ketiga akan lebih dikhususkan kepada beras, palawija, dan holtikultura. Kabupaten Pidie adalah penghasil beras terpenting di Aceh.

Areal persawahan yang sudah berfungsi di kabupaten tersebut meliputi 27.300 ha, terdiri atas 2.425 ha sawah yang berpengairan semi teknis, 22.505 ha sawah berpengairan sederhana, dan 2.360 ha tadah hujan. Tanaman palawija dan holtikultura yang diusahakan penduduk secara kecil-kecilan dan tersebar merata di semua kecamatan di kabupaten Pidie dan Aceh Besar selama ini meliputi bawang merah, lombok, terong, tomat, mentimun, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, kacang kedele, dan belinjo.

Pengembangan usaha perkebunan rakyat dalam Pelita lebih diarahkan kepada cengkeh, kopi dan kopra. Sekarang ini penanaman cengkeh terutama dipusatkan di Kotamadya Sabang, Kecamatan Lhok Nga, Lhong/Leupung, dan Peukan Bada. Tanaman kopi terdapat di Kecamatan Tangse, Geumpang, Meureudu, dan Keumala. Adapun daerah penghasil kelapa utama terdapat di Kecamatan Lhok Nga, Lhong/Leupung, Peukan Bada, Mesjid Raya, Darul Imarah, Ingin Jaya, Darusalam, Kotabaru, Montasiek, Kutamakmur, dan Indrapuri. Usaha perkebunan lada, kapuk, tebu, dan pinang juga termasuk sumber mata pencaharian hidup tambahan yang penting artinya, terutama bagi penduduk di Kabupaten Pidie. Tanaman lada diusahakan di Kecamatan Bandar Baru, Padang Tiji, Sakti dan Delima. Adapun usaha penanaman tebu dilakukan penduduk di Kecamatan Pidie dan Peukan Baro.

Potensi pengembangan peternakan terdapat di daerah-daerah

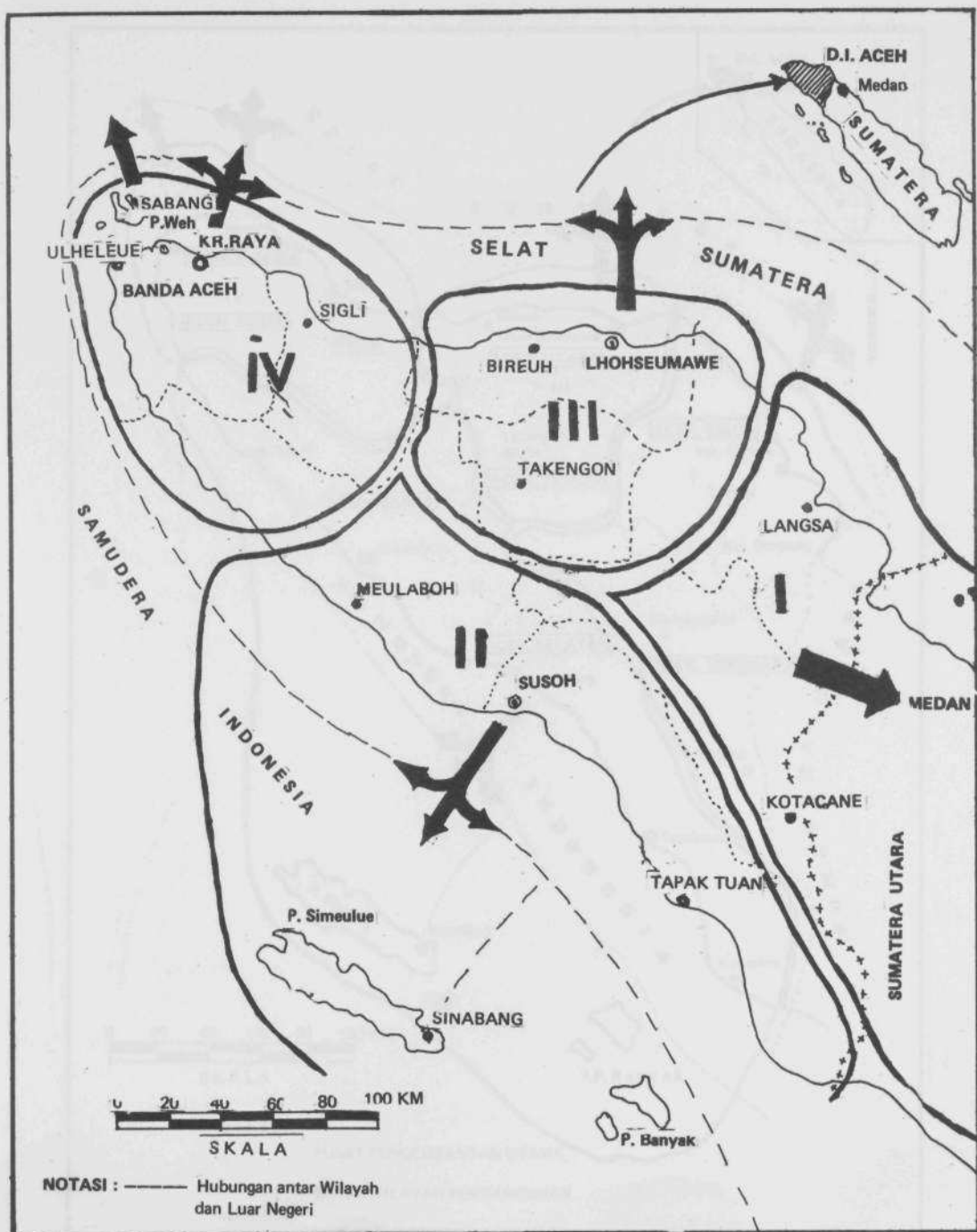
Kecamatan Geumpang, Tangse, dan Muara Tiga (Pidie), serta Sarce dan Krueng Raya (Aceh Besar). Sedangkan usaha perikanan darat dapat dikembangkan didaerahdaerah Kecamatan Meureudu, Bandar Dua, Trieng Gading, Ulim, Glumpang Tiga, Pante Raja, Keumbang Tanjong, Bandar Baru, Simpang Tiga, Kota Sigli, Padang Tiji, Batee, Muara Dua, dan beberapa kecamatan lain di Aceh Besar. Adapun penangkapan ikan laut diusahakan penduduk di Kecamatan Meureudu, Bandar Dua, Trieng Gadeng, Pante Raja, Ulim, Bandar Baru, Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Kota Sigli, Batee, Muara Tiga, Sabang dan Krueng Raya. Rupanya sistem penangkapannya di daerah ini dapat diusahakan secara lebih modern. Bahkan di Sabang sudah dibangun sebuah industri perikanan seperti PT. Perikanan Samudera Besar.

Jenis-jenis industri yang dapat dikembangkan diwilayah pembangunan keempat ini antara lain adalah semen, kerajinan tangan, dan industri pengolahan. Pembangunan pabrik semen telah direncanakan dan akan dikerjakan dalam masa Pelita Ketiga yang berlokasi di Lhok Nga. Bahan bakunya berupa batu kapur yang jumlahnya relatif besar didaerah ini.

Industri rumah tangga berupa anyaman tikar terdapat di Kecamatan Muara Tiga dan Meureudu, sedangkan industri keramik terdapat di Kecamatan Pidie dan Indra Jaya. Usaha penggaraman dikerjakan penduduk di daerah Kecamatan Pidie, Simpang Tiga, Darusalam, dan Mesjid Raya. Adapun kerajinan tangan berupa pembuatan tali sabut terdapat di Kecamatan Darusalam dan Mesjid Raya.

Tipologi wilayah pembangunan didaerah Aceh secara sepintas sudah diungkapkan diatas. Tampak menonjol adalah tipologi pertanian, terutama yang memproduksi bahan pangan. Tipologi tersebut terdapat pada setiap wilayah pembangunan. Kemudian menyusul tipologi perikanan, terutama pada daerah daerah yang terletak di pantai Selat Sumatera. Salah satu masalah yang merisaukan para perencana di daerah Aceh, baik dahulu maupun kini bahkan juga untuk masa-masa mendatang, adalah terbatasnya prasarana dan sarana angkutan darat, serta fasilitas pelabuhan yang tidak memenuhi persyaratan. Jaringan jalan yang ada ini adalah bekas peninggalan kaum penjajah Belanda yang dirawat secara tambal sulam. Menurut penilaian para perencana pembangunan daerah Aceh, hal tersebut tidak dapat memuaskan karena jaringan jalan itu dibangun untuk kepentingan strategi militer kaum penjajah

(Buku Repelita Ketiga Daerah Istimewa Aceh, 1979. hal. 43). Disamping itu, daerah Aceh juga menghadapi kelemahan atau keterbatasan fasilitas-fasilitas sosial, politik, budaya, pemerintahan, dan keamanan. Kesemuanya merupakan hambatan terpenting dan perlu diselesaikan secara tepat dan berdaya guna. Tanpa itu sulit untuk dibayangkan bahwa hubungan komplementaritas dan saling ketergantungan di antara wilayah-wilayah pembangunan itu akan bisa terjalin secara baik. Begitu juga akan sulit untuk diselaraskan pengembangan program-program yang memiliki nilai-nilai ekonomi yang strategis dengan sektor-sektor lainnya.



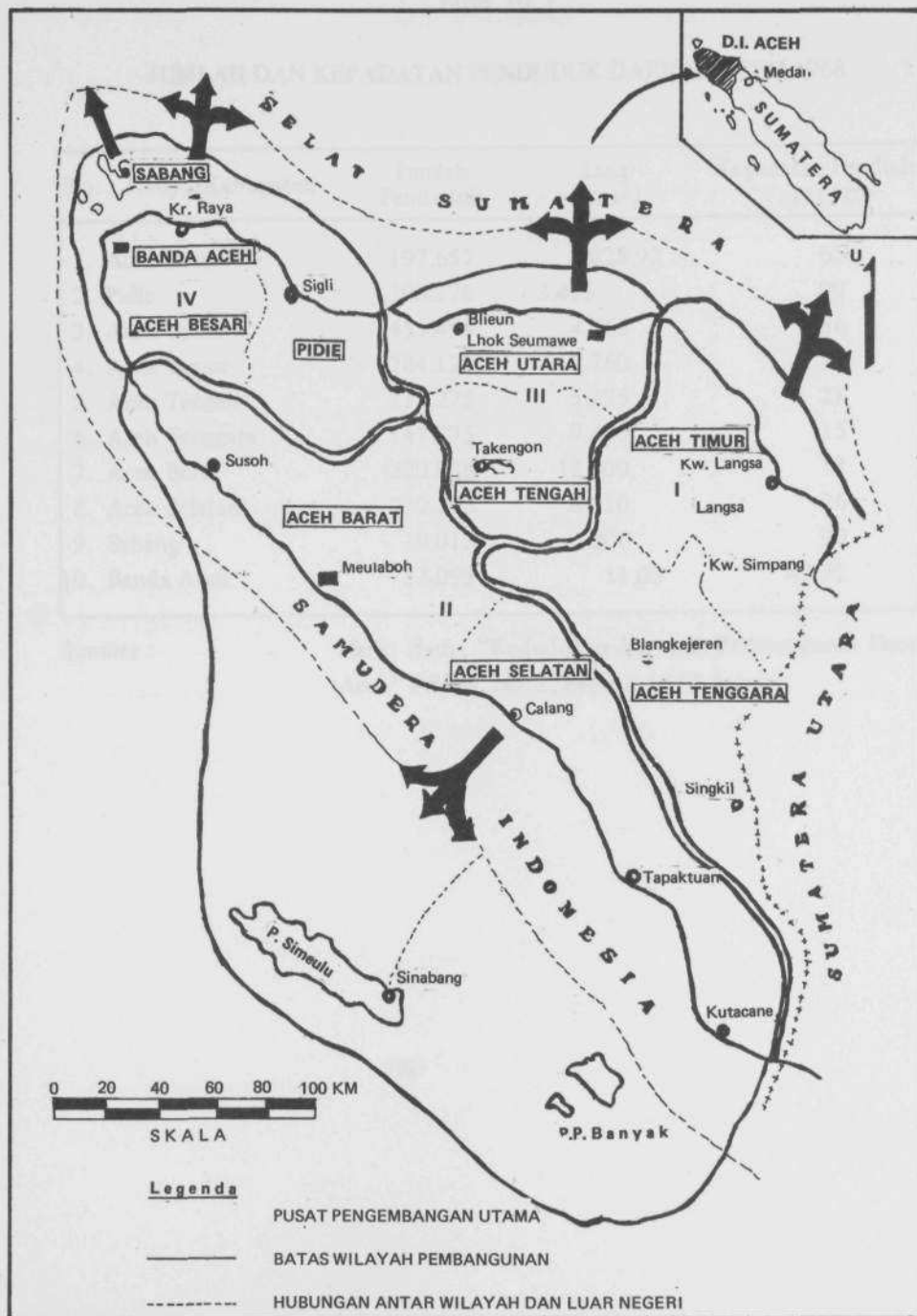
sumber : Repelita II Daerah Istimewa Aceh

Peta III.1. WILAYAH PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH



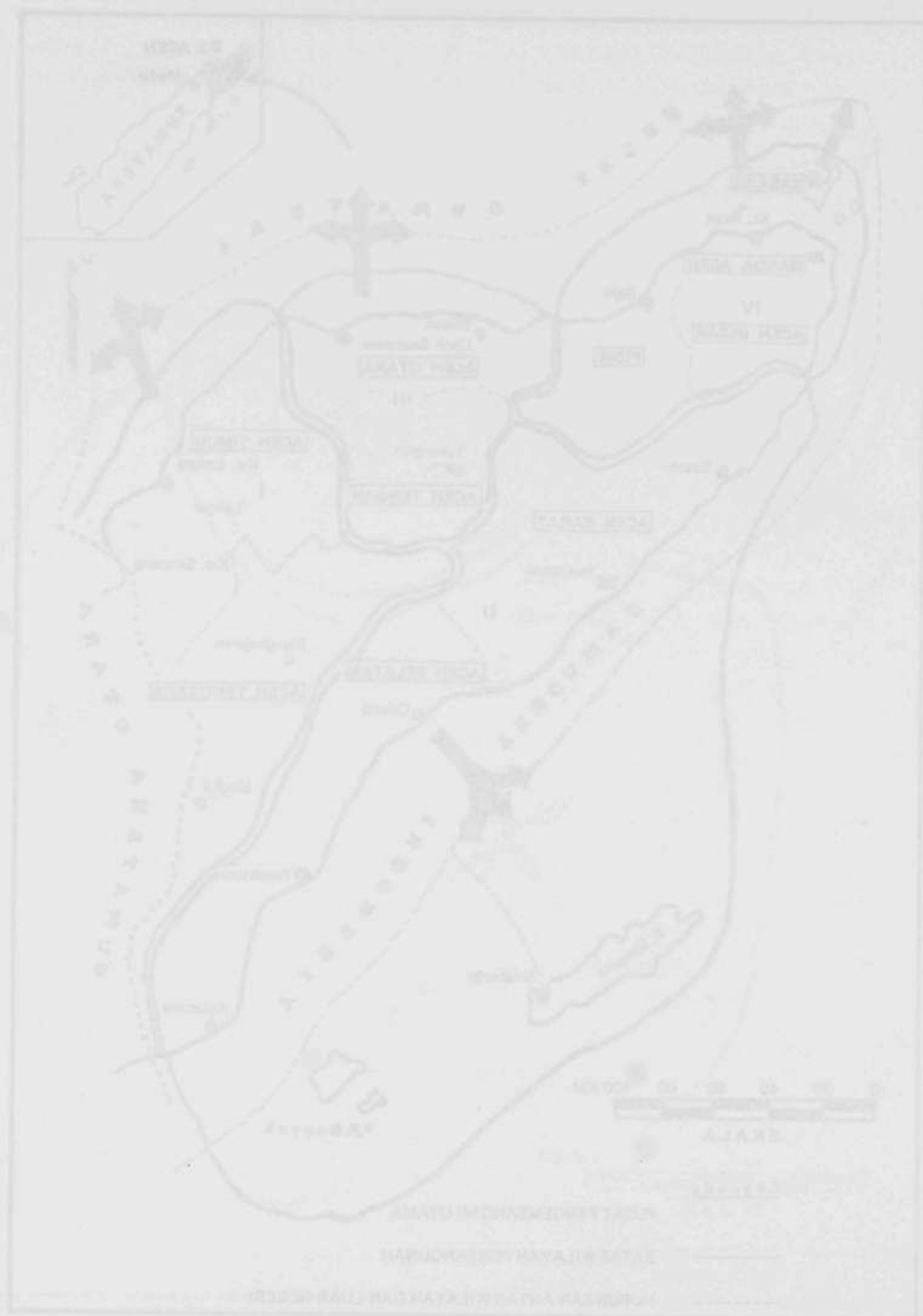
Gambar 1. Peta Wilayah Aceh

DAFTAR LAMPIRAN



Sumber : Repelita III Daerah Istimewa Aceh

Peta III.2. WILAYAH PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH



Tabel III. 1

JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK DAERAH ACEH 1968

No.	Kodya/Kabupaten	Jumlah Penduduk	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Aceh Besar	197.657	3.028,92	65
2.	Pidie	308.178	3.415	90
3.	Aceh Utara	455.495	4.755	86
4.	Aceh Timur	284.127	7.760	37
5.	Aceh Tengah	117.275	5.275	21
6.	Aceh Tenggara	147.775	9.635	15
7.	Aceh Barat	220.038	12.100	18
8.	Aceh Selatan	230.153	8.910	26
9.	Sabang	18.015	200	90
10.	Banda Aceh	53.099	11,08	4.792

Sumber :

Hariri Hady, "Kedudukan dan Arah Pembangunan Daerah Aceh" *Prisma*, No. 2, Pebruari 1972, hal. 25.

Tabel III. 2

EKSPOR DAERAH ACEH MENURUT PELABUHAN ASAL, 1969 - 1970

PELABUHAN	1969		1970	
	Volume (1000 KG/M ³)	Nilai (US 1000)	Volume (1000 KG/M ³)	Nilai (US 1000)
Lhokseumawe	17.689,2	3.717,3	18.685,5	4.959,1
Belawan (Ex.Aceh)	—	—	17.992,1	3.640,5
Kuala Langsa	12.515,3	2.535,5	14.717,0	11.911,9
Meulaboh	12.238,9	1.761,7	2.440,5	995,3
Singkel	18,6	136,0	67,7	743,2
Ulee Lheue	790,0	389,0	831,7	607,8
Sinabang	1.089,0	202,5	1.056,0	181,2
Tapaktuan	140,0	22,4	—	—
Jumlah	45.266,71 KG	8.789,7 20,8 M ³	55.723,9 KG 102,6 M ³	13.090,4

Sumber : Dinas P2D Perwadepdag, Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Tabel III. 3

NILAI IMPOR DAERAH ACEH MENURUT PELABUHAN IMPOR 1969 - 1970

Pelabuhan Impor	Nilai			
	1969		1970	
Lhokseumawe	US	140.734,70	US	253.257,57
Ulen Lheue	US	603.245,37	US	658.414,65
Langsa	US	52.606,56	US	125.778,31
Meulaboh	US	401.583,92	US	165.252,12
Tapaktuan	US	5.189,00	US	22.908,30
Sinabang	US	4.444,10	US	2.944,45
Susoh	US	15.487,00	US	10.165,24
Jumlah	US	1.223.280,65	US	1.309.165,64

Sumber : Perwadepdag Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1971.

BAB IV

ANALISIS KARAKTERISTIK WILAYAH PEMBANGUNAN

A. ANALISIS UNSUR LINGKUNGAN BUDAYA.

Data mengenai unsur lingkungan budaya untuk studi ini dibatasi kepada empat hal yaitu teknologi, kepercayaan/agama, ekonomi, dan organisasi sosial. Masing-masing aspek dihubungkan dengan tipologi-tipologi sub wilayah pembangunan berdasarkan bidang-bidang mata pencaharian hidup sebagaimana dijelaskan dalam bab Pendahuluan. Kemudian dibedakan lagi berdasarkan wilayah pesisir dan pedalaman. Cara mendapatkan data mengenai unsur lingkungan budaya adalah observasi, wawancara, kepustakaan, dan angket. Keempat jenis data itu dalam uraian dipergunakan secara bersamaan dan saling melengkapi. Ini dimaksudkan supaya dapat dipakai sebagai data dasar bagi keperluan analisis lebih lanjut, yaitu untuk menentukan kategorisasi masing-masing sub wilayah pembangunan diidentifikasi berdasarkan indikator-indikator unsur lingkungan budaya tertentu. Untuk setiap unsur lingkungan budaya dalam masing-masing bidang mata pencaharian hidup dipilih tiga indikator. Kriteria yang dipergunakan dalam menetapkan indikator penelitian antara lain adalah yang dalam kenyataannya amat dipentingkan oleh masing-masing bidang mata pencaharian hidup. Yang mencakup pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan.

Data yang akan ditampilkan terbatas kepada keempat bidang mata pencaharian hidup tersebut diatas karena data dibidang mata pencaharian hidup lainnya, yaitu perindustrian, dan pertambangan tidak berarti sama sekali. Artinya amat kecil persentase jumlah penduduk Aceh yang bekerja dalam bidang tersebut.

Itu sebetulnya sudah diperkirakan sejak semula. Berbagai data sekunder terutama yang berkenaan dengan susunan penduduk berdasarkan mata pencaharian hidup, selalu memperlihatkan sifat karakteristik daerah Aceh sebagai wilayah pertanian dan perikanan.

1. Teknologi dalam pertanian.

Unsur teknologi yang digunakan sebagai indikator penelitian untuk bidang pertanian terbatas kepada alat pengolah tanah, bahan penyubur tanah, dan sistem pengairan. Penggunaan peralatan

tertentu biasanya amat tergantung kepada cara berproduksi. Sistem mengolah tanah di daerah Aceh dibedakan menjadi tiga bentuk dan atau tahap, yaitu membajak, mencangkul, dan memperinjakkan. Pengolahan tanah dengan cara membajak dilakukan dengan menggunakan bajak yang ditarik oleh kerbau, sapi, atau kuda. Peralatan yang dipergunakan dalam mengolah tanah dengan cara demikian antara lain adalah luku, dan garu. Pengolahan tanah dengan memperinjakkan dilakukan dengan melepaskan sekelompok kerbau atau kuda ke sawah-sawah yang akan diolah. Cara yang demikian biasanya dilakukan pada sawah-sawah yang berlumpur, dan di daerah-daerah yang banyak dternakkan kerbau atau kuda. Kecuali itu, adakalanya memperinjakkan itu merupakan tahap melumatkan tanah sawah yang sudah dibajak atau dicangkul. Dewasa ini penggunaan traktor untuk mengolah tanah terlihat makin meluas di kalangan petani daerah Aceh.

Unsur teknologi yang menjadi indikator kedua dalam bidang pertanian adalah bahan penyubur tanah. Bahan penyubur tanah yang sudah sejak lama dipergunakan petani di daerah Aceh adalah **baja** (pupuk kandang), yang biasanya berupa kotoran hewan ternak sapi, kambing, dan bebek.

Abu dapur sering pula digunakan dengan maksud bukan untuk penyubur tanah, tetapi untuk mencegah tanaman padi dari gangguan hama ulat, terutama ketika padi mulai menghijau daunnya.

Jenis pupuk kandang lainnya yang juga digunakan petani walaupun dalam jumlah terbatas adalah kotoran kelelawar. Kadang-kadang tanaman palawija yang telah membusuk dibenamkan kedalam tanah juga dipandang dapat mempersubur tanah. Semenjak program panca usaha dibidang pertanian dikembangkan, penggunaan pupuk buatan seperti urea, TSP, DAP dan NPK tampak makin meluas dikalangan petani di daerah Aceh.

Unsur teknologi lainnya yang dijadikan indikator penelitian dalam bidang pertanian adalah sistem pengairan. Terminologi teknis dalam pertanian yang acapkali membedakan sistem pengairan adalah irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan tadah hujan. Kecuali itu selama tahun-tahun tujuh puluhan ini kepada petani di daerah Aceh telah diperkenalkan pula pengairan dengan sistem pompa, walaupun dalam lingkup yang masih belum begitu meluas.

Dalam pada itu, pengairan di daerah Aceh lebih banyak didasarkan kepada cara penanaman padi yang dibedakan atas sawah

basah, sawah kering (tak ada hujan), dan ladang pertanian basah. Pengairan hanya dilakukan pada sawah basah dengan mengalirkan air kepetak-petak sawah melalui saluran air. Sedangkan pengairan untuk sawah kering dan ladang tergantung kepada curah hujan.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa ketiga unsur teknologi diatas digunakan petani di daerah Aceh, tetap dalam persentase yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya (Tabel IV. 1). Di daerah Pidie dan Aceh Timur, penggunaan ketiga jenis unsur teknologi tampak lebih menonjol dipedalaman dibandingkan dengan pesisir. Kalau ketiga unsur itu tepat dipergunakan sebagai indikator sifat karakteristik pertanian suatu wilayah, maka kehidupan bertani lebih meluas dijumpai dikalangan penduduk pedalaman kedua kabupaten itu. Sebaliknya di daerah Aceh Tengah dan Aceh Barat sifat karakteristik pertanian lebih jelas tampak di daerah pesisir. Adanya perbedaan tersebut karena persentase jumlah mereka yang menggunakan pupuk jauh lebih tinggi dipesisir dibandingkan dengan pedalaman. Sedangkan dua unsur teknologi lainnya tetap terlihat lebih menonjol di pedalaman. Alasan yang kerap kali dikemukakan petani dipedalaman Aceh Tengah dan Aceh Barat tentang mengapa mereka tidak menggunakan pupuk, karena tanah garapan mereka sudah cukup subur. Bahkan kalau dipupuk hasilnya akan berkurang karena batang dan daun padi terlalu subur.

2. Kepercayaan/agama dalam pertanian.

Bidang usaha tani dikalangan penduduk daerah Aceh sulit dipisahkan dari kepercayaan atau upacara-upacara tertentu. Diantara berbagai unsur kepercayaan atau upacara yang dijadikan indikator penelitian adalah kenduri sawah, doa minta hujan, dan usaha untuk menghindarkan hama. Jenis-jenis kenduri sawah dapat dibedakan berdasarkan saat dan tujuannya, seperti kenduri ketika memulai kesawah, kenduri ketika menabur bibit, kenduri ketika menanam, kenduri ketika semua sawah selesai ditanam, kenduri ketika padi mulai bunting, kenduri setelah padi selesai digirik. Setiap upacara kenduri biasanya diiringi upacara tepung tawar yang bahannya terdiri dari dua butir telur ayam, air semangkok yang dibubur sedikit tepung beras, serta beberapa jenis dedaunan. Dedaunan itu digabungkan menjadi satu ikatan, dan dengan ikatan itu air dalam mangkok dipercikkan kebatang padi atau obyek yang hendak ditepung tawarkan.

Upacara minta hujan dilakukan dengan mengerjakan dua rakaat sembahyang minta hujan secara bersama-sama ditanah lapang atau pun berdoa bersama di **meunasah** (langgar) atau mesjid setelah sembahyang fardhu. Cara lain yang masih ada dilakukan adalah dengan berkunjung beramai-ramai ketempat kuburan orang yang dipandang keramat. Ditempat itu mereka menyembelih sapi atau kambing, kemudian mereka masak dan makan bersama.

Untuk mencegah meluasnya hama **bana** (semacam cendawan) pada tanaman padi pada masa dahulu, petani biasanya menancapkan dahan sejenis pohon ditengah sawahnya. Hal yang sama juga dilakukan kalau tanaman padi terserang hama ulat. Penancapan itu dilakukan setelah sawah dikeringkan terlebih dahulu. Cara lain untuk menghindari hama tikus dan walang sangit adalah memasang jimat. Jimat itu berupa secarik kertas, bertuliskan ayat-ayat Al Quran atau doa-doa tertentu yang dimasukkan kedalam sepotong oambu dan diletakkan disawah. Kedua cara itu sekarang jarang dikerjakan karena penggunaan racun pencegah hama makin populer.

Data lapangan dari studi ini tampak pada Tabel IV . 2. Upacara kenduri sawah masih melekat pada sistem bertani di daerah-daerah di Aceh. Tapi sebaliknya upacara minta hujan dan usaha menghindari hama pada beberapa daerah, kecuali Aceh Tengah, sudah tidak dilaksanakan lagi. Para petani di Aceh Tengah baik pedalaman maupun pesisir tampaknya masih tetap kuat bertahan dengan kedua indikator yang disebutkan terakhir, yaitu upacara minta hujan dan usaha mencegah hama. Tetapi sebaliknya kenduri sawah secara berangsur mulai ditinggalkan. Merosotnya penyelenggaraan upacara minta hujan dan usaha pencegahan hama pada beberapa daerah, diduga ada kaitannya dengan makin berfungsinya sistem pengairan yang lebih bersifat setengah teknis dan makin meluasnya penggunaan racun pencegah hama. kalau dengan ini benar salah satu kesimpulan bisa diambil bahwa penerapan unsur-unsur teknologi kiranya dapat memerosotkan kepercayaan dan upacara-upacara yang bersifat tradisional. Akan tetapi, sejauh mana kebenaran dugaan ini perlu diteliti lebih lanjut.

Hal lain yang menarik untuk diungkapkan adalah kecenderungan dengan kepercayaan/upacara-upacara yang bersifat tradisional di bidang pertanian tampak lebih kentara pada petani dipedalaman (Tabel IV. 2). Diantara ketiga indikator penelitian yang dipergunakan, persentase jumlah responden yang amat menonjol terdapat di daerah pedalaman Aceh Tengah, kemudian menyusul pedalaman Aceh Timur,

dan pesisir Aceh Tengah. Masih bertahannya kecenderungan terhadap kenduri sawah pada sebagian besar responden, kiranya merupakan pencerminan latar belakang dari berbagai kegiatan atau upacara pada masyarakat di daerah Aceh umumnya. Kebanyakan upacara dikalangan mereka berlangsung dalam bentuk kenduri (makan), dan jarang terlihat adanya pidato-pidato (Adnan Abdullah, 1978. hal. 66). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upacara kenduri tergolong sebagai salah satu unsur budaya yang relatif agak sulit bergeser dari pola kehidupan masyarakat di daerah Aceh.

3. Aspek ekonomi dalam pertanian.

Indikator penelitian untuk aspek ekonomi dalam pertanian meliputi usaha tani bahan makanan sekeluarga, usaha tani perdagangan, dan sistem bagi hasil. Pertanian bahan makanan yang terpenting di daerah Aceh adalah padi. Tujuan utama dari usaha tani bahan makanan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan sekeluarga. Pemasarannya dilakukan apabila ada kelebihan dari yang diperlukan untuk konsumsi. Ini berbeda dengan tujuan usaha tani tanaman keras, yang hasilnya untuk diperdagangkan. Hasil tanaman perdagangan yang penting di daerah Aceh adalah karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, cengkeh, dan pala. Bentuk usaha tani yang disebutkan terakhir itu berupa perkebunan rakyat, dan adapula perkebunan besar. Perusahaan perkebunan besar yang dikenal secara meluas di daerah Aceh yaitu PN Perkebunan dan PT Socfindo. Usaha yang dijalankan oleh PN Perkebunan berlokasi di Kabupaten Aceh Timur, dan usaha perkebunan PT Socfindo berlokasi di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Selatan.

Sistem bagi hasil yang berlaku dalam bidang pertanian di Aceh dibedakan atas **mawah**, **siwa**, dan **upah**. Sistem **mawah** adalah biaya produksi dan hasil padi dibagi sama antara pemilik sawah dan penggarap, kecuali biaya pembajak dan menyiangi rumput menjadi tanggungan penggarap. Dalam kenyataan, sistem **mawah** sering bervariasi pelaksanaannya, yaitu bergantung kepada kepadatan penduduk, luas areal persawahan, dan fasilitas pertanian yang tersedia. Karena itu, sistem bagi hasilnya ada yang didasarkan kepada dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik tanah, tiga bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik tanah serta empat bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik tanah. Dalam sistem **siwa**, pemilik tanah menerima hasil padi sebanyak 16 **naleh**

(lebih kurang 256 kg) untuk setiap **naleh** sawah, tanpa menanggung biaya apapun. Adapun dalam sistem **upah**, petani hanya menerima upah kerja dari pemilik tanah, sedangkan seluruh hasilnya diterima oleh pemilik tanah.

Data lapangan menunjukkan bahwa indikator pertanian bahan makanan lebih menonjol dibandingkan dengan dua indikator lainnya, lebih-lebih pada daerah penelitian pedalaman (Tabel IV. 3). Kecuali di Aceh Tengah jumlah responden yang menjalankan usaha tani bahan makanan cukup tinggi persentasenya. Pada daerah penelitian di Aceh Tengah usaha tani tanaman perdagangan tampak jauh lebih tinggi persentase jumlah respondennya. Ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi bagian terbesar penduduknya dalam bidang usaha petani kopi, lebih-lebih di daerah pedalaman. Persentase jumlah responden yang mengusahakan tanaman perdagangan tampak cukup tinggi juga di daerah penelitian pedalaman Aceh Barat. Akan tetapi aspek ekonomi dalam bidang pertanian di daerah penelitian pedalaman Aceh Barat berbeda dengan Aceh Tengah. Di daerah Aceh Tengah yang lebih menonjol hanyalah indikator tanaman perdagangan. Sedangkan di pedalaman Aceh Barat, baik indikator tanaman perdagangan maupun pertanian bahan makanan tampak cukup tinggi persentase jumlah respondennya.

Berdasarkan ketiga indikator penelitian tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa aspek ekonomi dalam bidang pertanian tampak lebih kentara di daerah pedalaman Aceh Barat, kemudian menyusul dua daerah penelitian pedalaman lainnya seperti Aceh Timur dan Pidie. Kesimpulan lain bahwa yang menggunakan sistem bagi hasil dalam bidang usaha tani amat terbatas jumlahnya, yaitu 17,50 % di daerah pesisir Aceh Tengah, 12,5 % di pedalaman Aceh Timur, 10,0 % di daerah pesisir Pidie, dan 5,0 % di pedalamannya (Tabel IV. 3).

Rendahnya persentase jumlah responden yang menggunakan sistem bagi hasil kiranya dapat merupakan petunjuk lain dari kenyataan bahwa umumnya para responden petani menggarap tanah pertanian milik mereka sendiri.

4. Aspek organisasi dalam bidang pertanian.

Indikator untuk aspek organisasi sosial dalam bidang pertanian adalah BUUD/KUD, Gotong royong dan Bimas/Inmas. Lembaga BUUD/KUD tergolong unsur baru dalam konsep organisasi sosial di-

daerah Aceh. Secara formal, konsep BUUD/KUD mulai diperkenalkan kepada masyarakat lewat instruksi Presiden Nomor 4/1973. Pada tingkat kecamatan lembaga tersebut bertugas menyalurkan sarana produksi padi sehubungan dengan Program Bimas/Inmas. Selama tahun 1974 - 1977, BUUD/KUD berperan sebagai salah satu jalur pengadaan pangan yang dilakukan Depot Logistik Aceh.

Berdasarkan data dilapangan, kebanyakan responden belum melibatkan diri dengan berbagai kegiatan BUUD/KUD. Atau paling kurang mereka belum menyadari adanya peranan BUUD/KUD dalam kegiatan usaha tani mereka (Tabel IV. 4). Persentase jumlah responden yang menjadi anggota BUUD/KUD tampak agak tinggi di pesisir Aceh Tengah (32,50 %). Sedangkan di daerah penelitian Pidie dan pesisir Aceh Timur yang menjadi anggota BUUD/KUD tidak lebih dari 5,0 % . Kurang populernya BUUD/KUD dikalangan responden antara lain karena dalam mendapatkan sarana produksi pada atau ketika menjual hasilnya mereka tidak berhubungan langsung dengan lembaga koperasi tersebut tetapi melalui mata rantai pemasaran lainnya. Hasil wawancara dengan informan pangkal menunjukkan bahwa yang menjadi anggota BUUD/KUD adalah mereka yang berstatus pemimpin formal dipedesaan.

Kegiatan gotong royong masih dijalankan di Aceh Tengah, pedalaman Aceh Timur, dan pesisir Aceh Barat. Akan tetapi sudah jarang dijalankan di daerah Pidie, pedalaman Aceh Barat dan pesisir Aceh Timur karena kegiatan bertani lazim diupayakan kepada orang. Gotong royong umumnya dilakukan pada pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum saja. Sebaliknya pada daerah-daerah yang kegiatan gotong royongnya masih dilakukan para petani secara bersama mengerjakan pembersihan saluran air untuk daerah persawahan mereka atau saling membantu mengerjakan pertanian di antara sesama tetangga.

Berbeda dengan dua indikator yang disebutkan di atas, indikator Bimas/Inmas tampak amat populer di kalangan responden pedalaman Pidie. Namun Program Bimas/Inmas tidak diikuti sama sekali oleh responden pedalaman Aceh Tengah dan pesisir Aceh Barat. Perbedaan itu tampaknya berkaitan dengan kecenderungan mereka untuk menggunakan pupuk (Tabel IV. 1).

Rupanya Program Bimas/Inmas dalam pandangan responden lebih banyak dikaitkan dengan masalah penyaluran bibit unggul, pupuk, racun pencegah hama. Hanya responden pesisir Aceh Barat yang

menunjukkan persentase tinggi dalam penggunaan pupuk, tetapi tidak ikut program Bimas/Inmas.

Berdasarkan ketiga indikator penelitian aspek organisasi sosial dalam bidang pertanian, maka tampak lebih menonjol di pedalaman Aceh Timur, serta pesisir dan pedalaman Aceh Tengah. Menonjolnya aspek organisasi sosial di ketiga daerah penelitian itu terutama karena tingginya persentase jumlah responden pada indikator gotong royong. Sebaiknya dipedalaman Aceh Barat aspek organisasi sosisal dalam bidang pertanian tergolong rendah.

5. Aspek teknologi dalam bidang peternakan.

Unsur teknologi dalam bidang peternakan dibatasi kepada kandang, cara pengobatan, dan alat pemerah susu/penetas telur. Berdasarkan data lapangan ketiga indikator yang dipergunakan itu hanya dijumpai pada empat daerah penelitian yaitu Pidie dan Aceh Tengah, baik pesisir maupun pedalaman (Tabel IV. 5). Unsur teknologi yang relatif tinggi penggunaannya pada keempat daerah itu adalah kandang. Dalam bahasa Aceh, kandang yang dipergunakan untuk ternak besar disebut *weue*, dan dalam bahasa Gayo dikatakan *uwer*. Sedangkan sebutan kandang untuk ternak unggas adalah *keureupoh* (Aceh), atau *kepuhngkurik* (Gayo). Kebiasaan berternak di Aceh Timur dan Aceh Barat tanpa dibuatkan kandang, hewan ternak dibiarkan lepas secara bebas. Usaha ternak besar pada keempat daerah yang disebutkan itu, umumnya dipergunakan sebagai alat produksi dalam bertani, dan penarik bajak. Disamping itu, pemeliharaan ternak besar juga mengharapkan keturunan (anak) dan komoditi perdagangan.

Penggunaan indikator pengobatan ternak lebih menonjol di kalangan responden pedalaman Pidie. Sebaliknya di daerah pedalaman Aceh Tengah, responden tidak menggunakan cara-cara tertentu untuk mengobati hewan ternaknya. Cara pengobatan yang dipergunakan di Pidie, bila kerbau atau sapi terserang penyakit timpani cukup memberi makan bumbu masakan yang dipakai untuk memasak daging). Sedang penyakit sariawan diobati dengan memberi minum air perasan batang seruluh yang telah diperapikan. Cara untuk menjinakkan lembu adalah dengan memakamkan garam.

Hasil penelitian lapangan alat pemerah susu/penetas telur hanya diketahui bahwa indikator tersebut digunakan responden di pesisir Aceh Tengah, tapi jumlahnya tidak banyak. Hal ini ada hubungan-

nya dengan bentuk dan tujuan usaha peternakan mereka pada umumnya yaitu bukan untuk mendapatkan susu.

6. Aspek kepercayaan/agama dalam bidang peternakan.

Untuk mempelajari unsur kepercayaan/agama dalam bidang peternakan dipergunakan indikator berupa tanda-tanda hewani, penolak wabah, dan pemberian hasil ternak. Berdasarkan hasil penelitian lapangan penggunaan ketiga indikator tersebut lebih meluas di kalangan responden pedalaman Aceh Tengah. Sebaliknya amat kecil persentase jumlah responden di Pidie. Lebih-lebih di pedalaman tak seorangpun responden yang menggunakannya (Tabel IV. 6). Menurut pengamatan dan pengalaman informan pangkal, paling kurang ada empat hal yang menentukan ciri-ciri hewan ternak yang baik yaitu buntut, pinggang, wajah, dan kuku. Lembu yang besar buntutnya, panjang ekornya, dan tidak ramping pinggangnya menandakan banyak anaknya. Bila lembu yang di ternakkan itu pendek wajahnya menandakan suka makan, dan kalau memiliki kuku yang tegak menandakan bahwa lembu itu gampang digunakan untuk menarik bajak.

7. Aspek ekonomi dalam bidang peternakan.

Indikator yang menonjol untuk aspek ekonomi dalam bidang peternakan pada semua kabupaten yang diteliti adalah peternakan hewan besar dan unggas (Tabel IV. 7). Sedangkan indikator lainnya seperti sistem bagi hasil tidak memperlihatkan adanya responden yang menggunakan. Apa yang terdapat pada Tabel IV. 7 itu menarik kiranya untuk dibandingkan dengan dua tabel sebelumnya, terutama bagi daerah Aceh Timur dan Aceh Barat. Untuk kedua daerah tersebut pada kedua tabel sebelumnya tidak terlihat sama sekali indikator untuk bidang peternakan. Sedangkan pada Tabel IV. 7 indikator peternakan tampak secara menonjol. Hal ini kiranya bisa berarti bahwa usaha peternakan di kedua daerah tersebut hanya diusahakan secara bersahaja. Dan sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, potensi pengembangan wilayahnya pun tidak berhubungan dengan bidang peternakan.

8. Aspek teknologi dalam bidang perikanan.

Unsur teknologi yang dipergunakan dalam penelitian untuk bidang perikanan meliputi indikator berupa alat penangkap ikan

, perahu, dan tambak. Pada sistem penangkapan ikan di laut dikenal beberapa jenis peralatan, seperti pukat, jaring, jermal, dan pancing. Alat penangkapan ikan dalam tambak antara lain adalah *ruleue*, *jang*, *janjeue* (jala). Penggunaan ketiga indikator teknologi itu terlihat menonjol di daerah-daerah pesisir Aceh Barat, Aceh Tengah, dan Aceh Timur (Tabel IV. 8). Persentase jumlah responden yang menggunakan ketiga indikator tersebut tampak lebih tinggi pada aspek teknologi alat penangkap ikan dan perahu. Usaha pertambakan terdapat dipesisir Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Tengah. Dari kenyataan itu dapat disimpulkan bahwa sistem penangkapan ikan dilaut lebih berkembang dibandingkan dengan sistem pemeliharaan ikan darat.

9. Aspek kepercayaan/agama dalam bidang perikanan.

Indikator untuk unsur kepercayaan/agama dalam bidang perikanan meliputi upacara yang diadakan sebelum / sesudah menangkap ikan, upacara pembuatan perahu / penglepasannya, dan pengetahuan tentang saat-saat yang baik untuk menangkap ikan. Penyelenggaraan ketiga indikator tersebut dalam bidang perikanan di daerah pesisir Aceh Barat, pesisir Aceh Timur dan pesisir Aceh Tengah menunjukkan persentase jumlah responden yang lebih tinggi (Tabel IV. 9). Diantara ketiga indikator tersebut, pengetahuan tentang saat-saat yang baik untuk menangkap ikan paling menonjol di ketiga daerah itu.

Penyelenggaraan ketiga indikator kepercayaan/agama terlihat sangat menonjol dipesisir Aceh Barat (Tabel IV. 9).

10. Aspek ekonomi dalam bidang perikanan.

Pada unsur inipun, tipologi perikanan dipesisir Aceh Barat tetap terlihat menonjol. Indikatornya yang kelihatannya nyata pada responden pesisir Aceh Barat itu ialah penjualan hasil penangkapan ikan kepada tengkulak, dan status mereka sebagai buruh nelayan. Ini berarti penangkapan ikan laut kebanyakan dilakukan oleh responden pesisir Aceh Barat yang berstatus buruh nelayan. Kenyataan ini ditemukan pula pada responden pesisir Aceh Timur, walaupun dalam persentase yang lebih rendah. Oleh sebab itu, pasar lelang tidak berfungsi dalam pemasaran hasil penangkapan ikan responden. Adapun penjualan ikan melalui pasar, dilakukan oleh sebagian responden pesisir Pidie dan Aceh Tengah. Walaupun begitu unsur eko-

nomi dalam bidang perikanan kurang menonjol dikedua daerah penelitian tersebut (Tabel IV. 10).

11. Aspek teknologi dalam bidang perdagangan.

Indikator untuk aspek teknologi dalam perdagangan meliputi tempat berjualan, cara pembayaran dengan sistem kredit, dan pengambilan kredit bank (Tabel IV. 11). Persentase responden yang menunjukkan penyelenggaraan ketiga indikator tersebut dikelima daerah penelitian relatif rendah, seperti yang ditunjukkan oleh pesisir dan pedalaman Pidie dan Aceh Tengah, serta pesisir Aceh Timur. Jika dibandingkan, persentase jumlah responden yang menggunakan ketiga indikator tersebut, tampak agak tinggi di daerah pesisir Pidie, dan pesisir Aceh Tengah. Selanjutnya, antara ketiga indikator persentase tempat berjualan lebih tinggi daripada persentase indikator yang lain. Cara pembayaran dengan sistem kredit dan penggunaan kredit bank tampaknya kurang berkembang di kalangan responden pedagang. Malahan di pedalaman Pidie dan Aceh Tengah tidak terlihat adanya responden yang menggunakan kredit bank.

12. Aspek kepercayaan/agama dalam bidang perdagangan.

Upacara ketika mau menempati kedai/toko baru merupakan indikator pertama untuk aspek kepercayaan. Indikator lainnya adalah upacara ketika mengadakan perhitungan rugi/laba perusahaan. Kedua jenis upacara itu berlangsung dalam bentuk makan bersama (kenduri).

Kenduri itu biasanya disertai dengan upacara tepung tawar. Sedangkan kenduri yang diadakan ketika memperhitungkan rugi/laba perusahaan disebut kenduri penutupan buku atau kenduri tahunan. Indikator ketiga adalah hari pantangan dalam memperjual belikan barang dagangan.

Walaupun persentasenya rendah, penyelenggara ketiga indikator tertinggi terlihat Aceh Tengah, disusul oleh pesisir Aceh Timur, dan pesisir Pidie. Daerah penelitian lainnya tidak memperlihatkan adanya penyelenggaraan indikator itu.

Diantara ketiga indikator, upacara memasuki toko baru menunjukkan persentase yang lebih tinggi dari pada kedua indikator lainnya (Tabel IV. 12).

Perindustrian dan pertambangan sengaja tidak dimasukkan

kedalam laporan ini karena kedua bidang tersebut dapat dianggap tidak berarti sama sekali di Aceh.

B. KATEGORISASI KE DALAM WILAYAH PEMBANGUNAN.

Uraian berikut adalah mengenai penentuan kategori masing-masing daerah penelitian berdasarkan data kuantitatif yang telah direalisasi di depan. Dengan menggunakan kategori secara tepat, persamaan dan perbedaan diantara kedelapan daerah penelitian dapat diketahui. Sasaran studi ini akan berakhir pada pengidentifikasian daerah-daerah penelitian berdasarkan kategori-kategori sub wilayah pembangunan pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan dan pertambangan. Maka ciri-ciri yang saling bersamaan dari sebuah kategori atau yang saling berbeda diantara berbagai kategori merupakan dasar utama bagi analisis berikutnya.

Karena penelitian lapangan studi ini ditekankan kepada hasil wawancara, maka kategori-kategori yang bisa dihasilkan pun jelas bukan dalam bentuk yang utuh dan menyeluruh. Ini merupakan salah satu kekurangan terpenting yang melatar belakangi analisis berikut ini. Kekurangan makin nyata kalau hasil analisisnya mau diimplementasikan lebih jauh lagi untuk menentukan kategorisasi masing-masing sub wilayah pembangunan di daerah Aceh. Hal ini ternyata benar apa yang dikemukakan oleh Hans Boesch (1964. p.240), bahwa : "Actually there is no such things as a true system of regions which is to be uncovered through scientific research, on the contrary, any system of regional divisions is a product of our mental synthesis".

1. Kabupaten Pidie

Kabupaten Pidie termasuk wilayah pembangunan keempat. Lokasi penelitian untuk kabupaten ini dipusatkan pada dua, yaitu Simpang Tiga dan Mila, masing - masing mewakili daerah pesisir dan pedalaman. Data hasil penelitian lapangan yang berasal dari 80 orang responden, menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Pidie diwarnai ciri-ciri dari tipologi pertanian (967,00 %), peternakan (493,00 %) dan perikanan (115,00 %). Tipologi pertanian amat menonjol (587,50 %) di daerah pedalaman. Sebaliknya tipologi perikanan hanya dijumpai di daerah pesisir (115,00 %). Sedangkan tipologi peternakan agak lebih rata penyebarannya, yaitu 213,00 % di pesisir dan 280,00 % di pedalaman (Tabel IV.13).

Catatan dari kantor Kecamatan Simpang Tiga mengungkapkan

latar belakang tipologi wilayah pesisir. Menonjolnya tipologi perikanan antara lain karena bagian utara Kecamatan Simpang Tiga berbatasan langsung dengan pantai Selat Sumatera. Kecuali itu di wilayah pesisir, penduduk mengusahakan pemeliharaan ikan tambak seluas 261,10 ha. Namun berapa banyak jumlah penduduk yang bermata pencaharian hidup di bidang perikanan sulit diketahui secara pasti. Usaha penangkapan ikan laut umumnya mereka lakukan dengan menggunakan boat, baik yang berukuran sedang maupun besar. Penangkapan ikan dengan boat yang berukuran sedang dilakukan dengan menggunakan jaring, dan setiap boat itu memuat tiga orang nelayan. Penangkapan ikan dengan boat berukuran besar (berawak 15 orang nelayan) dilakukan dengan menggunakan pukat payang dan pancing. Hasilnya mereka jual kepada pedagang perantara yang sudah menunggu di lepau di tepi pantai. Para nelayan yang menjual sendiri ke pasar dan melakukan secara lelang melalui perantara seorang petugas khusus (yang disebut hareas). Untuk itu mereka dikenakan bea lelang sebesar 5,00 %.

Selain usaha perikanan, bersawah merupakan mata pencaharian hidup yang tergolong penting bagi penduduk Kecamatan Simpang Tiga. Areal persawahan 1.311,17 ha. Produktivitas per ha berkisar dari 4,5 - 5,0 ton padi. Tanah sawah tersebut diusahakan berdasarkan sistem pertanian basah. Di tengah - tengah Kecamatan Simpang Tiga mengalir Lueng Bintang yang merupakan sumber air utama untuk pengairan. Hasil pertanian lainnya adalah tembakau, kacang tanah, bawang, dan mentimun.

Hasil perkebunan rakyat yang penting adalah kelapa. Areal tanaman kelapa tersebut 202,30 ha, dan di sana - sini terdapat tanaman emping melinjo.

Penduduk kecamatan Simpang Tiga pada tahun 1978 berjumlah 14.368 orang yang terdiri dari 3.042 kepala keluarga. Taksiran yang berasal dari kantor kecamatan, lebih kurang 85,0 % dari jumlah kepala keluarga ini belum siap.

Penduduk Kecamatan Simpang Tiga pun mengusahakan ternak secara kecil - kecilan. Rata - rata setiap kepala keluarga memiliki dua ekor sapi atau kerbau. Pengembangan usaha peternakan dalam bentuk yang lebih besar amat terbatas karena di kecamatan tersebut tidak terdapat padang penggembalaan. Dengan demikian usaha peternakan yang ada bersifat sambilan, sekedar mendapatkan tambahan tenaga produksi di bidang pertanian.

Catatan dari Kantor Kecamatan Mila menunjukkan bahwa bagian selatan wilayah kecamatan tersebut dibatasi oleh Pegunungan Gle Peuet Sagoe.

Luas Kecamatan Mila 2.502 ha, terdiri dari 23,42 % areal persawahan 56,78 % hutan 6,21 % perkampungan 2,28 % perkebunan rakyat, dan 11,30 % rawa - rawa/padang rumput/alang - alang. Lebih kurang 62,30 % dari wilayah kecamatan terletak pada ketinggian 25 - 500 m, 6,14 % pada ketinggian 10 - 25 m, dan 31,56 % pada ketinggian 0 - 10 m. Dengan demikian data tataguna tanah dapat memperjelas latar belakang mengapa tipologi pertanian dan peternakan lebih menonjol di Kecamatan Mila. Apabila dibandingkan dengan Kecamatan Simpang Tiga, produktifitas pertanian padi di Kecamatan Mila tidak berbeda, yaitu rata - rata 4,8 ton padi per ha.

Walaupun areal padang rumput/alang - alang relatif cukup luas, usaha peternakan di Kecamatan Mila hanya dikerjakan secara sambilan saja. Data tahun 1976 menunjukkan peternakan itu meliputi 526 ekor kerbau, 318 ekor sapi, 506 ekor kambing, 266 ekor biri - biri, 4.618 ekor itik, dan 5.330 ekor ayam.

Baik data primer yang berasal dari responden, maupun data sekunder yang diperoleh dari kantor kecamatan, saling memperlihatkan secara menonjol tipologi pertanian dan perikanan di Kecamatan Simpang Tiga, serta tipologi pertanian dan peternakan di Kecamatan Mila. Walaupun persentase jumlah responden yang memelihara ternak terlihat tinggi namun karena areal yang dipergunakan untuk padang penggembalaan tidak tersedia, maka tipologi peternakan tidak dimunculkan sebagai ciri penting dalam pola pengembangan sub wilayah Kecamatan Simpang Tiga.

2. Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah termasuk wilayah pembangunan ketiga. Data hasil penelitian lapangan dari Kecamatan Kota Takengon dan Kecamatan Silih Nara, masing-masing mewakili daerah pesisir dan pedalaman menampakkan ciri yang cukup menonjol dengan tipologi pertanian (1362,50 %) dan peternakan (652,50 %). Ciri-ciri tipologi perikanan dan perdagangan juga terlihat, tetapi bila dibandingkan dengan kedua tipologi yang disebutkan sebelumnya, maka ciri-ciri tersebut menjadi kurang menonjol. Akan tetapi untuk daerah penelitian di pesisir, tipologi perikanan menempati kedudukan ketiga (207,50 %), setelah pertanian (655,0 %) dan peternakan

(270,0 %). Tingginya persentase jumlah responden Kecamatan Kota Takengon dibandingkan dengan Silih Nara dalam tipologi perikanan, terutama karena letaknya di tepi Danau laut Tawar, sumber potensial perikanan yang sangat berarti bagi daerah Aceh Tengah (Tabel IV. 14).

Untuk memahami latar belakang tipologi tersebut terdapat beberapa catatan yang berasal dari masing-masing kantor kecamatan. Seperti data-data guna tanah dari Kantor Kecamatan Kota Takengon, 58,71 % dari wilayah kecamatan merupakan areal hutan. Luas kecamatan diperkirakan 58.490,20 ha. Yang sudah ditempati sebagai perkampungan baru 0,42 %, persawahan 5,33 %, perkebunan pinus 21,07 %, perkebunan rakyat 1,84 %, ladang 0,61 % dan padang rumput/alang-alang/danau 12,01 %. Selanjutnya, 70,67 % dari wilayah kecamatan terletak pada ketinggian diatas 1.000 m, 25,33 % pada ketinggian 500 – 1000 m, dan 4,0 % pada ketinggian 25 – 500 m.

Walaupun tipologi pertanian sangat menonjol untuk Kecamatan Kota Takengon, namun angka-angka yang nyata mengenai tipologi tersebut sulit diperoleh. Data dari kantor kecamatan tentang pertanian hanya menunjukkan luas sawah dan ladang, yaitu masing-masing 3.115,20 ha dan 356,80 ha. Kegiatan pertanian padi di sawah dikerjakan sekali setahun. Hanyalah angka-angka di bidang peternakan yang secara lengkap dapat diperoleh. Berdasarkan data tahun 1978 di Kecamatan Kota Takengon terdapat 948 ekor kuda, 468 ekor ayam, dan 1.541 ekor itik.

Catatan di kantor kecamatan menunjukkan bahwa penggunaan tanah untuk Kecamatan Silih Nara (luasnya 126.055,46 ha) sebagai berikut : 85,55 % masih diliputi hutan lebat dan belukar, 0,10 % dipergunakan untuk perkampungan, 1,38 % persawahan, 4,68 % perkebunan pinus, 3,51 % perkebunan rakyat, 2,86 % ladang, dan 1,92 % padang rumput/alang-alang. Lebih kurang 66,13 % dari luas keseluruhan wilayah kecamatan Silih Nara terletak pada ketinggian diatas 1.000 m, 30,84 % pada ketinggian 500 – 1000 m, dan 3,03 % pada ketinggian 25 – 500 m.

Susunan penduduk berdasarkan sumber mata pencaharian hidup meliputi 19.520 orang keluarga petani, 644 orang pedagang, 64 orang pegawai negeri, dan 48 orang pengerajin. Hasil pertanian penting adalah padi, kopi, dan tebu. Sedangkan usaha peternakan, menurut data pada tahun 1978, meliputi 7.226 ekor kerbau, 675

ekor sapi, 1.845 ekor kuda, 3.787 ekor kambing, 13.810 ekor ayam, dan 12.685 ekor itik.

Informasi dari responden maupun catatan dari kantor kecamatan mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa tipologi perwilayahan yang menonjol untuk daerah penelitian pesisir adalah pertanian, peternakan dan perikanan.

Kecuali padi, tipologi pertanian yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah tanaman perkebunan. Usaha perikanan yang sesuai untuk daerah pesisir adalah perikanan air tawar. Sedangkan untuk daerah pedalaman tipologi pertanian dan peternakan lebih menonjol. Jenis tanaman pertanian yang dapat dikembangkan tidak berbeda dengan apa yang terdapat di daerah pesisir.

3. Kabupaten Aceh Timur.

Lokasi penelitian untuk daerah ini berada di Kecamatan Peurelak dan Kecamatan Kejuruan Muda, masing-masing terletak di pesisir dan pedalaman.

Dalam pola perwilayahan, Kabupaten Aceh Timur termasuk wilayah pembangunan pertama. Data lapangan dari responden di kedua kecamatan tersebut memperlihatkan tipologi pertanian (1025,0 %). Kemudian menyusul tipologi peternakan. Tipologi pertanian dan peternakan terutama tampak di daerah pedalaman, sedangkan di daerah pesisir adalah tipologi perikanan dan pertanian (Tabel IV. 15).

Amat menonjolnya tipologi-tipologi tertentu dibandingkan dengan lainnya baik di pesisir maupun di pedalaman antara lain berkaitan dengan lingkungan fisik wilayahnya. Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Peurelak kira-kira 33,51 % dari wilayah kecamatan yang luasnya 60.848 ha itu berada pada ketinggian 0 – 10 m, 38,71 % pada ketinggian 10 – 25 m, dan 27,78 % pada ketinggian 25 – 500 m. Tidak kurang dari 81,46 % keseluruhan wilayah tersebut diliputi oleh hutan lebat dan belukar. Sisanya digunakan untuk perkampungan (2,07 %), persawahan (5,27 %), perkebunan besar (3,07 %), dan perkebunan rakyat (7,96 %).

Letaknya berbatasan langsung dengan perairan Selat Sumatera sehingga merupakan suatu peluang bagi sebagian penduduk Kecamatan Peureulak untuk bermata pencaharian hidup di bidang perikanan laut. Meluasnya penangkapan ikan di kecamatan tersebut tampak dari bermacam usaha yang dilakukan penduduk. Sebagian nelayan menggunakan peralatan modern, dan sebagian lagi masih

bertahan dengan peralatan tradisional. Unsur peralatan modern yang digunakan antara lain adalah boat dan pukut payang. Sementara itu peralatan tradisional yang masih dipakai antara lain adalah pukut dayung, jaring **meuneng**, jaring udang, **sawok sabee**, sareng **aneuk meuloh**, pukut **siblah**, **jalo kawé**, **angok**, dan **bubu laut**. Untuk memudahkan penangkapan, nelayan mempersiapkan tempat-tempat persinggahan ikan di laut yang bernama **unyam**. **Unyam** itu terbuat dari daun kelapa. Jenis ikan yang singgah pada unyam adalah **tongkol**, **jeunara**, **bawal**, **reungah**, **turoh** dan **keurimen**. Penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan menggunakan pukut payang.

Lingkungan selanjutnya berdasarkan di kecamatan Kejuruan Muda yang luasnya 74.731 ha itu, 46,66 % berada pada ketinggian 25 – 500 m, 29,84 % pada ketinggian 10 – 25 m, 1,54 % pada ketinggian 0 – 10 m, 19,60 % pada ketinggian 500 – 1.000 m, dan 2,36 % berada pada ketinggian diatas 1.000 m.

Yang dipergunakan untuk perkampungan seluas 900 ha, sawah 225 ha, perkebunan besar (karet dan kelapa sawit) 15.794,25 ha, perkebunan rakyat 2.831,25 ha, dan ladang/tegalan seluas 1.236,25 ha. Sisanya 52.826,75 ha masih merupakan hutan lebat dan belukar, serta 917,50 ha berupa padang rumput dan rawa-rawa.

Tipologi pertanian di wilayah Kecamatan Kejuruan Muda sangat diwarnai oleh upacara, kepercayaan tertentu pada pola-pola kehidupan masyarakatnya. Di antaranya adalah **kenduri nebas**, yang diadakan ketika akan mulai bersawah, **bersih deso** yang diadakan setelah panen, **kenduri bubur** dan **kenduri ulat** yang diadakan ketika batang padi membunting, (biasanya disertai penancapan tongkat, dan pinang bambu kuning, dan batang serukuh, serta menjemput semangat padi ketika panen), **kenduri zakat** yang diadakan kalau pada sampai hisap untuk dibayar zakat, dan **kenduri pulang padi** yang diadakan ketika hasil akan diangkut ke rumah.

Berdasarkan sejumlah data tersebut di atas kedua daerah penelitian di Kabupaten Aceh Timur dikelompokkan kedalam tipologi perikanan dan pertanian untuk daerah pesisir, serta tipologi pertanian dan peternakan untuk daerah pedalaman. Potensi pengembangan pertanian di daerah pedalaman terletak pada perkebunan kelapa sawit dan karet. Sedangkan tipologi perikanan yang lebih potensial untuk dikembangkan di daerah pesisir adalah perikanan laut. Melalui studi ini yang terlihat hanya tipologi-tipologi yang sudah disebutkan, sekalipun di wilayah Kabupaten Aceh Timur terdapat pula pusat-

pusat pertambangan dan perindustrian, tetapi di luar jangkauan bidang mata pencaharian hidup penduduk setempat.

4. Kabupaten Aceh Barat.

Kabupaten Aceh Barat termasuk wilayah pembangunan kedua. Hasil penelitian di Kabupaten Aceh Barat memperlihatkan ciri-ciri tipologi pertanian (880,0 %), perikanan (547,50 %), dan peternakan (325,0 %). Tipologi lainnya seperti perindustrian, perdagangan, dan pertambangan tidak memperlihatkan ciri-cirinya melalui penelitian lapangan ini, walaupun sektor perindustrian tergolong potensial untuk dikembangkan dalam masa Pelita Ketiga. Bahkan di daerah pedalaman, ciri-ciri tipologi perikanan juga tidak kelihatan (Tabel IV. 16). Yang terlihat melalui jawaban responden di daerah pedalaman hanyalah tipologi pertanian (482,50 %) dan peternakan (185,0 %).

Sebaliknya di daerah pesisir yang menonjol adalah tipologi perikanan (547,50 %), pertanian (397,50 %), dan peternakan (140,0 %). Perbedaan itu antara lain dapat dipelajari melalui lingkungan alami masing-masing wilayah penelitian, kalau di antara kedua variabel itu memang ada kaitan hubungannya.

Berdasarkan angka-angka penggunaan tanah dari kantor kecamatan, lebih kurang 62,13 % dari luas keseluruhan wilayah Kecamatan, Kuala (45.963,5 ha) berada pada ketinggian 0 – 10 m, 10,94 % pada ketinggian 10 – 25 m, dan 26,93 % pada ketinggian 25 – 500 m. Bagian barat wilayah Kecamatan Kuala berbatasan dengan pantai Samudera Indonesia. Sekitar 76,98 % dari daratannya masih meliputi hutan lebat dan hutan rawa. Dari luas kecamatan 1,74 % dipergunakan untuk perkampungan 4,85 % sawahan, 4,74 % perkebunan kelapa sawit, 5,44 % perkebunan rakyat, 4,59 % pertanian tanah kering 4,59 %, dan 1,75 % merupakan padang rumput/alang-alang, rawa-rawa serta danau.

Luas Kecamatan Seunagan 43.183,75 ha. Sekitar 83,80 % berada pada ketinggian 25 – 500 m, 3,32 % pada ketinggian yang lebih tinggi dari 1.000 m, 12,65 % pada ketinggian 10 – 25 m, dan 0,23 % pada ketinggian 0 – 10 m. Dibandingkan dengan Kecamatan Kuala, areal persawahan di Kecamatan Seunagan jauh lebih luas, yaitu 13,83 % dari luas keseluruhan wilayah Kecamatan. Yang sudah dimanfaatkan untuk perkampungan dan perkebunan rakyat, masing-masing 1,75 % dan 1,11 %, serta ladang 0,76 %. Bagian daratan lainnya yaitu seluas 82,55 % masih merupakan hutan.

Melihat angka-angka persentase itu, ternyata pertanian sawah lebih menonjol dibandingkan dengan usaha perkebunan. Produktivitas relatif rendah dibandingkan dengan di daerah penelitian di Kabupaten Pidie, yaitu rata-rata 3,6 ton per ha tanah sawah. Kuat terikatnya mereka dengan pertanian pada terlihat dari berbagai peraturan yang mereka sepakati bersama.

Para petani secara bersama-sama memagari areal persawahnya, dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada **Keujruen Blang** (petugas desa untuk kegiatan pertanian). Petugas itu menerima imbalan dari pada petani berupa 8 kg padi untuk setiap **naleh** tanah sawah yang terletak di bagian pinggiran, dan 4 kg padi untuk setiap **naleh** sawah yang terletak agak ke tengah. Kalau ada kerbau yang memakan tanaman padi yang dipagari, pemiliknya diharuskan mengganti.

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan diatas dapatlah disimpulkan bahwa tipologi perwilayahan daerah-daerah penelitian di Kabupaten Aceh Barat, adalah perikanan dan pertanian di daerah pesisir, serta tipologi pertanian dan peternakan di daerah pedalaman.

Tabel IV. 1

ASPEK TEKNOLOGI DALAM BIDANG PERTANIAN
(dalam persentase)

Daerah Penelitian	Aspek Teknologi			
	Pengolahan tanah	Pupuk	Sistem Pengairan	Total
1. Pidie Pesisir	52,50	52,50	52,50	157,50
2. Pidie Pedalaman	85,00	85,00	85,00	255,00
3. Aceh Tengah Pesisir	85,00	72,50	85,00	242,50
4. Aceh Tengah Pedalaman	97,50	10,00	97,50	205,00
5. Aceh Timur Pesisir	32,50	32,50	32,50	97,50
6. Aceh Timur Pedalaman	97,50	97,50	97,50	292,50
7. Aceh Barat Pesisir	70,00	70,00	70,00	210,00
8. Aceh Barat Pedalaman	92,50	12,50	92,50	197,50

Tabel IV. 2

ASPEK KEPERCAYAAN/AGAMA DALAM BIDANG PERTANIAN
(dalam persentase)

Daerah Penelitian	Aspek Kepercayaan/Agama			
	Kenduri Sawah	Upacara minta hujan	Penghindar hama	Total
1. Pidie Pesisir	60,00	17,50	10,00	87,50
2. Pidie Pedalaman	97,50	0,00	0,00	97,50
3. Aceh Tengah Pesisir	12,50	90,00	70,00	172,50
4. Aceh Tengah Pedalaman	100,00	100,00	100,00	300,00
5. Aceh Timur Pesisir	37,50	0,00	30,00	67,50
6. Aceh Timur Pedalaman	97,50	0,00	97,50	195,00
7. Aceh Barat Pesisir	65,00	0,00	0,00	65,00
8. Aceh Barat Pedalaman	97,50	5,00	0,00	102,50

Tabel IV. 3

ASPEK EKONOMI DALAM BIDANG PERTANIAN
(dalam persentase)

Daerah Penelitian	Aspek Ekonomi			
	Pertanian bahan makanan	Tanaman Perdagangan	Sistem bagi hasil—	Total
1. Pidie Pesisir	57,50	12,50	10,00	80,00
2. Pidie Pedalaman	92,50	40,00	5,00	137,50
3. Aceh Tengah Pesisir	32,50	65,00	17,50	115,00
4. Aceh Tengah Pedalaman	5,00	97,50	0,00	102,50
5. Aceh Timur Pesisir	52,50	0,00	0,00	52,50
6. Aceh Timur Pedalaman	97,50	30,00	12,50	140,00
7. Aceh Barat Pesisir	65,00	0,00	0,00	65,00
8. Aceh Barat Pedalaman	100,00	77,50	0,00	177,50

Tabel IV. 4

ASPEK ORGANISASI SOSIAL DALAM BIDANG PERTANIAN
(dalam persentase)

Daerah Penelitian	Aspek Organisasi Sosial			
	BUUD/KUD	Gotong royong	Bimas/Inmas	Total
1. Pidie Pesisir	5,00	12,50	37,50	55,00
2. Pidie Pedalaman	5,00	0,00	92,50	97,50
3. Aceh Tengah Pesisir	32,50	72,50	20,00	125,00
4. Aceh Tengah Pedalaman	0,00	100,00	0,00	100,00
5. Aceh Timur Pesisir	5,00	32,50	12,50	50,00
6. Aceh Timur Pedalaman	0,00	97,50	32,50	130,00
7. Aceh Barat Pesisir	0,00	57,50	0,00	57,50
8. Aceh Barat Pedalaman	0,00	0,00	5,00	5,00

Tabel IV. 5

ASPEK TEKNOLOGI DALAM BIDANG PETERNAKAN
(dalam persentase)

Daerah Penelitian	Aspek Teknologi			
	Penangkap ikan	Perahu	Tambak	Total
1. Pidie Pesisir	52,50	32,50	0,00	85,00
2. Pidie Pedalaman	70,00	70,00	0,00	140,00
3. Aceh Tengah Pesisir	50,00	37,50	10,00	100,00
4. Aceh Tengah Pedalaman	70,00	0,00	0,00	70,00
5. Aceh Timur Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aceh Timur Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Aceh Barat Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aceh Barat Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel IV. 6

ASPEK KEPERCAYAAN/AGAMA DALAM BIDANG PETERNAKAN
(dalam persentase)

Daerah Penelitian	Aspek Kepercayaan/Agama			
	Tanda-tanda Hewani	Penolakan Wabah	Pemberian	Total
1. Pidie Pesisir	5,00	12,50	5,00	22,50
2. Pidie Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aceh Tengah Pesisir	32,50	12,50	25,00	70,00
4. Aceh Tengah Pedalaman	70,00	70,00	32,50	172,50
5. Aceh Timur Pesisir	0,00	0,000,00		0,00
6. Aceh Timur Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Aceh Barat Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aceh Barat Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel IV. 7

ASPEK EKONOMI DALAM BIDANG PETERNAKAN
(dalam persentase)

Daerah Penelitian	Aspek Ekonomi			
	Sistem bagi hasil	Ternak besar	Ternak Unggas	Total
1. Pidie Pesisir	00,00	52,50	52,50	105,00
2. Pidie Pedalaman	0,00	70,00	70,00	140,00
3. Aceh Tengah Pesisir	0,00	50,00	50,00	100,00
4. Aceh Tengah Pedalaman	0,00	70,00	70,00	140,00
5. Aceh Timur Pesisir	0,00	32,50	30,00	62,50
6. Aceh Timur Pedalaman	0,00	97,50	90,00	187,50
7. Aceh Barat Pesisir	0,00	70,00	70,00	140,00
8. Aceh Barat Pedalaman	0,00	92,50	92,50	185,00

Tabel IV. 8

ASPEK TEKNOLOGI DALAM BIDANG PERIKANAN
(dalam persentase)

Daerah Penelitian	Aspek Teknologi			
	Penangkap ikan	Perahu	Tambak	Total
1. Pidie Pesisir	17,50	10,00	25,00	52,50
2. Pidie Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aceh Tengah Pesisir	57,50	50,00	10,00	242,50
4. Aceh Tengah Pedalaman	0,00	0,00	5,00	5,00
5. Aceh Timur Pesisir	57,50	37,50	20,00	115,00
6. Aceh Timur Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Aceh Barat Pesisir	72,50	72,50	0,00	145,00
8. Aceh Barat Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel IV. 9

ASPEK KEPERCAYAAN/AGAMA DALAM BIDANG PERIKANAN
(dalam persentase)

Daerah Penelitian	Aspek Kepercayaan/Agama			
	Upacara menangkap ikan	Upacara Perahu	Pengetahuan tentang waktu	Total
1. Pidie Pesisir	5,00	10,00	10,00	25,00
2. Pidie Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aceh Tengah Pesisir	5,00	12,50	50,00	67,50
4. Aceh Tengah Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aceh Timur Pesisir	37,50	37,50	52,50	127,50
6. Aceh Timur Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Aceh Barat Pesisir	72,50	72,50	72,50	217,50
8. Aceh Barat Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel IV. 10

ASPEK EKONOMI DALAM BIDANG PERIKANAN
(dalam persentase)

Daerah Penelitian	Aspek Ekonomi			
	Pasar Lelang	Tengkulak	Buruh Nelayan	Total
1. Pidie Pesisir	12,50	20,00	5,00	37,50
2. Pidie Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aceh Tengah Pesisir	12,50	15,00	15,00	22,50
4. Aceh Tengah Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aceh Timur Pesisir	0,00	57,50	52,50	110,00
6. Aceh Timur Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Aceh Barat Pesisir	0,00	92,50	92,50	185,00
8. Aceh Barat Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel IV. 11

ASPEK TEKNOLOGI DALAM BIDANG PERDAGANGAN
(dalam persentase)

Daerah Penelitian	Aspek Teknologi			Total
	Tempat berjualan	Cara pembayar- an secara kredit	Kredit Bank	
1. Pidie Pesisir	57,50	10,00	5,00	32,50
2. Pidie Pedalaman	5,00	0,00	0,00	5,00
3. Aceh Tengah Pesisir	17,50	10,00	10,00	37,50
4. Aceh Tengah Pedalaman	12,50	10,00	0,00	22,50
5. Aceh Timur Pesisir	20,00	0,00	5,00	25,00
6. Aceh Timur Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Aceh Barat Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aceh Barat Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel IV. 12

ASPEK KEPERCAYAAN/AGAMA DALAM BIDANG PERDAGANGAN
(dalam persentase)

Daerah Penelitian	Aspek Kepercayaan/Agama			Total
	Upacara Memasuki Toko Baru	Ketika perhitungan Laba	Hari Pantangan	
1. Pidie Pesisir	0,00	10,00	0,00	10,00
2. Pidie Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aceh Tengah Pesisir	12,50	10,00	10,00	32,50
4. Aceh Tengah Pedalaman	10,00	0,00	10,00	20,00
5. Aceh Timur Pesisir	20,00	0,00	0,00	20,00
6. Aceh Timur Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Aceh Barat Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aceh Barat Pedalaman	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel IV. 13.

TIPOLOGI LINGKUNGAN BUDAYA DAERAH PENELITIAN PIDIE
(dalam persentase)

Aspek Geografi Budaya	Pesisir	Pedalaman	Jumlah
1. Pertanian	380,00	587,50	967,50
2. Peternakan	213,00	280,00	493,00
3. Perikanan	115,00	0,00	115,00
4. Perindustrian	0,00	0,00	0,00
5. Perdagangan	42,50	5,00	47,50
6. Pertambangan	0,00	0,00	0,00

Tabel IV. 14.

TIPOLOGI LINGKUNGAN BUDAYA DAERAH PENELITIAN ACEH TENGAH
(dalam persentase)

Aspek Geografi Budaya	Pesisir	Pedalaman	Jumlah
1. Pertanian	655,00	707,50	1.362,50
2. Peternakan	270,00	382,50	652,50
3. Perikanan	207,50	5,00	212,50
4. Perindustrian	0,00	0,00	0,00
5. Perdagangan	70,00	42,50	112,50
6. Pertambangan	0,00	0,00	0,00

Tabel IV. 15.

TIPOLOGI LINGKUNGAN BUDAYA DAERAH PENELITIAN ACEH TIMUR
(dalam persentase)

Aspek Geografi Budaya	Pesisir	Pedalaman	Jumlah
1. Pertanian	267,50	757,50	1.025,00
2. Peternakan	62,50	187,50	250,00
3. Perikanan	352,50	0,00	352,50
4. Perindustrian	0,00	0,00	0,00
5. Perdagangan	45,00	0,00	45,00
6. Pertambangan	0,00	0,00	0,00

Tabel IV. 16.

TIPOLOGI LINGKUNGAN BUDAYA DAERAH PENELITIAN ACEH BARAT
(dalam persentase)

Aspek Geografi Budaya	Pesisir	Pedalaman	Jumlah
1. Pertanian	397,50	482,50	880,00
2. Peternakan	140,00	185,00	325,00
3. Perikanan	547,50	0,00	547,50
4. Perindustrian	0,00	0,00	0,00
5. Perdagangan	0,00	0,00	0,00
6. Pertambangan	0,00	0,00	0,00

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.

Seperti telah diketahui di Indonesia telah berkembang suatu pemikiran tentang konsep rencana pengembangan wilayah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (Repelita II 1974/1975 sampai 1978/1979). Konsep ini antara lain mempunyai tujuan agar usaha pembangunan merata di seluruh pelosok Indonesia. Hasil penelitian di 8 (delapan) wilayah sampel kecamatan (Peureulak, Kejeureun Muda, Kuala, Seunagan, Kota Takengon, Silih Nara, Simpang Tiga, dan Mila) di Kabupaten-kabupaten Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Tengah, dan Pidie, tentang pandangan geografi budaya dalam wilayah pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Aceh Timur merupakan wilayah pengembangan pertanian dan peternakan di daerah pedalaman, serta perikanan dan pertanian di daerah pesisir.
2. Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah pengembangan pertanian dan peternakan di daerah pedalaman, serta perikanan dan pertanian di daerah pesisir.
3. Kabupaten Aceh Tengah merupakan wilayah pengembangan pertanian dan peternakan di daerah pedalaman serta pertanian dan perikanan di daerah pesisir.
4. Kabupaten Pidie merupakan wilayah pengembangan pertanian dan peternakan di daerah pedalaman, serta perikanan di daerah pesisir.

Tipologi yang terlihat menonjol dari delapan kecamatan di daerah Aceh itu adalah pertanian dan perikanan. Tipologi pertanian terutama terdapat di pedalaman sedang tipologi perikanan terdapat di pesisir. Namun berdasarkan studi kepustakaan di daerah Aceh terdapat pula tipologi-tipologi lainnya seperti pertambangan, industri dan peternakan. Tipologi pertambangan dan industri terutama terdapat di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur, sedang tipologi peternakan terdapat di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tengah.

B. SARAN:

Pola perwilayahan yang akan disarankan ini adalah bersifat tentatif. Dilihat kepada potensi sumber dayanya daerah Aceh dapat dikategorikan kedalam lima wilayah pembangunan. Pertama, wilayah pembangunan pantai timur meliputi Kabupaten Aceh Timur dan sebagian Aceh Utara dengan pusat pengembangannya Lhok Seumawe. Wilayah ini dapat dipersiapkan untuk menampung berbagai kegiatan industri dan perkebunan besar. Kedua, wilayah pembangunan pantai utara meliputi sebagian Kabupaten Aceh Utara dan Pidie dengan pusat pengembangannya Bireuen. Wilayah ini dapat dititik beratkan kepada usaha peningkatan produksi pangan (beras dan palawija) melalui intensifikasi areal persawahan, serta perikanan dan perdagangan.

Ketiga, wilayah pembangunan ujung utara Pulau Sumatera yang mencakup Kabupaten Aceh Besar, Kodya Banda Aceh, dan Sabang dengan pusat pengembangannya Banda Aceh. Wilayah ini terutama dapat dipersiapkan untuk kegiatan pemerintahan, pusat pendidikan tinggi, perkebunan rakyat dan peternakan. Keempat, wilayah pantai barat meliputi Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Selatan dengan pusat pengembangannya Meulaboh. Wilayah barat ini dapat diutamakan untuk perluasan dan intensifikasi persawahan, perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Kelima, wilayah dataran pegunungan Bukit Barisan, yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan daerah-daerah lain di sepanjang Bukit Barisan, dengan pusat pengembangannya Takengon. Wilayah ini dapat diarahkan kepada kegiatan perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

Jadi pada dasarnya, arah pembangunan wilayah baik tingkat nasional, tingkat propinsi, tingkat kabupaten, maupun tingkat kecamatan bahkan desa-desa tidak lain adalah demi kepentingan pembangunan nasional itu sendiri. Oleh sebab itu dalam menentukan wilayah pembangunan seyogyanya didasarkan pada potensi yang terdapat di tiap-tiap tipologi wilayah pembangunan. Disamping itu kiranya dengan memperhatikan variasi perimbangan fakta geografi, maka dapat ditentukan pemusatan kegiatan-kegiatan pembangunan wilayah. Hal ini akan dapat membantu dalam penyusunan perencanaan daerah (regional-planing).

LAMPIRAN A :

GLOSSARY

abee dapu	abu gosok
ajeumat	jimat
aneuk creueh	gerigi garu
aneuk yok	salah satu bagian dari bajak
bagi lhee	sistem bagi hasil dalam bidang usaha tani: 2 bagian untuk penggarap dan 1 untuk pemilik tanah.
bagi peuet	idem bagi lhee : 3 untuk penggarap dan 1 un- tuk pemilik tanah.
bagi limong	idem bagi lhee : 4 untuk penggarap dan 1 un- tuk pemilik tanah.
baja	pupuk
bak kala	batang kincong
bak trom	nama sejenis
bana	hama tanaman padi
blok	salah satu bagian dari bajak
catok	cangkul
ceumatok	mencangkul
creueh	garu
dara pade	padi mulai menghijau daunnya
doa lakee ujeuen	doa minta hujan
eh	secara harfiah berarti tidur
langai	bagian dari bajak
gampong	kampung
geusong	walang sangit
harea	juru lelang ikan
iku leuek	bagian dari bajak
jalo kawé	perahu pancing
jang	alat penangkap ikan
jeue	jala
jeunara	nama sejenis ikan
jeungki	alat penumbuk padi
kanduri	kenduri
alen	kenduri ketika menanam padi
alen pade	kenduri ketika padi selesai digirik
blang	kenduri sawah
bijeh	kenduri ketika menabur bibit
keumaweuh	kenduri ketika padi mulai membunting

peutron buku

tamong keude

thon

tob blang

tron blang

tueng pade

kepuh kurik (Gayo)

keujruen blang

keunong angen

keureupoh

keurimen

klah

lamat

langai

boh langai

lham

lueng

mata langai

mawah

meunasah

meuneng

meuseuraya

meu'ue

muge

ungkot

naleh

naleueng sambo

nebas (Tamiang)

neumat

on manek manoe

on seunijuek

on kala

on pineung mirah

peusijuek

publoh

reugah

ruleue

sadeuep

kenduri ketika perhitungan rugi laba perusahaan.

kenduri ketika memasuki toko baru

kenduri tahunan

kenduri ketika sawah selesai ditanam

kenduri ketika turun ke sawah

kenduri 7 hari sebelum panen

kandang unggas

petugas desa dalam pertanian

penyakit timpani

kandang unggas

nama sejenis ikan

bagian dari bajak

kayu pegangan pada bajak

bajak

bagian dari bajak

tembilang

saluran air

mata bajak

sistim bagi hasil dalam usaha tani

surau, langgar

nama sejenis ikan

gotong royong

membajak

tengkulak

tengkulak dalam jual beli ikan

ukuran luas ($\frac{1}{4}$ hektar)

nama sejenis rumput

menebas hutan

pegangan pada bajak

nama sejenis tetumbuhan

daun sidingin

daun kencong

daun pinang yang sudah berwarna merah

tepung tawar

memperinjakkan

nama sejenis ikan

tanggok

sabit

sareng aneuk meuloh
 sawok sabee
 siblah
 seumantong
 seunong sira
 siwa
 taloe peunganak
 taloe lihie
 taloe linggang
 taloe sinthak
 turoh
 umong ie peuneuek
 umong raleue
 unyam

 upah
 wer (Gayo)
 weue
 yok

saringan untuk menangkap nener
 tangkok untuk menangkap sabu
 separuh
 kelelawar
 termakan garam
 sewa
 sejenis tali pada bajak
 tali pada leher kerbau ketika membajak
 sejenis tali pada bajak
 sejenis tali pada bajak
 nama sejenis ikan
 pengairan basah
 pengairan kering
 tempat persinggahan ikan di laut yang sengaja dibuat nelayan.
 upah
 kandang ternak besar
 kandang ternak besar
 alat untuk membajak

LAMPIRAN B :

DAFTAR INFORMAN PANGKAL DAN IDENTITASNYA

Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan/Status
A. Kecamatan Simpang Tiga, Pidie.			
1. M.Yusuf	55	Buta huruf	Kepala Kampung
2. Ibrahim Amin	55	Sekolah Desa	Pegawai Kecamatan
3. Abua Latif Sukon	50	Buta huruf	Pedagang ikan
4. M. Nur	39	KPG	Kepala SD
5. T. Bardan	46	SRI	Pengusaha kilang padi
B. Kecamatan Mila, Pidie.			
1. Yusdi Hamid, BA	31	APDN	Kepala Kantor Kecamatan
2. A. Latif Bugis	45	SD	Kepala Mukim
3. M. Yusuf	35	SD	Wakil Kepala Kampung
4. Ibrahim Usman	40	SMA	Komandan Sektor
5. M. Yunus Usman, BA	31	IKIP	Kepala SD
C. Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.			
1. M. Arsyad	65	Sekolah Desa	Kepala Mukim
2. M. Zein	53	Sekolah Desa	Kepala Mukim
3. Abubakar Ibrahim	37	Pengamat Kehewanan	Pegawai Kecamatan
4. M. Yunus Ibrahim	43	SPG	Kepala SD
5. M. Syarif	49	SMP	Kepala Kantor Kecamatan
D. Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Timur.			
1. Baharuddin A.S.	39	SD	Pegawai Kecamatan
2. M. Yunus N.	35	KPAA	Pegawai Kecamatan
3. Usman Rani	42	SGA	Kepala SD
4. Dahlan Kardi	30	SMEP	Kepala Kampung
5. Ibrahim	68	Sekolah Desa	Kepala Mukim

Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan/Status
E. Kecamatan Kota Takengon, Aceh Tengah.			
1. Amir Lugai, BA	36	APDN	Camat
2. A. Sitompul	38	SMA	Seksi PMD
3. Aman Kardinah	60	SD	Kepala Mukim
4. Tgk. Umar	62	Tawalib	Tokoh Masyarakat
5. Abdulah Husni	62	SMI	Tokoh Masyarakat
F. Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah.			
1. M. Yunus	46	SGB	Camat
2. Sarjono	33	SMEA	Seksi PMD
3. Aman Rukiah	55	SD	Kepala Mukim
4. Aman Safwan	39	SD	Kepala Kampung
5. A. Kadir Delvi	43	Persamaan KPG	Kepala SD
G. Kecamatan Kuala, Aceh Barat.			
1. Raja Samaindra	32	SD	Kepala Kampung
2. M. Yusuf	32	SD	Nelayan
3. Nyak Umar	34	SD	Kepala Kampung
4. T. Usman Tjut	30	MAAIN	Imam Mesdjid
5. Safari	28	SPG	Kepala Desa
H. Kecamatan Seunagan, Aceh Barat.			
1. Safriadi	24	SPMA	Pegawai Pertanian
2. Syamsuddin Diwa, BA	30	APDN	Pegawai Kecamatan
3. Nyak Dollah	52	SMP	Kepala Mukim
4. Haji Usman	65	Sekolah Desa	Tokoh Masyarakat
5. Jailani	34	SMP	Kepala Kampung

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adnan Abdullah, "Analisa dan Proyeksi Tentang Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Aceh", Kertas Kerja, Banda Aceh, 1977.
- , **Perantauan, Perubahan Status Sosial Ekonomi dan Tingkat Fertilitas : Suatu studi di Pidie, Aceh**, Laporan Penelitian, Banda Aceh, 1978.
- , "Sebuah Masalah Tentang Pendidikan dan Pembangunan", **Sinar Darussalam**, No. 63, Agustus/September 1975, hal.: 39 – 43.
- Bappeda, **Rancangan Pola Dasar Repelita Ketiga Daerah Istimewa Aceh**, Kantor Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1978.
- Bintarto, R. dan Surastopo Hadisumarno, **Metode Analisa Geografi**, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1977.
- Boesch, Hans, **A Geography of World Economy : The van Nostrand Series in Geography**, D.Van Nostrand Company, Inc. Princeton, New Jersey, 1964.
- Buku Repelita ketiga Daerah Istimewa Aceh**, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 1979.
- Castles, Lance, and Alfian, "Some Aspect of Rural Development in Aceh", Stensilan, PLPIIS, Aceh, 1975.
- Daldjoeni, N, "Perkembangan Sebagai Kesalingtergantungan (Tinjauan Buku)", **Prisma**, No. 1, Tahun VIII, Januari 1979, hal.88-90.
- Djenen, "Pendekatan Terhadap Analisa Regional", Manuscrip, 1979.
- DPRD Kabat, **Conceptie Pola Dasar dan Pola Proyek "Repelita" Kabupaten Aceh Tengah 1974 s/d 1979**, Takengon, 1974.
- Fisher, Benyamin H. "Perencanaan Regional dalam Konteks Pembangunan Nasional Indonesia : Menuju Suatu Kerangka untuk Kebijaksanaan, Analisa dan Professi", **Prisma**, No. 3, Tahun IV, Juni 1975, hal: 3 – 10.

- Glasson, John, **Penghantar Perencanaan Regional**, Terjemahan Paul Sitohang, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1977.
- Hariri 'Hady, "Kedudukan dan Arah Pembangunan Daerah Atjeh", **Prisma**, No. 2, Pebruari 1972, hal: 20 - 26.
- , "Pembangunan Daerah Dalam Repelita II", **Prisma**, No.2, Tahun III, April 1974, hal : 63 - 70.
- Hasan Basry, Muhammad, et al, **Memorandum Gubernur Kepala Daerah Aceh A. Muzakir Walad : 1968-1978**, Kantor Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1978.
- , **Beberapa Informasi Mengenai Daerah Istimewa Aceh**, Sekretariat Wilayah/Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1977.
- Ibrahim Hasan, "Agriculture and Rural Development in Aceh", Stensilan, Kertas Seminar untuk Seminar Pembangunan Desa menuju Pemerataan, dalam rangka Hari Jadi ke 18 Universitas Syiah Kuala, Darussalam 30 Agustus - 1 September 1979.
- Kampto Utomo, **Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah Way Sekampung (Lampung)**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1975.
- Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, **Aceh dalam angka 1977**, Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1977.
- Loughlin, J. Brian, **Urban and Regional Planning : A System Approach**, Faber and Faber, London, 1970.
- Madjid Ibrahim, A. "Pendekatan Regional dalam Pembangunan Nasional", **Prisma**, No. 3, Tahun V, April 1976, hal.65-72.
- , and H. Benjamin Fisher, "Regional Development Studies and Planning in Indonesia", **Bulletin of Indonesian Economic Studies**, No. 2, Vol. IV, July 1979, pp:113-127.
- Miller, E. Willard, George T. Renner, and Association, **Global Geography**, Thomas Y. Crowell Company, New York, 1963.
- Nas, P.J.M. Linda Darmayanti, dan Farida Sjamsir, "Kabupaten di Indonesia : Suatu Usaha Pengklasifikasian", **Prisma**,

No. 1, Tahun VIII, Januari 1979, hal:72-87.

Owen, Edgar, dan Robert shaw, **Pembangunan Ditinjau Kembali**, Terjemahan A.S. Wan, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1974.

Redmana, Han R. "Pusat-pusat/Kutub-kutub Pertumbuhan di Indonesia", **Cakrawala**, No. 5, Tahun X, Oktober-Nopember 1978, hal: 57 - 77.

Risyad, T. "Pembangunan Desa, Pemerataan Kesempatan Kerja, dan Pembagian Pendapatan", Stensilan, Kertas Seminar untuk Seminar Pembangunan Desa Menuju Pemerataan dalam rangka Hari Jadi ke 18 Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 30 Agustus - 1 September 1979.

———, et al, **Ringkasan Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga Propinsi Daerah Istimewa Aceh (1979/1980 - 1983/1984)**. Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 1979.

Universitas Syiah Kuala, **Monografi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh**, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1972.

Wisaksono Wirjodiharjo, M. **Ilmu Tubuh Tanah : Tubuh Tanah, Pembentukannya, Susunannya dan Pembagiannya**, Noordhoff Kolff, NV, Djakarta, 1953.

Van Aartsen, J.P. **Ilmu Bumi Ekonomi**, Terjemahan Adnan Sjami, Cetakan III, PT Pembangunan, Djakarta, 1955.

Viner, Jacob, "The Economics of Development", in A.N.Agarwala, and S.P. Singh (Eds), **The Economic of Underdevelopment**, Oxford University Press, London, New York, 1970, pp:9-31.



98² B.T. Darl Greenwich

